

**KOLABORASI AKTOR DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA
HUTAN MANGROVE TONGKE - TONGKE
KABUPATEN SINJAI**

ASTUTI UMAR

Nomor Stambuk : 10561 05084 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**KOLABORASI AKTOR DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA
HUTAN MANGROVE TONGKE-TONGKE
KABUPATEN SINJAI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

ASTUTI UMAR

Nomor Stambuk: 10561 05084 14

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOAIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

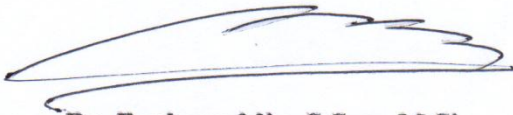
2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan Pariwisata
Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai
Nama Mahasiswa : Astuti Umar
Nomor Stambuk : 10561 05084 14
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Pembimbing II



Nasrul Haq, S.Sos., MPA

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



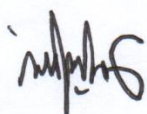
Nasrul Haq, S.Sos., MPA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor: 0007/FSP/A.1-VIII/II/40/2019, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

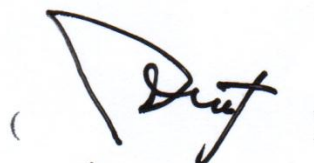
Sekretaris



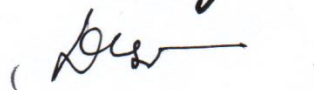
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji

1. Prof. Dr. Alyas, MS (Ketua)



2. Dra. Hj. Juliati Saleh, M.Si



3. Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si



4. Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si



PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Astuti Umar

Nomor Stambuk : 10561 05084 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabuta gelar akademik.

Makassar, 09 Februari 2019

Yang Menyatakan



Astuti Umar

ABSTRAK

ASTUTI UMAR, Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke – Tongke Kabupaten Sinjai (dibimbing oleh Nasrul Haq dan Burhanuddin)

Kolaborasi sebagai proses kerja sama dalam sebuah pengaturan pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih lembaga dengan lembaga non pemerintah dalam sebuah pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus. Pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke – Tongke Kabupaten Sinjai melibatkan beberapa aktor diantaranya DISPARBUD, DISKAN, DLHK, Pemerintah Desa, LSM KPSDA-ACI serta Masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses kolaborasi yang dapat dilihat dari *face to face to dialogue, trust building, comitmmnt to process, shared understanding, dan intermediate outcomes*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. jumlah informan sebanyak 12 orang yang terdiri atas LSM KPSD-ACI 2 orang, DISPARBUD 3 orang, DLHK 2 orang, DISKAN 2 orang, Masyarakat 2 orang, Pemerintah Desa 1 orang. Teknik pengumpulan data utama adalah observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya dilakukan pengabsahan data dengan menggunakan hasil triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang melibatkan aktor yang dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove tongke-tongke merupakan proses *non linear* sebagai pencapaian dari *face to face to dialogue, trust building, comitmmnt to process, shared understanding, dan intermediate outcomes*. Hal ini diketahui dari (1) *face to face to dialogue* belum maksimal dikarenakan melakukan beberapa kali dialog dan tidak intensif, (2) *trust building* secara aksi sudah dijalankan (3) *commitment to process* masih kurang dikarenakan sebuah keputusan yang tidak diterima oleh satu aktor, (4) *Shared understanding* terkait indikator yang ingin dicapai melalui proses kolaborasi kurang maksimal, (5) *intermediate outcome* memberikan sinergitas, dan komitmen para aktor untuk senantiasa melibatkan diri dalam kolaborasi.

Kata kunci: *Governance*, Kolaborasi, dan Pembangunan Pariwisata.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **“Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke – Tongke Kabupaten Sinjai”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua, dengan penuh kesabaran dan kasih sayang yang berlimpah mengasuh, membesarkan, mendidik penulis dengan perjuangan dan pengorbanan yang tulus, disertai doa restu yang senantiasa mengiringi penulis dalam setiap langkah.
2. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos. MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara.
6. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara atas limpahan ilmu yang diberikan kepada penulis sebagai bekal di masa yang akan datang.
7. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai khususnya Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup beserta staf serta masyarakat Desa Tongke – Tongke yang telah menerima peneliti dengan hangat untuk meneliti di Kabupaten Sinjai.
9. Kordinator LSM KPSDA-ACI yang juga meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan.
10. Sahabat Jenderal Ilmiah IX yang telah menjadi saudara tempat berbagi untuk segala hal baik sedih maupun senang.
11. Teman-teman di UKM LKIM-PENA yang merupakan tempat penulis mendapatkan ilmu dan pengalaman yang luar biasa.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak sempat disebutkan satu persatu semoga menjadi ibadah dan mendapat imbalan dari-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tapi setiap manusia berpotensi melakukan gerak penyempurna. Oleh karena itu dengan

segenap kerendahan hati, kritik dan saran yang sifatnya membangun serta diharapkan untuk refrensi hidup di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak. dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang melimpah atas segala kebaikan semua. Amin.

Makassar 11 Januari 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Astuti Umar', with stylized, overlapping letters.

Astuti Umar

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kolaborasi	13
B. Komponen Kolaborasi	17
C. Hambatan Kolaborasi	23
D. Konsep Pembangunan Pariwisata	24
E. Kerangka Pikir	29
F. Fokus Penelitian	30
G. Deskripsi Fokus Penelitian	30
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian	36
C. Sumber Data	37
D. Informan Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Pengabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	42
B. Hasil kolaborasi aktor dalam pembangunan hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai	58
1. <i>Face to face to dialogue</i>	59
2. <i>Trust Building</i>	73
3. <i>Commitmn to Process</i>	82
4. <i>Shared Understanding</i>	91
5. <i>Intermediate Outcomes</i>	98

C. Pembahasan kolaborasi aktor dalam pembangunan hutan Mangrove	
Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai	103
1. <i>Face to face to dialogue</i>	103
2. <i>Trust Building</i>	109
3. <i>Commitmn to Process</i>	112
4. <i>Shared Understanding</i>	116
5. <i>Intermediate Outcomes</i>	118
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
 DAFTAR PUSTAKA	123
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kunjungan Wisatawan Kabupaten Sinjai	8
Tabel 2 Informan Penelitian	38
Tabel 3 Kegiatan LSM KPSDA – ACI	55
Tabel 4 Peran aktor dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke – Tongke Kabupaten Sinjai	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir	29
Gambar 2 Wilayah Zonasi Kabupaten Sinjai	42
Gambar 3 Struktur organisasi	43
Gambar 4. Struktur organisasi	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang kaku dan sentralistik dalam prespektif administrasi publik yang masih menggambarkan praktek *the old publik administration* (OPA) yakni ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi sehingga dirancang dan dilakukan pembenahan di semua bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu menciptakan hubungan yang sinergitas antara birokrasi dengan masyarakat maupun dalam interal birokrasi untuk menjawab berbagai tuntutan kebutuhan dan tuntutan publik yang semakin kompleks. Sehingga dengan adanya problematika tersebut, konsep atau ide baru dilahirkan yaitu konsep "*Reinventing Government*" sebagai arah baru untuk melakukan reformasi administrasi. Konsep ini lahir dalam perspektif *new public management* (NPM) yang menuntut birokrasi publik harus lebih berperan cara "*stering*" (mengarahkan) daripada "*rowing*" (mengayuh), peran birokrasi lebih sebagai fasilitator atau supervisor dalam penyelenggaraan urusan publik. Konsep NPM menegaskan bahwa perlunya pelibatan berbagai stakeholder di luar pemerintah yakni sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan publik, Osborne dan Gaebler dalam Sabaruddin (2015)

Tata pemerintahan kolaborasi merupakan langkah-langkah optimalisasi peran pemerintah yang ditempuh dalam implementasi pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik pada abad XXI. Kedudukan kolaborasi

dalam administrasi publik jika ditelaah dari berbagai perspektif keilmuan yang ada maka dalam lingkup sosiologi kolaborasi merupakan relasi antara organisasi namun dalam ilmu administrasi kolaborasi merupakan relasi antar pemerintahan yang ditempuh dengan cara saling berinteraksi melalui konsensus baik secara formal ataupun informal dalam suatu aturan yang telah disepakati bersama, menjalin hubungan yang sinergitas dan memiliki rasa saling percaya serta saling menguntungkan.

Pengertian di atas merupakan definisi kolaborasi yang telah dikembangkan oleh Thomson et al. (2006: 21). Dalam konteks pembahasan kolaborasi yang dijelaskan bahwa terdapat beberapa aktor yang mempunyai tujuan yang sama dalam melakukan kolaborasi hanya saja mereka tidak memiliki spesialisasi dan kapasitas yang sama, mereka terkesan berkolaborasi karena kapasitas dan pengetahuan yang mereka miliki. Dengan demikian, pemecahan suatu masalah secara kolaborasi antar institusi atau pemerintah menjadi urusan yang sangat perlu untuk dilakukan.

Mengingat banyaknya problematika yang terjadi dalam urusan penyelenggaraan publik sehingga kolaborasi antar aktor menjadi isu penting dalam administrasi publik yakni tidak dapat dicapai secara tuntas dan optimal jika dalam pelaksanaannya dilakukan secara *independent* Sabaruddin (2015: 25). Salah satunya adalah masalah terkait dengan pembangunan pariwisata.

Pembangunan pariwisata merupakan suatu masalah yang sangat krusial dan tidak dapat dilakukan secara *independent* atau dalam artian harus dipecahkan bersama serta sangat penting untuk segera dituntaskan. Apabila

masalah pembangunan pariwisata tidak terpecahkan maka akan berdampak pada laju pemerataan dibidang pengembangan ekonomi Indonesia yang tidak stabil. Sehingga untuk menunjang laju pembangunan secara berkesinambungan maka pembangunan pariwisata pun perlu digalakkan disetiap daerah agar mampu dirasakan oleh masyarakat setempat.

Pariwisata merupakan salah satu subsektor yang sangat berpotensi dalam menyumbang devisa negara serta sebagai roda pertumbuhan ekonomi karena telah menghasilkan eksklusi sosial dan tiga krisis besar, berupa: kekerasan, kemiskinan, dan kehancuran lingkungan. *The United Nations World Tourism Organization (UNWTO)* dalam Basuki Antariska (2016: 36) mengemukakan bahwa pembangunan dibidang kepariwisatawaan telah mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian dunia antara lain: jumlah wisatawan internasional adalah 1,035 Miliar kali, nilai ekspor mencapai US 1,3 triliun dan pencipta 1 - 11 lapangan pekerjaan.

Secara signifikan, pembangunan pariwisata pun tidak dapat terpisahkan dari arahan pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan harus didasarkan pada potensi yang ada pada masing - masing daerah serta adanya pola kerja sama yang baik dan sistematis dari berbagai pihak. Pembangunan pariwisata diatur dalam Peraturan Pemerintah (PERMEN) Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 pasal 51-52 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 – 2025 bahwasanya untuk mencapai pembangunan pariwisata, kekuatan yang harus terapkan adalah terciptanya bentuk skema kerja sama antara

pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pilar *Governance* dalam paradigma administrasi publik yang ditambahkan oleh Santoso (2009) bahwa dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah, seharusnya mempunyai hubungan yang sinergitas antara para aktor baik dari pihak pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*).

Menurut Adrian Devine et al. Kolaborasi saat ini menuntut *governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dijadikan bagian penting dari sektor publik karena dengan kolaborasi masing–masing aktor dan atau *stakeholder* dapat duduk bersama dalam satu forum, membangun kesepahaman dan komitmen serta merasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) dalam kelangsungan pariwisata (Fairuza, 2017: 3). Kolaborasi menjadi sangat penting bagi berbagai aktor yang melakukan kerja sama secara Kolaborasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara bersama-sama dan merupakan langkah yang terbaik yang dapat ditempuh demi mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu demi terwujudnya *good collaborative governance* .

Pembangunan di sektor pariwisata sangat dibutuhkan berbagai aktor yang mampu bekerja sama secara kolaborasi, yang dimaksud aktor dalam Kolaborasi dalam pembangunan pariwisata adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dunia Usaha, dan Masyarakat Lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan Pariwisata Kabupaten Sinjai dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor

6 Tahun 2013 Pasal 5 Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kabupaten Sinjai yaitu menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

Salah satu daerah yang tempat destinasi wisatanya terkenal sehingga menjadi agenda *traveling* wisatawan yang wajib dikunjungi karena daya tarik dan panorama keindahannya yang memukau mata adalah Kabupaten Sinjai. Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah yang mempunyai pariwisata yang sangat besar dan beragam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi dan letak geografisnya yang terletak di bagian pantai timur Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai hamparan Sembilan pulau yang berderet sampai mendekati pulau Buton. Kunjungan wisatawan tidak diragukan lagi karena akses yang ditempuh terbilang dekat dari pusat kota. Salah satu tempat destinasi wisata yang sangat terkenal dengan panorama keindahannya di Kabupaten Sinjai yaitu keberadaan hutan Mangrove Tongke-Tongke yang merupakan hutan terbaik dan hutan lindung yang perlu dijaga kelestariannya yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Keberadaan hutan Mangrove Tongke-Tongke telah menjadikan tempat pariwisata yang berkelas dunia ditandai dengan penganugerahan kalpataru yang diterima oleh pengelola dalam hal ini LSM KPSDA-ACI sebagai apresiasi pemerintah pusat oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Tahun 1993 sebagai hutan mangrove dengan inisiatif masyarakat, kemudian pada tahun 2017 masuk menjadi 25 besar dari 150 kabupaten/kota dalam ajang nominasi nasional pembangunan hutan Mangrove

terbaik yang berbasis masyarakat.

Kolaborasi informal terlihat dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke merupakan yang dilakukan dari berbagai aktor seperti Dinas Komunikasi Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Sinjai, LSM KPSDA-ACI (Kelompok Pelestarian Sumber Daya Alam – Aku Cinta Indonesia), Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Desa, serta Masyarakat Lokal Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai, yang disahkan pada tahun 2015 yang tidak didasari dengan adanya surat kerjasama secara tertulis.

Kolaborasi dalam penanganan pembangunan wajib dilakukan karena lembaga pemerintah tidak mampu melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya tersebut tanpa ada uluran tangan dari berbagai aktor hal ini sesuai dengan pendapat Emerson dkk (2012: 2) bahwa perlunya memberdayakan berbagai pelaku dari dimensi publik swasta dan atau masyarakat untuk menyelesaikan masalah pembangunan. Oleh karena itu diperlukan sinergitas dalam membangun pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke yang dilakukan oleh para aktor tentu memberi dampak besar terhadap pembangunan secara berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya tentunya terdapat permasalahan terutama dalam mempertahankan kerjasama serta diperlukan kesiapan yang matang bagi para aktor yang berkolaborasi.

Salah satu permasalahan yang muncul dari pembangunan adalah keterbatasan atau kurangnya kapasitas dan kemampuan kelompok pengelola dalam hal ini LSM KPSDA-ACI dalam mengembangkan pariwisata sehingga

pendekatan partisipasi sinergitas melalui kolaborasi *governance* dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dalam rangka pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke terhambat. Gerak aktif masyarakat awam yang kerap kali menyalahgunakan fungsi mangrove yang telah dibangun oleh KPSDA-ACI dan hal ini tersampaikan kepihak pemerintah sehingga pemerintah daerah sebagai institusi penyedia jasa, pemerintah juga bertujuan memenuhi permintaan, kebutuhan, atau aspirasi dari masyarakatnya sehingga pemerintah turut serta dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke dan mulai mengeluarkan pernyataan bahwa kawasan Mangrove Tongke-Tongke merupakan hutan lindung dan Peraturan Daerah No.8 Tahun 1999 tentang pemberian sanksi apabila dilakukan penebangan hutan di Kawasan pantai dengan jarak 50 meter dari titik pasang tertinggi kearah laut tanpa izin dari pemerintah. Kondisi inilah yang mendorong kolaborasi antar aktor pemerintah, swasta dan masyarakat. Sehingga keterbatasan tersebut bukan menjadi alasan untuk menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sinjai.

Dalam perkembangannya kolaborasi pembangunan pariwisata cukup berhasil. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 cukup signifikan. Adapun penjabaran secara detail mengenai kunjungan pariwisata Kabupaten Sinjai yaitu dapat dilihat pada uraian tabel dibawah ini.

Tabel 1 : Kunjungan Wisatawan Kabupaten Sinjai

Tahun	Wisatawan Domestik
2017	265
2016	197
2015	138
2014	71
2013	39
2012	39
2011	35

Sumber : Disparbud (2018)

Tabel di atas menunjukkan bahwa peningkatan pariwisata secara signifikan tidak dapat menjadi tolak ukur dari keberhasilan pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke akan tetapi pembangunan harus ada keterkaitannya dengan keterlibatan banyak pihak bukan secara *independent* demi tercapainya *good collaborative governance* dan tidak mengedepankan hirarki, tetapi tetap pada membangun hubungan yang sinergitas yang berbasis pada jejaring dan masing-masing melaksanakan kegiatan berdasarkan pada tugas dan fungsi yang diembannya dalam penyelesaian masalah publik tertentu, sesuai dengan pembagian kerja yang disepakati bersama (Dwiyanto, 2012: 303)

Pembangunan dan pengembangan pariwisata hutan Mangrove Tongke–Tongke akan tetap dilakukan sebagaimana mestinya sehingga dapat mencapai dan meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar area obyek wisata, disamping itu juga dapat memberikan pelayanan maksimal guna memenuhi kebutuhan wisatawan seperti tersedianya sarana dan prasarana, terciptanya

keamanan dan kenyamanan sebagai penunjang keselamatan wisatawan yang berkunjung di hutan Tongke-Tongke.

Oleh karena itu dalam hal ini untuk melihat pencapaian keberhasilan sebuah kolaborasi mampu dilihat dari proses kolaborasinya sehingga dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke diperlukan suatu tolak ukur dalam proses pencapaiannya, sehingga hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Ansel and Gash (2007) bahwa untuk mencapai keberhasilan kolaborasi ada beberapa komponen yang digunakan diantaranya terdapat *face to face to dialogue* (dialog tatap muka), *trust building* (membangun kepercayaan), *commitmn to process* (komitmen pada proses), *shared understanding* (pemahaman bersama), dan *intermediate outcomes* (dampak sementara) untuk menghasilkan *feedbacks* demi keberhasilan pembangunan Pariwisata hutan Magrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai dalam rangka menjamin penyelenggaraan layanan publik yang efektif, akuntabel, transparansi, dan responsif sesuai dengan tujuan dan sasaran bersama sehingga dapat mencapai pembangunan yang mengedepankan *good collaborative governance* melalui proses kolaborasi.

Berdasarkan dari hasil pemaparan latar belakang di atas maka dalam hal ini peneliti berinisiatif menganalisis proses kolaborasi aktor yang terjadi dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke. Sehingga tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dkemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah proses *face to face to dialogue* kolaborasi aktor dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimanakah *trust building* kolaborasi aktor dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke?
3. Bagaimanakah proses *commitmn to process* kolaborasi aktor dalam Pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai?
4. Bagaimanakah proses *shared understanding* kolaborasi aktor dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai?
5. Bagaimanakah proses *intermediate outcomes* kolaborasi aktor dalam Pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui proses *face to face to dialogue* kolaborasi aktor dalam Pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai?

2. Untuk mengetahui proses *trust building* kolaborasi aktor dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke?
3. Untuk mengetahui proses *commitmn to process* kolaborasi aktor dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai?
4. Untuk mengetahui proses *shared understanding* kolaborasi aktor dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai?
5. Untuk mengetahui proses *intermediate outcomes* kolaborasi aktor dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas maka yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan informasi mengenai proses kolaborasi antar para aktor, gambaran terkait desain kelembagaan Kolaborasi serta kepemimpinan kolaborasi dalam hal pembangunan pariwisata hutan Magrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai
 - b. Penelitian ini nantinya dapat menambah khasanah pengetahuan bagi seluruh kalangan dalam hal pembangunan pariwisata yang berdasar dari kolaborasi para aktor untuk menjadikan pembangunan yang berorientasi pada masa yang akan datang.

- c. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemahaman teori, konsep, maupun praktek, serta sebagai media referensi dalam melakukan penelitian mengenai Kolaborasi dalam pengelolaan objek wisata.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan referensi evaluasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai, untuk meningkatkan pembangunan, nilai, dan kualitas pembangunan pariwisata berkelanjutan.
- b. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Sinjai mengenai pentingnya melibatkan aktor yakni antara pemerintah dengan elemen non pemerintah serta masyarakat dalam proses Kolaborasi dalam rangka mengembangkan pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kolaborasi

Pada esensinya istilah kolaborasi diartikan sebagai pola kerja sama dengan pihak swasta serta masyarakat yang saling membantu secara sukarela, saling menguntungkan, untuk memudahkan dalam pencapaian-pencapaian tujuan yang telah mereka sepakati bersama.

Kolaborasi adalah kerjasama yang dilakukan dengan dasar kesepakatan antara dua pihak atau lebih (kolektif) khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran dalam hal pencapaian tujuan. Hal ini sesuai dengan definisi kolaborasi sebagai jaringan atau distribusi informasi, sumberdaya, aktivitas dan kapabilitas organisasi dalam dua atau lebih sektor untuk bekerjasama mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai jika bekerja sendiri-sendiri. (Udiani, 2016)

Sabaruddin (2015) mengemukakan bahwa kolaborasi adalah kerjasama antar aktor, antar organisasi, atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara *independent*. Sedangkan dalam pandangan Denhart and Denhart dalam bukunya Sabruddin (2015) bahwa kolaborasi melalui partisipasi publik yang luas dalam pembuatan kebijakan maka memacu warga negara dapat membantu meningkatkan jaminan atau kepastian bahwa suara dan kepentingan individu ataupun kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat didengarkan dan kemudian direspon pemerintah secara adil. Pada esensinya menjalin kolaborasi harus

selalu terbuka, memastikan bahwa apa yang disuarakan dan didengarkan mampu dipahami dan diterima tanpa ada diskriminasi sehingga dengan itu semua aktor mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

Kolaborasi dikenal sebagai kerjasama dengan para aktor baik secara kelompok ataupun secara individu sebagai bentuk komitmen kerja, kepercayaan, kesamaan visi dan misi serta tujuan untuk diwujudkan secara bersama-sama yang kemungkinan akan sulit untuk dicapai ketika masing-masing aktor bekerja secara individu atau personalisme. Cummings & Bromiley dalam Sabaruddin (2015) melihat bahwa kepercayaan sangat penting dalam membangun hubungan dan mempertahankan kolaborasi yang dapat dikembangkan antara aktor yang berkolaborasi melalui komunikasi, timbal balik, keselarasan tujuan, transparansi berbagai informasi dan pengetahuan yang jelas dan dengan menunjukkan kompetensi, niat baik dan tindak lanjut.

Menurut Dwiyanto (2015), mengatakan bahwa kerjasama kolaboratif masing - masing aktor diikat oleh adanya satu kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu, yang dirasakan oleh para pihak sangat mengganggu kepentingannya. Kemauan untuk melakukan kerjasama secara berkolaborasi muncul karena adanya keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh suatu organisasi publik dengan dengan mitranya dari organisasi di sektor privat. Masalah atau kepentingan bersama menjadi sumber peluang dan ancaman

bagi berkembangnya kolaborasi antara organisasi publik dan organisasi mitranya di sektor privat.

Hal ini senada yang dijelaskan oleh Aan Marie Thomson dalam bukunya Pramusinto dan Purwanto (2009: 115), kolaborasi dijelaskan bahwa sebuah konsep yang mirip dengan kerjasama tetapi memiliki makna yang lebih dalam, yakni merupakan proses kolektif dalam pembentukan sebuah kesatuan yang didasari oleh hubungan saling menguntungkan (*mutualisme*) dan adanya kesamaan tujuan dari organisasi-organisasi atau individu-individu yang memiliki sifat otonom, saling berinteraksi melalui negoisasi baik secara formal maupun informal.

Pengertian kolaborasi dapat pula dibedakan kedalam dua pengertian yaitu kolaborasi dalam arti proses dan kolaborasi dalam arti normatif. Kolaborasi dalam arti sebuah proses merupakan serangkaian proses atau cara mengatur/mengelola secara institusional, artinya sejumlah institusi pemerintah maupun non pemerintah ikut melibatkan dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingan dan tujuannya biasanya terdiri dari institusi pemerintah saja, lembaga kemasyarakatan saja, atau swasta saja. Sedangkan kolaborasi dalam pengertian normatif merupakan aspirasi atau tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan para aktor atau mirtanya. (Wijaya, 2015).

Kolaborasi terjadi ketika agen *public* dan agen *private* melakukan fungsi-fungsi aktif, Bevir (Nasrul Haq, 2018). Kutipan dari tulisan Nasrul haq (20018: 2) dikemukakan bahwa terdapat empat nilai dasar yang menjadi

karakteristik dan muatan pokok dalam *collaborative governance* sebagai bentuk *new public governance* yaitu diantaranya yaitu *consensus*, kepemimpinan kolektif, komunikasi multi arah, dan berbagai sumber daya.

Dari beberapa pengertian kolaborasi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kolaborasi merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa aktor baik dari pihak sektor publik maupun dari pihak sektor privat serta masyarakat yang turut melibatkan diri dalam kerjasama yang sifatnya kolaboratif, pada dasarnya kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta dengan masyarakat masih mencirikan kemitraan sehingga dari pengertian kolaborasi yang dikemukakan masih bersifat umum karena para ahli mengemukakan dengan menggunakan pandangan yang berbeda - beda. Akan tetapi dari pengertian kolaborasi diatas bahwa telah ditegaskan adanya kerjasama yang bersifat dinamis dan saling ketergantungan (*interdependent*).

Berbagai penjelasan kolaborasi di atas maka dalam penelitian ini menggunakan konsep kolaborasi sebagai bentuk kerja sama yang jauh lebih terarah, memiliki tingkat komitmen yang lebih tinggi, meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi, memiliki kesatuan tujuan yang jelas, struktur yang memungkinkan komunikasi, seluruh aktor yang bekerja sama membangun consensus dan adanya tindakan kolektif dalam tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kerjasama lainnya, dengan berkolaborasi tentunya lebih mampu meminimalisir permasalahan yang akan terjadi dalam pembangunan hutan mangrove. Oleh karena itu perlunya tindakan kolaborasi segera oleh semua pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Hal ini

sejalan dengan pendapat Innes dan Booher dalam Maharani (2016: 10) mengemukakan bahwa kolaborasi dipandang sebagai langkah terbaik dalam menangani suatu permasalahan dengan dasar bentuk kerjasama dengan adanya perjanjian tertulis yang resmi yang digunakan untuk jangka waktu tertentu, memenuhi syarat-syarat kolaborasi yang meliputi pemahaman terhadap batasan kewenangan, pemahaman bersama dimanifestasikan pada kesepakatan pada pendefinisian tentang pengetahuan secara relevan yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Kolaborasi pun telah cukup sering digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sulit dan beberapa diantara aktor terkunci dalam konflik.

B. Komponen Kolaborasi

Dalam melakukan sebuah kolaborasi terdapat komponen-komponen atau proses yang dapat dijadikan sebagai kunci keberhasilan kolaborasi sehingga mampu saling melengkapi antar satu sama lain. Kolaborasi dapat dinyatakan berhasil ketika seluruh komponen kolaborasi dapat terpenuhi. Berikut ini adalah tiga pendapat dari para ahli yang dikutip dari tulisan Fairuza (2017) terkait penjelasan komponen atau proses kolaborasi antara lain:

1. Agranoff dan McGuire dikutip dari tulisan Fairuza (2017) memandang bahwa kolaborasi sebagai aktivitas-aktivitas yang bersifat horizontal dan vertikal. Kemudian, aktivitas tersebut dianalisis melalui komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Komunikasi, Komunikasi yang intensif sangatlah penting dalam kolaborasi. Kolaborasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun

secara tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung dapat melalui perantara teknologi.

- b. Nilai tambah, Nilai yang dimaksud disini adalah nilai publik, yakni yang dihasilkan dari efisiensi, demokrasi dalam institusi/organisasi, dan proses kolaborasi.
 - c. Deliberasi, Deliberasi merupakan kelebihan dari kolaborasi yang membentuk pembelajaran saling menguntungkan (*mutual learning*), pembangunan komunitas (*building communities*), dan pemanfaatan proses interaktif (*employing interactive*).
2. Thomson dan Perry dalam tulisannya Fairuza (2017) berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) kunci dimensi kolaborasi , yaitu sebagai berikut:
- a. Dimensi Tata Pemerintahan (*The Process of Collaborative Governing: The Governance Dimension*)

Dimensi pemerintahan berkaitan dengan pengambilan keputusan bersama (*joint decision making*), pengaturan pembagian daya, dan pemecahan masalah.
 - b. Dimensi Administrasi (*The Process of Collaborative: The Administration Dimension*)

Dimensi administrasi dalam kolaborasi sangat penting dalam keberlangsungan hubungan pihak-pihak yang berkolaborasi.
 - c. Dimensi Otonomi (*The Process of Reconciling Individual and Collective Interest: The Autonomy Dimension*)

Dimensi otonomi memiliki hubungan yang kontras antara kontrol bersama dan kontrol individu (Wood dan Grey)

- d. Dimensi Mutualitas (*The Process of Forging Mutually Beneficial Relationship: The Mutuality Dimension*) yaitu dalam penyelenggaraan publik organisasi harus mengalami saling ketergantungan baik dalam kesamaan kepentingan maupun perbedaan kepentingan, dalam kolaborasi, adanya saling ketergantungan merupakan kunci yang penting agar hubungan antar aktor terus terjalin dengan baik.
- e. Proses Membangun Norma Sosial: Kepercayaan dan Dimensi Timbal Balik (*The Process of Building Social Capital Norms: The Trust and Reciprocity Dimension*)

Dalam kolaborasi, aktor individu akan menunjukkan kesediaan untuk berinteraksi dalam kolaborasi jika aktor yang lain juga menunjukkan kesediaan yang sama. Hubungan timbal balik tersebut akan membentuk kepercayaan antar pihak-pihak yang berkolaborasi jika dilakukan secara berulang-ulang.

Adapun uraian pendapat menurut DeSeve (Wijaya, 2015) menyebutkan bahwa terdapat delapan item penting yang biasa dijadikan untuk mengukur keberhasilan sebuah kolaborasi dalam *governance*, yang meliputi:

- a. *Type network structure* (struktur jaringan)
- b. *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan).
- c. *Trust among the participants* (adanya saling percaya terhadap pelaku/peserta)

d. *Governance*

e. *Acces to authority* (akses terhadap kekuasaan)

Argumen lain yang dikemukakan oleh Huxham dan Siv Vangen (Sabaruddin, 2015: 33) ada enam hal dalam proses kolaborasi antara lain:

- a. *Managing aims; aims, goals, atau objective* (tujuan) merupakan alasan utama suatu kolaborasi terjadi.
- b. *Compromise*, kompromi dibutuhkan untuk mengatasi perbedaan cara kerja, kultur dan gaya kerja individu, norma dan nilai organisasi.
- c. *Communication*: bahasa merupakan isu utama komunikasi dalam yang harus disesuaikan dengan konteks, profesi, etnik, dan bahasa resmi.
- d. *Democracy and equality*: dalam kolaborasi ada tiga aspek yang harus diperhatikan, pertama siapa yang harus dilibatkan dalam kolaborasi, proses kolaborasi yaitu kesejajaran dan penghargaan atas setiap orang. Ketiga, akuntabilitas dan keterwakilan dalam bentuk pertanggungjawaban terhadap organisasi dan konsituen.
- e. *Power and trust*: secara psikologis digunakan untuk mengatasi perasaan “rendah diri” komunitas lokal dan sekaligus melawan perasaan “tinggi hati” lembaga pemerintah dan institusi global.
- f. *Determination, commitmen and stamina*; dalam kolaborasi sering terjadi *collaborative interia*, yaitu suatu situasi kolaborasi yang tak seimbang (satu pihak berpengalaman, pihak yang lainnya tidak berpengalaman) sehingga tujuan kolaborasi menjadi sulit dicapai.

Adapun yang menentukan proses keberhasilan kolaborasi terdapat beberapa komponen sebagai alat analisis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Ansell dan Gash (2007) dalam tulisannya yang berjudul '*Collaborative Governance In Theory and Practice*', proses kolaborasi terdapat komponen-komponen yang membentuk siklus dan mempengaruhi satu sama lain yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Face to face dialogue* (Dialog tatap muka)

Face to face dialogue (Dialog tatap muka) sebagai bentuk komunikasi menjadi hal yang penting dalam kolaborasi, karena adanya proses pembentukan konsesus. Komunikasi langsung (*face to face*) merupakan upaya untuk mengurangi stereotipe (yaitu persepsi aktor yang memandang adanya sisi buruk aktor lain) dan meningkatkan rasa hormat antar aktor. Salah satu aspek keberhasilan kolaborasi yaitu terciptanya komunikasi timbal balik atau dua arah oleh para kolaborator dan hubungan yang sinergitas

b. *Trust building* (Membangun kepercayaan)

(*Trust building*) Membangun kepercayaan merupakan syarat yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang solid. Membangun kepercayaan memerlukan waktu yang tidak singkat, hal ini karena dalam kolaborasi diperlukan komunikasi yang intensif (terus-menerus) dan penyesuaian terhadap kondisi saat ini dari munculnya kembali konflik masa lalu (*prehistory antagonism*).

c. *Commitment to process* (Komitmen pada proses)

Commitment to process (Komitmen pada Proses) merupakan komponen yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi asli para aktor dalam kolaborasi, serta membangun sinergitas dengan cara konsensus. Kolaborasi akan terbangun dengan kuat dan permanen jika ada komitmen satu sama lain terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dibuat bersama sehingga dapat mempermudah terwujudnya penyelenggaraan pemerintah dan layanan publik yang baik. Sanctyeka dalam Handayani (2016). Sedangkan O’leary and Vij dalam Sabaruddin (2015: 81) yang mengatakan bahwa komitmen dan motivasi, individu dan organisasi merupakan salah satu alasan terjadinya proses kolaborasi yang dilatarbelakangi dengan berbagai macam alasan termasuk pengaruh sumber daya dan pengetahuan, ekonomi, serta sosial demi untuk mengatasi kegagalan lintas sektor dan untuk membangun hubungan kolaboratif. Sedangkan Harmawan (2016) mengemukakan bahwa tingkatan komitmen terhadap kolaborasi adalah variabel utama dalam menjelaskan sukses atau tidaknya sebuah kolaborasi, selain itu komitmen bergantung pada pengakuan bersama serta pencapaian yang diperoleh selama melakukan kolaborasi.

d. *Shared understanding* (Pemahaman bersama)

Shared understanding (Pemahaman bersama) merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Pemahaman bersama dapat

diartikan sebagai *common mission* (misi umum), *common purpose* (tujuan umum), *common objectives* (obyektivitas umum), dan *shared vision* (visi bersama). Pemahaman bersama juga dimanifestasikan pada kesepakatan yang relevan untuk mengatasi masalah (Ansel dan Gash dalam Handayani, 2016).

e. *Intermediate outcomes* (Dampak sementara)

Intermediate outcomes (Dampak sementara) terjadi selama proses kolaborasi, oleh karena itu ada kata “sementara” di dalamnya. Dampak sementara menghasilkan *feedbacks*. Umpan balik yang diharapkan adalah umpan balik yang positif, yang disebut “*small-wins*” (kemenangan kecil)

C. Hambatan dalam Kolaborasi

Kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa aktor yang terlibat dalam mencapai tujuan yang disepakati tentunya tidaklah mudah akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan. Terdapat beberapa factor yang dapat menyebabkan gagalnya suatu kolaborasi (*Government of Canada* dalam Wijaya, 2015) diantaranya adalah :

- a. Terkait faktor budaya adalah bahwa kolaborasi bias gagal karena adanya kecenderungan budaya ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil terobosan dan resiko serta disebabkan karena kooptasi dan strategi pecah belah dengan cara mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok yang pro kebijakan pemerintah dan mengabaikan kelompok yang anti kebijakan pemerintah

- b. Terkait dengan faktor institusi, Kolaborasi gagal karena adanya kecenderungan institusi-institusi yang terlibat dalam kolaborasi (terutama dari pihak pemerintah) cenderung menerapkan system hirarkis terhadap institusi-institusi lain yang terlibat dalam kolaborasi tersebut.
- c. Terkait dengan faktor politik, kolaborasi gagal dikarenakan kurangnya inovasi para pemimpin dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif.

Agrumen lain yang dikemukakan Gray (Wahyudiantik, 2013) mengenai kendala/hambatan dalam kolaborasi adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen yang bertentangan dengan kolaborasi
- b. Sejarah permusuhan yang dilandasi perbedaan ideology dalam waktu lama, budaya kelembagaan dan politik no legitimasi
- c. Kondisi kebijakan tidak memperhatikan alokasi sumber daya
- d. Kerumitan bersifat teknis

D. Konsep Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove

1. Pembangunan Pariwisata

Winarso dalam Rahmawati (2018) yang menyatakan bahwa pembangunan harus dilakukan secara bersama-sama untuk menumbuhkan sinergi (*synchronized ergies*) sehingga mampu meminimalisir sengketa ataupun konflik yang timbul akibat kesalahpahaman yang memungkinkan terjadi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Menurut Iain T. Christie and D. Elizabeth Crompton dalam Kurniawan, dkk. (2015: 48) Pariwisata bisa menjadi alat pengembangan

yang potensial, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekonomi, membantu mengurangi kemiskinan dan juga menciptakan hubungan timbal balik dengan produksi lainnya dan sektor penyedia jasa”. Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki berbagai potensi wisata yang dapat digali serta dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana hiburan, eduwisata untuk keluarga dan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar lokasi wisata

Namun pada prinsipnya pariwisata memiliki arah percepatan fundamena yang lebih luas bagi suatu negara. Nirwandar, dikutip dari (kemenpar.go.id, 2012) Pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk :

- a. Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Pariwisata mampu memberikan perasaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempay tinggalnya sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.
- b. Penghapusan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*), Pembangunan pariwisata seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja.
- c. Pembangunan Berkesinambungan (*Sustainable Development*), Sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan

budaya dan keramahtamahan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini.

- d. Pelestarian Budaya (Culture Preservation), Pembangunan kepariwisataan seharusnya mampu kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah.
- e. Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia, Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern.

Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan dampak terhadap masyarakat tanpa adanya pengecualian antar pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian yang tidak dapat terlepas dari pembangunan suatu daerah serta mampu terintegrasi dalam wujud peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat oleh karena itu untuk pencapaian tujuan pembanguan nasional yang lebih strategis

2. Hutan Magrove

Menurut Undang-Undang No. 19/2004 yang mengatur tentang kehutanan, hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan

Menurut Setyawan, Mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh diantara garis pasang surut, sehingga Mangrove merupakan salah satu ekosistem langka karena luasnya hanya 2% permukaan bumi. Ekosistem Mangrove memiliki peranan ekologi, sosial – ekonomi, serta sosial budaya yang sangat penting, seperti mampu menjaga stabilitas pantai dari terjadinya abrasi, sumber ikan, dan keanekaragaman hayati lainnya namun bukan hanya itu ekosistem Mangrove dapat dijadikan sebagai fungsi konservasi, Pendidikan, ekoturism, dan identitas budaya. Majid, dkk (2016).

Nilai penting Mangrove lainnya adalah dalam bentuk fungsi ekologis sebagai stabilisator tepian sungai dan pesisir seperti pengendalian erosi pantai menjaga stabilitas sedimen dan bahkan turut berperan dalam menambah perluasan lahan daratan (*land building*) dan perlindungan garis pantai (*protected agent*).

Walters dikutip Raman (2015) menyatakan argumentasinya bahwa hutan Mangrove di sepanjang pesisir pantai dan sungai secara umum menyediakan habitat bagi berbagai jenis ikan. Pandangan yang sama dikemukakan oleh Kordi (2012), bahwa Hutan Mangrove sebagai salah satu lahan basah di daerah tropis yang merupakan tipe hutan yang khas terdapat disepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Konversi hutan Mangrove terus meningkat untuk dijadikan lahan pertanian atau tambak ikan/udang, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas ekosistem tersebut.

Oleh karena itu keberadaan Mangrove di daerah pesisir lebih memberi dampak positif daripada dampak negative dikarenakan daerah transisi antara darat dan laut menjadikan mangrove sebagai penyangga (*buffer*) penting. Adapun fungsi dari keberadaan mangrove sangat kompleks antara lain Sebagai peredam gelombang laut dan badai, Pelindung pantai dari abrasi dan erosi yang disebabkan oleh gelombang pasang, Penahan lumpur dan penjerat sedimen, sebagai tempat destinasi wisata

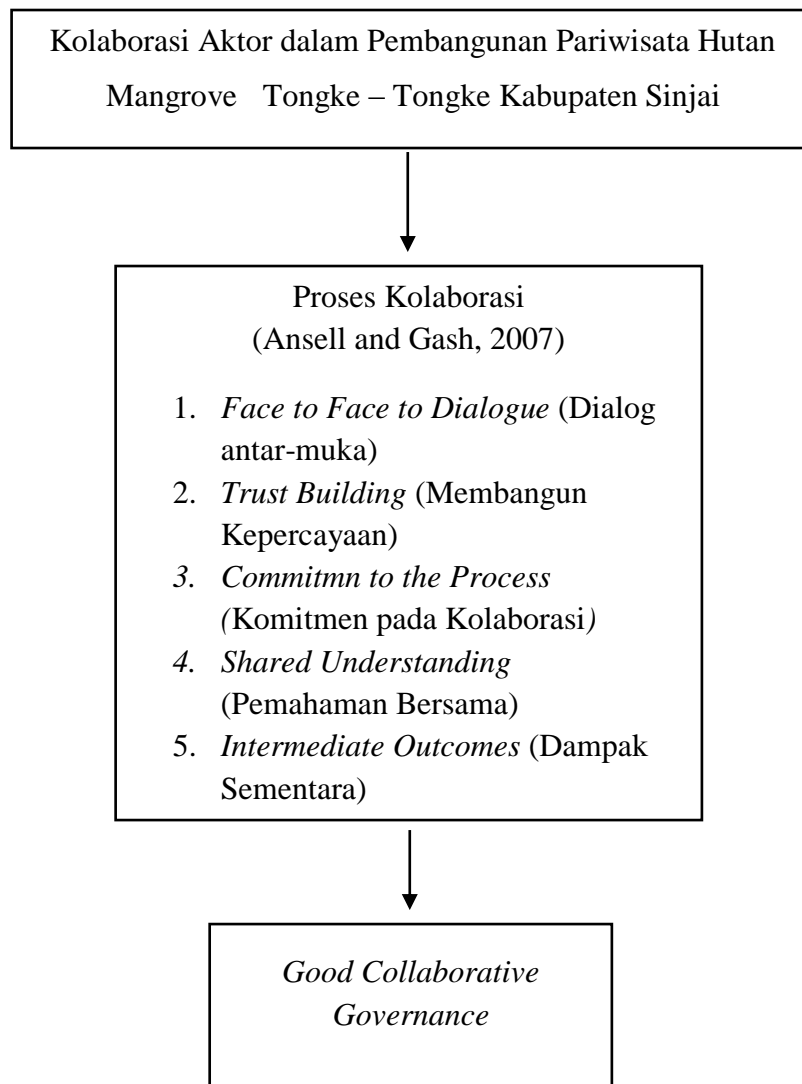
E. Kerangka Pikir

Menurut Adrian Devine (Fairuza, 2017), kolaborasi menjadi bagian penting dari sektor publik karena dengan kolaborasi masing – masing aktor dan atau stakeholder dapat duduk dalam satu forum, membangun kesepahaman, dan komitmen serta merasa tanggungjawab (*sense of responsibility*) dalam kelangsungan pariwisata. Sehingga tolak ukur dari keberhasilan pembangunan terkhusus pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke - Tongke Kabupaten Sinjai dapat dilakukan secara kolaborasi yaitu dengan menelaah dan mendeskripsikan proses sebagai acuan berkolaborasi.

Kekuatan terbesar dalam membangun kolaborasi antar aktor maka perlu adanya proses atau tahapan yang dapat ditempuh sehingga sehingga tidak menimbulkan ketimpangan – ketimpangan serta antisipasi konflik yang terjadi ketika melakukan kolaborasi dan terwujudnya *good collaborative governance* sebagai hasil dari kolaborasi.

Atas dasar landasan teori dan beberapa definisi yang telah paparkan dari tulisan ini maka muncul desain penelitian yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian yang akan dilaksanakan dengan gambaran sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam terkait proses kolaborasi dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke - Tongke Kabupaten Sinjai yaitu dengan membangun hubungan yang sinergitas dan memberi ruang secara penuh

berbagai aktor yang terlibat dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke - Tongke Kabupaten Sinjai.

Kolaborasi yang dilakukan adalah bentuk dari kerjasama secara terpadu untuk membangun *relationship* (hubungan yang berkeseinambungan) demi tercapainya *good collaborative governance*.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Proses Kolaborasi Aktor (Ansell dan Gash, 2007).

a. *Face to face dialogue* (Dialog tatap muka)

Face to face dialogue (Dialog tatap muka) sangat dibutuhkan dalam melakukan kolaborasi sehingga perencanaan awal untuk mencapai suatu tujuan dapat berjalan secara maksimal. Adapun sub focus dari dialog antar muka yang menjadi alat ukur dalam proses kolaborasi diantaranya:

1) Komunikasi

Aspek komunikasi yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini terkait dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke - Tongke Kabupaten Sinjai adalah cara penyampaian informasi dengan *content* (isi) yang harus jelas dan mendapat respon secara timbal balik oleh para aktor. Dalam hal ini dapat diukur dari setiap pertemuan yang diadakan, Pemerintah menyampaikan secara terbuka kepada pihak swasta dan masyarakat mengenai kebutuhan dalam pembangunan serta komunikasi secara terbuka mengenai mekanisme pelaksanaan dalam pembangunan

pariwisata hutan Mangrove Tongke - Tongke Kabupaten sinjai sebagai wujud partisipasi pihak swasta dan masyarakat.

2) Musyawarah

Dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke - Tongke maka yang menjadi titik fokus penelitiannya adalah membangun hubungan yang intensif antar para aktor yang berkolaborasi sepererti membuka diskusi informal, dan melakukan rapat secara formal serta terstruktur untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan pariwisata dengan melibatkan para aktor secara penuh tanpa adanya diskriminasi dan mengedepankan sikap ego secara individu sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dalam melakukan kolaborasi

3) Keterbukaan

Keterbukaan yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini adalah memahami dan mengidentifikasi cara berbicara secara luwes dan bebas dalam menanggapi berbagai isu dan kendala yang dialami yang dilakukan secara berkala dan mendapat respon yang sifatnya timbal balik oleh aktor baik dari aktor pemerintah, swasta dan masyarakat yang ada kaitannya dengan pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke - Tongke Kabupaten Sinjai. Sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berdampak negatif terhadap pembangunan.

b. *Trust building* (Membangun kepercayaan)

Trust building atau Membangun kepercayaan merupakan syarat yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang solid. Adapun alat ukur yang digunakan dalam hal membangun kepercayaan (*trust building*) dalam proses kolaborasi diantaranya yaitu :

1) Empati

Dasar dari sikap empati dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke - Tongke Kabupaten Sinjai merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami secara realitas perilaku aktor (pemerintah, swasta, dan masyarakat) seperti kepekaan antar aktor, tidak mengedepankan emosi, serta melakukan evaluasi diri untuk mencapai suksesnya pembangunan. Sehingga mampu menyelesaikan suatu permasalahan secara objektivitas.

2) Loyalitas

Loyalitas yang dimaksud dalam fokus penelitian ini adalah memberikan atau menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan konsekuensi yang telah di sepakati oleh para aktor untuk melakukan kolaborasi dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke - Tongke Kabupaten Sinjai.

3) Kredibilitas

Kredibilitas yang dimaksudkan adalah sikap mempengaruhi seseorang. Dalam kaitannya dengan kolaborasi yang dilakukan

aktor yaitu dapat difokuskan pada seperti apa sumbangsi atau partisipasi yang diberikan oleh para aktor yang berkolaborasi dalam pembangunan hutan Mangrove Tongke - Tongke Kabupaten Sinjai.

4) Kedekatan Sosial

Kedekatan yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini adalah terdapat hubungan emosional terhadap para aktor yang melakukan kolaborasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan orientasi para aktor yang terlibat kolaborasi dalam pembangunan hutan Mangrove Tongke - Tongke Kabupaten Sinjai.

c. *Commitment to process* (Komitmen pada proses) Komitmen merupakan komponen yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi asli para aktor dalam kolaborasi. Adapun sub fokus penelitian dari komitmen yaitu:

1) Pengakuan bersama

Pengakuan bersama yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini adalah terjadinya kesepakatan antar para aktor yang berkolaborasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dokumen kesepakatan antar pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat terkait peran dan tanggung jawab yang dilakukan dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove tongke –tongke Kabupaten Sinjai

2) Apresiasi

Apresiasi adalah pemberian penghargaan terhadap suatu karya nyata yang mengakibatkan seseorang menjadi termotivasi dan komitmen dalam bekerja. Dalam hal ini diukur dari sejauh mana keberhasilan pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke - Tongke Kabupaten Sinjai sehingga pihak swasta dan masyarakat yang melakukan kolaborasi mendapatkan apresiasi.

3) Monitoring

Monitoring yang dimaksudkan adalah mengevaluasi sejauh mana perkembangan pembangunan hal ini dapat ditentukan dari pencapaian hasil sesuai dengan standar yang telah disepakati dan konsistensi yang dilakukan selama proses pembangunan. Pariwisata hutan Mangrove Tongke - Tongke Kabupaten Sinjai.

d. *Shared understanding* (Pemahaman bersama)

Shared understanding atau pemahaman bersama merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Adapun sub indikator dari pemahaman bersama yaitu:

1) Kesamaan Visi dan Misi

Kesamaan visi dan misi adalah pendukung suksesnya pembangunan. Dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan oleh para aktor harus didasari dengan kesamaan visi dan misi agar pembangunan dapat dicapai sesuai dengan kesepakatan bersama

para aktor. Hal ini dapat diukur sebelum dan setelah pembangunan selesai.

2) Kesamaan tujuan

Kesamaan tujuan dalam kolaborasi yang dilakukan oleh para aktor yakni dari masyarakat, pemerintah, dan swasta harus mempunyai kesamaan tujuan untuk mencapai kolaborasi dalam pembangunan hutan Mangrove Tongke - Tongke Kabupaten Sinjai. Hal ini dapat diukur dari sebelum dan setelah pembangunan selesai.

3) *Common Objectives* (obyektivitas umum)

Kolaborasi yang dilakukan harus bersifat objektif tanpa adanya pandang bulu terhadap sesama aktor dalam melakukan berkolaborasi. Hal ini dapat diukur dari penyelesaian tugas dan tanggungjawab yang dilimpahkan kepada masyarakat karena masyarakat yang lebih dalam terkait pengelolaan pariwisata hutan Mangrove Tongke - Tongke Kabuapten Sinjai.

e. *Intermediate Outcomes* (dampak sementara)

Intermediate Outcomes (dampak sementara) yang maksudkan adalah terdapat dalam rangkaian tahapan atau proses yang ditimbulkan dari kolaborasi yang dilakukan sehingga menghasilkan hubungan yang timbal balik secara positif yang disebut "*small-wins*" (kemenangan kecil).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sinjai. Urgensi dari pemilihan lokasi tersebut karena berdasarkan prinsip *collaborative governance* yakni adanya keterlibatan antar aktor dari instansi pemerintah dan instansi non pemerintah yang melakukan kerjasama secara kolaborasi terkait dalam hal pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke – Tongke di Kabupaten Sinjai. Adapun dari instansi pemerintah yang dimaksud yaitu OTD (organisasi perangkat daerah) diantaranya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD), Dinas Perikanan (DISKAN), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), dan Pemerintah Desa. Sedangkan dari instansi non pemerintah yaitu LSM KPSDA-ACI (Kelompok Pelestarian Sumber Daya Alam – Aku Cinta Indonesia) serta masyarakat setempat.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan dengan menekankan pada pendeskripsian makna dari generalisasi dan menggambarkan tentang proses kolaborasi dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara gejala-gejala dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah studi kasus untuk mengetahui proses kolaborasi para aktor dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. Hal ini memberikan gambaran secara terperinci dan jelas serta mengungkapkan makna konsep ataupun fenomenologi yang terjadi.

C. Sumber Data

Berikut adalah data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni mencakup dua sumberdata yaitu data primer dan data sekunder yang secara jelas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara secara mendalam tanpa adanya perantara dan dokumentasi berupa gambar dari lokasi penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari web resmi, catatan-catatan penting, laporan-laporan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, buku-buku terbaru, artikel terbaru, dan perundang - undangan, yang yang digunakan sebagai data penunjang dan data pelengkap yang dimaksudkan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan hasil peneltian yang diperoleh di lapangan.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yang dimaksud dalam peneliitian ini adalah aktor yang terlibat langsung di lapangan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi mengenai proses kolaborasi pembangunan pariwisata hutan

mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu Adapun informan yang dapat membantu memberikan data dan informasi yang tepat dan akurat sesuai permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jabatan	Jumlah Informan
1.	LSM KPSDA – ACI (Kelompok Pelestarian Sumber Daya Alam – Aku Cinta Indonesia) a. Sainuddin (SN), b. H. Tayieb (TY)	a. Ketua LSM KPSDA-ACI b. Penggagas dan ketua terdahulu LSM KPSD-ACI	2
2.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Sinjai a. Mappanggara, ST (MR) b. Arqam (AP) c. Ina Mazriyana, S,S, T.Par (IM)	a. Kepala Seksi Industri Pariwisata b. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif c. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata	3
3.	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Kabupaten Sinjai.	a. Kepala Bidang Kehutanan b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2
4.	Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai a. Ir. Sultan Tare (SR) b. Irwan Syamsuddin, Ss.Pi, M.Si (RW)	a. Kepala Dinas b. Seksi Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap	2
5.	Masyarakat Desa Tongke – Tongke a. Asrina (AS) b. Syamsiah (SY)	Tokoh masyarakat	2
6.	Pemerintaha Desa Sirajuddin (SJ)	Kepala Desa	1
Jumlah			12

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti terlebih dahulu melihat kondisi lapangan baik dalam lingkungan area lokasi penelitian maupun lingkungan narasumber yang akan diwawancarai secara lebih lanjut dan sistematis dengan melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang benar-benar terjadi di lokasi penelitian yaitu pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai secara akurat dan relevan dengan hasil wawancara dengan responden.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan secara langsung atau tatap muka secara lugas, santai dan sopan oleh berbagai narasumber atau informan secara sistematis dengan mengacu pada pedoman wawancara yang dibuat peneliti sebelum berhadapan langsung kepada narasumber atau informan. Adapun berbagai informan tersebut meliputi: Kepala Dinas Perikanan, Kepala Seksi Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap, Ketua LSM KPSDA-ACI, Tokoh Penggerak Masyarakat, Kepala Seksi Industri Pariwisata, Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif, Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata, Staf/Kepala

Bidang Dinas Kehutanan, Kepala Desa Tongke – Tongke, dan masyarakat Desa Tongke –Tongke.

3. Dokumentasi

Adapun teknik dokumentasi yang peneliti lakukan di lapangan dalam pengumpulan data yaitu menggunakan perekam suara melalui handphone dan melakukan pengambilan gambar tempat penelitian serta informan yang diwawancarai.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sebagai aktivitas yang digunakan dalam mengolah data, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu dilakukan dengan meringkas, memilih hal-hal pokok dan utama, dan lebih berfokus pada hal-hal yang urgen untuk teliti, sehingga menghasilkan gambaran dan uraian yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam memperoleh data selanjutnya serta merekap hasil wawancara kemudian melakukan pengamatan terkait hasil pengumpulan dokumen yang berkesinambungan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data, yang dimaksudkan untuk menyusun secara sistematis sekumpulan informasi yang diperoleh yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan, secara singkat dan logis serta menjadi makna yang mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu meverifikasi data yang diperoleh secara berulang-ulang selama proses penelitian dilakukan yang dimulai pada tahap memasuki lapangan, cara memperoleh, menganalisis data serta

dapat menjawab rumusan masalah yang diuraikan sebelum memasuki lapangan serta menelaah dan melakukan diskusi mengenai data-data yang diperoleh di lapangan dan teori-teori yang terdapat pada tinjauan pustaka yang telah disusun.

G. Pengabsahan Data

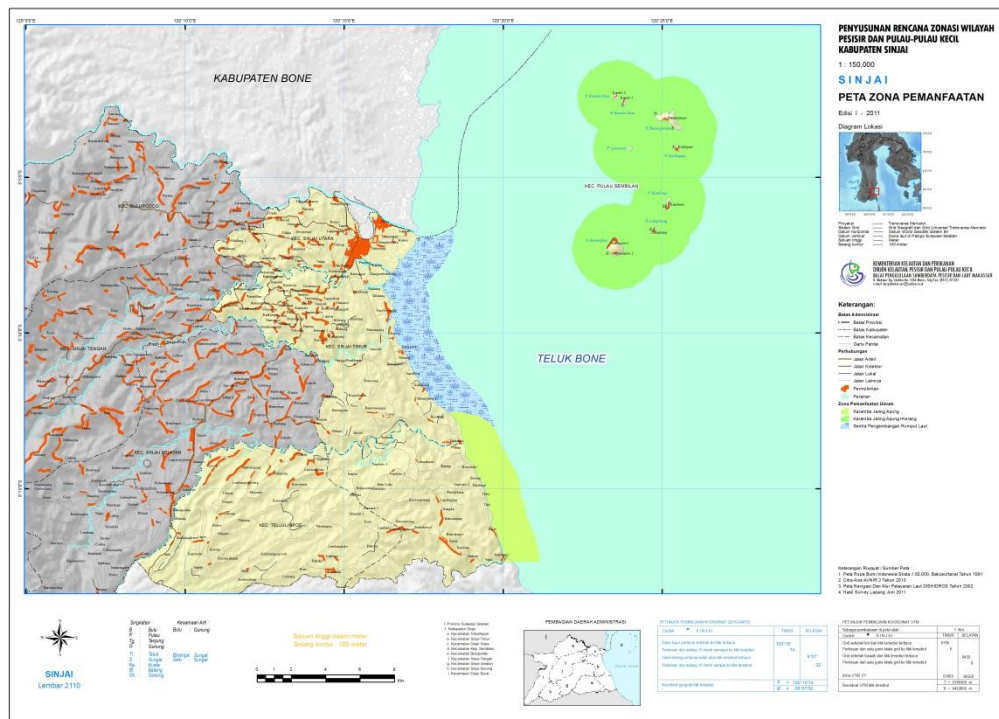
Pengabsahan data diartikan sebagai proses pemeriksaan dari hasil yang diperoleh dari berbagai sumber, cara, dan waktu yang ditempuh, pengabsahan data dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber, yaitu melakukan pengecekan kembali pada sumber yang lain tentang kebenaran data yang telah diperoleh.
2. Triangulasi Teknik, dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai macam teknik tertentu untuk menguji keakuratan dan tidak keakuratan data.
3. Triangulasi Waktu, pengambilan data dilakukan dengan waktu yang berbeda-beda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian



Gambar 1. Wilayah Zonasi Sinjai

Kabupaten Sinjai adalah salah satu dari 23 Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pantai Timur Bagian Selatan jazirah Sulawesi Selatan yang berjarak lebih kurang 223 Km dari Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). pada posisi $5^{\circ} 2' 56''$ - $5^{\circ} 21' 16''$ Lintang Selatan (LS) dan $119^{\circ} 56' 30''$ - $120^{\circ} 25' 33''$ Bujur Timur (BT). Kecamatan Sinjai Timur merupakan salah satu kecamatan yang terkenal dengan pesona wisata hutan mangrove-nya hal ini karena daerah ini berada pada kategori lokasi dataran pesisir dan pegunungan yang mempunyai jarak tempuh 4 km dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten. (Sumber Data, Dokumen

Kantor Desa Tongke-Tongke, Profil Kecamatan Sinjai Timur, 16 Agustus 2018)

Potret sebuah kolaborasi dapat dilihat dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai, yakni melibatkan beberapa aktor penting yaitu aktor pemerintah maupun non pemerintah (swasta). Dalam konteks ini peneliti mengkaji tentang kolaborasi aktor dalam pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. Adapun deskripsi instansi/aktor yang terlibat dalam Kolaborasi adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perikanan

a. Visi Dinas Perikanan

Adapun Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 yaitu : Pengelolaan Sumber daya Kelautan Dan Perikanan Secara Berkelanjutan Menuju Sinjai Sejahtera

Adapun visi sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan proses pengelolaan potensi sumberdaya alam kelautan dan perikanan yang terus menerus untuk lebih meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan;
- 2) Berkelanjutan bahwa kegiatan ekonomi disektor kelautan dan perikanan dapat berlangsung terus menerus sebagai basis ekonomi masyarakat sinjai dan dapat menyesuaikan dengan tuntutan kondisi ke depan dengan tetap memperhatikan azas kelestarian lingkungan;

3) Sinjai Sejahtera merupakan tekad dan komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam menyelenggarakan pembangunan dan membawa masyarakat sinjai ke arah peningkatan kesejahteraan, menyikapi berbagai perubahan lingkungan internal dan eksternal serta dinamika masyarakat yang semakin berkembang, sehingga sinjai sejajar dengan daerah maju lainnya di Indonesia.

b. Misi Kabupaten Sinjai

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan rumus misi sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- 2) Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- 3) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan
- 4) Mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan yang terampil, profesional dan pelayanan publik yang berkualitas.

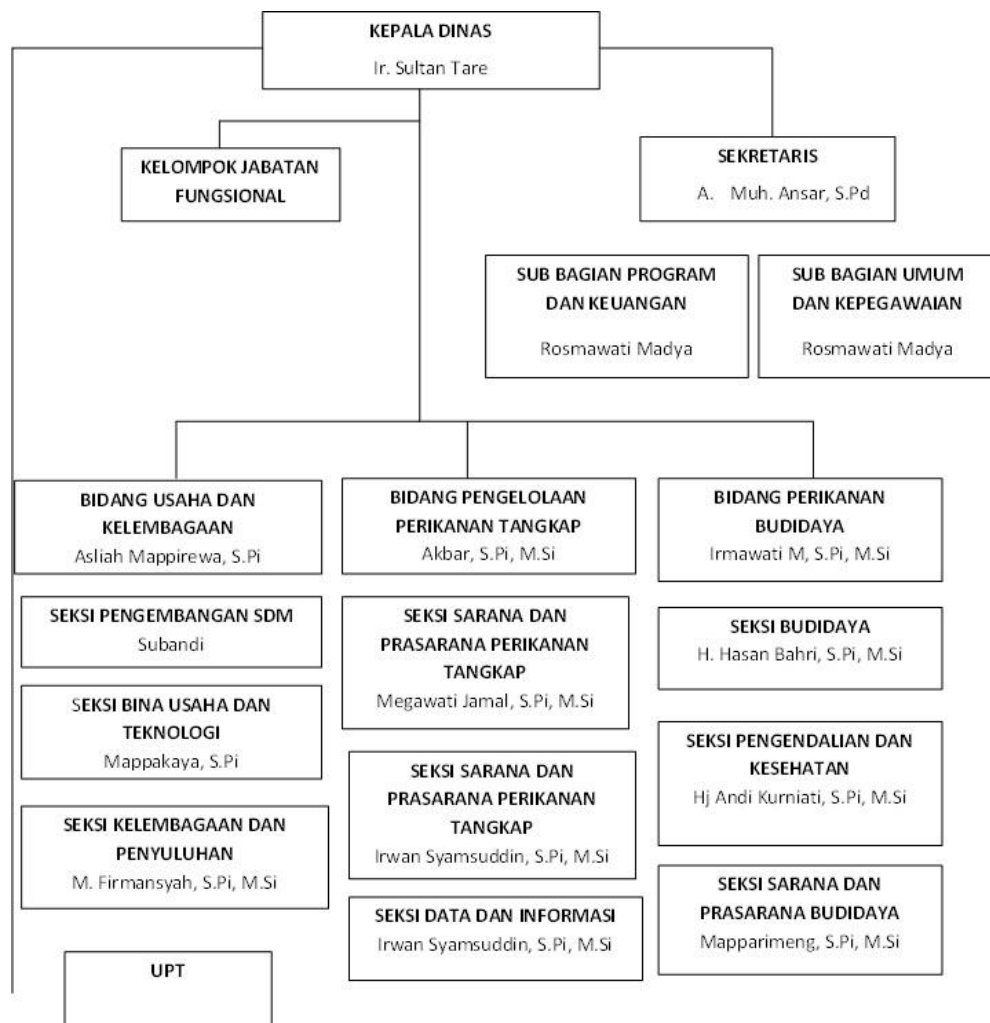
c. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perikanan sebagai organisasi perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan khususnya di Kabupaten Sinjai yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Sinjai dalam menjalankan tugasnya memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pelayanan kegiatan pada bidang kelautan dan perikanan.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2010. Adapun personil untuk Struktur Organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris membawahi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan.
- 3) Bidang Perikanan Budidaya membawahi : Seksi Budidaya, Seksi Pengendalian dan Kesehatan Lingkungan, Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya
- 4) Bidang Usaha dan Kelembagaan membawahi : Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Seksi Bina Usaha dan Teknologi, Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan
- 5) Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap membawahi : Seksi Data dan Informasi, Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, Seksi Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

e. Peran DISKAN dalam pembangunan hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai

Keterlibatan Dinas Perikanan dalam pembangunan hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Perikanan sebagai fasilitator (mengalokasikan dana melalui mekanisme yang ditetapkan) dalam pembangunan Pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai

- 2) Dinas Perikanan membuat rencana pembangunan sebelum dilakukan pembangunan
- 3) Melakukan penanaman dan rehabilitasi mangrove
- 4) Pengelolaan wilayah pesisir
- 5) Melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait pemeliharaan hutan Mangrove Tongke-Tongke
- 6) Pembinaan yang dilakukan membantu masyarakat sekitar didalam bidang perekonomian dan dengan adanya Pelatihan Peengkaderan Peduli Hutan Mangrove memiliki manfaat sendiri membantu masyarakat dapat mengetahui pentingnya hutan mangrove serta upayaupaya pencengahan kerusakan hutan mangrove.
- 7) Pelaksanaan pembinaan dalam pemanfaatan lahan di lingkungan atau kawasan hutan Mangrove Tongke - Tongke

2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

a. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dapat dirumuskan sebagai berikut “Terwujudnya Pariwisata Sinjai Yang Berdaya Saing Serta Pelestarian Kebudayaan Menuju Masyarakat Sejahtera”. Visi ini mengandung pengertian bahwa :

- 1) Pengembangan kepariwisataan yang berdayasaing maksudnya adalah Kabupaten Sinjai terdiri dari hamparan pegunungan tinggi hingga lautan yang membentang yang memiliki potensi wisata yang sangat beragam yang tidak kalah dengan

daerah-daerah lain, namun potensi wisata tersebut masih butuh untuk diperkenalkan keluar dan Disparbud bertekad untuk menjadikan Sinjai sebagai salah satu tujuan wisata utama di Sulawesi Selatan maupun Indonesia.

- 2) Pelestarian kebudayaan maksudnya adalah Kabupaten Sinjai merupakan daerah yang sarat akan sejarah dan budaya, namun dengan adanya perkembangan zaman, sejarah dan budaya tersebut mulai ditinggalkan, Sehingga Disparbud bertekad menjadi pelopor dalam pengembangan pariwisata dan pelestarian kebudayaan daerah yang dimiliki.
- 3) Masyarakat Sinjai bersatu dan sejahtera maksudnya adalah wujud dari pelaksanaan misi Kabupaten Sinjai dan didukung oleh misi dari tiap instansi pemerintah daerah yang bertekad mewujudkan masyarakat Sinjai yang sejahtera unggul dalam kualitas hidup.

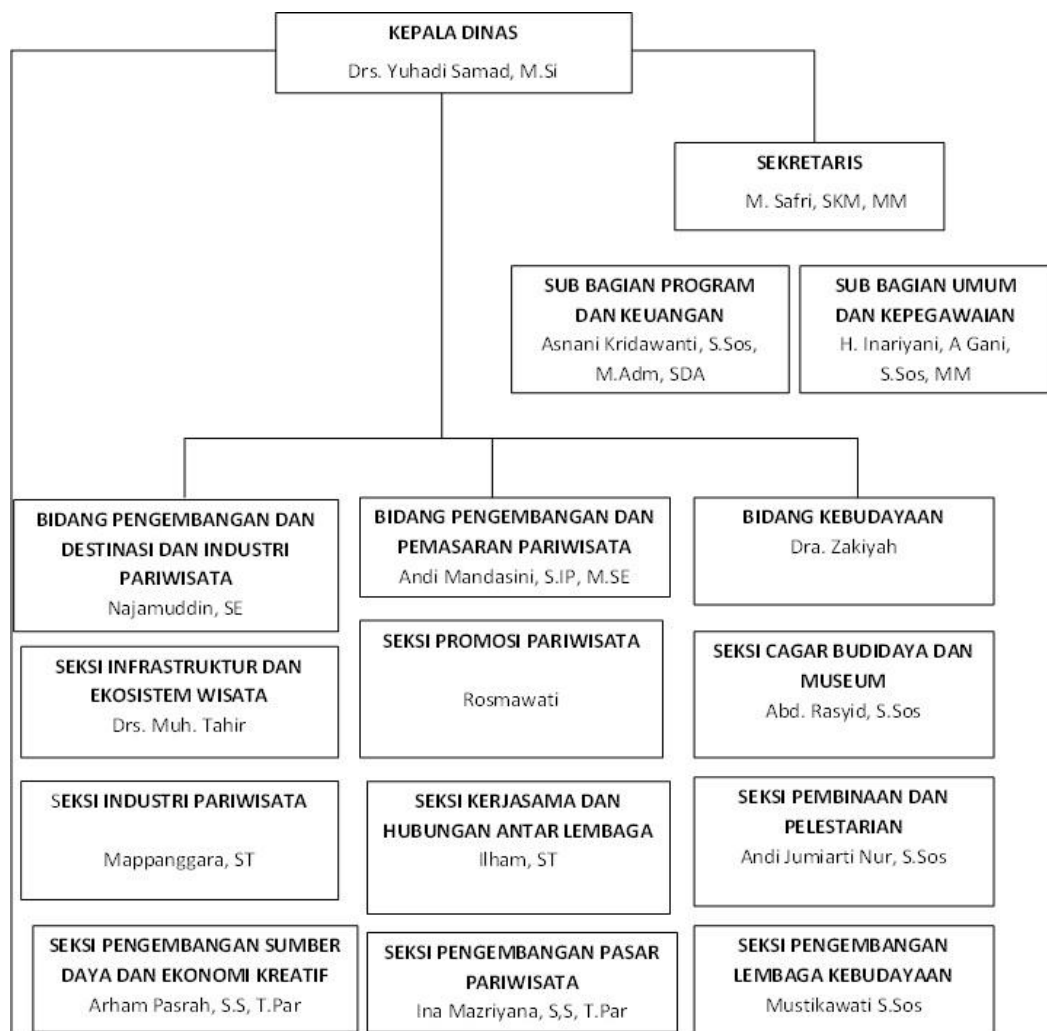
b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap organisasi harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 merujuk pada

pencapaian Misi Kabupaten Sinjai yaitu “Terwujudnya Sinjai Bersatu Yang Sejahtera, Unggul Dalam Kualitas Hidup, Terdepan Dalam Pelayanan Publik”.

c. Struktur Organisasi

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD (orgaisasi perangkat daerah)) yang berada dalam lingkup Pemerintahan, adapun struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sebagai berikut :



Gambar 3. Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian,
Sub. Bagian Program Keuangan
3. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata,
 - a) Seksi Pengembangan Destinasi Infrastruktur dan Ekosistem Wisata,
 - b) Seksi Industri Pariwisata,
 - c) Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif
4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - a) Seksi Promosi Pariwisata,
 - b) Seksi kerjasama dan Hubungan antarLembaga,
 - c) Seksi pengembangan Pasar Pariwisata
5. Bidang Kebudayaan
 - a) Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sejarah dan Tradisi,
 - b) Seksi Cagar Budaya dan Museum.

**d. Peran DISPARBUD dalam pembangunan hutan Mangrove
Tongke Tongke Kabupaten Sinjai**

1. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat
2. Pemberdayaan ekonomi kreatif kepada masyarakat
3. Mengadakan sosialisasi, promosi kepada masyarakat luas

4. Mengadakan publikasi baik melalui media sosial, media komunikasi, dan maupun media audiovisual untuk pengembangan hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai
5. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kawsana destinasi

3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai

a. Visi dan Misi

Terwujudnya lingkungan yang bersih dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Adapun misi meliputi:

1. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan semua pihak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Meningkatkan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pengawasan serta penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam.
3. Meningkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, serta meningkatkan konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati.
4. Mengoptimalkan potensi pemanfaatan dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
5. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam kepada masyarakat.
6. Meningkatkan kapasitas organisasi, kelembagaan dan SDM aparatur.

b. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai

1. Melakukan pemeliharaan hutan Mangrove Tongke-Tongke
2. Melakukan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) kawasan hutan Mangrove Tongke-Tongke
3. Melaksanakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
4. Menjaga kelestarian hutan Mangrove Tongke-Tongke
5. Sosialisasi dan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk

4. Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai

a. Visi dan Misi

Visi desa Tongke-Tongke merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang dapat diwujudkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Pertimbangan kondisi eksternal bahwa Desa Tongke-Tongke merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sinjai Timur mempunyai titik sektor perikanan dan pertanian sehingga Desa Tongke-Tongke merupakan daerah penghasil Ikan Laut dan 60 pertanian, olehnya itu maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa TongkeTongke adalah “Mewujudkan Desa Tongke-Tongke Menjadi Desa Sejahterah Melalui sektor pertanian, Perikanan, pengolahan dan pemasaran

hasil” Nilai-nilai yang melandasi yaitu ; Sebagian besar masyarakat petani dan nelayan mampu mengembangkan sektor pertanian dan sektor perikanan meski dalam skala kecil seperti pertanian tanaman pangan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang cukup memadai.

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi Desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Tongke-Tongke, sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Desa Tongke-Tongke adalah :

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabilitas, Partisipatif dan Responsif.
- 2) Membangun sarana dan prasarana berbasis pada ekonomi perikanan dan pertanian yang produktif.
- 3) Meningkatkan dan memberdayakan peran wanita dan pemuda serta taraf hidup masyarakat.
- 4) Membangun pola hidup sehat melalui pemberdayaan PKK dan Kader Kesehatan Desa.
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas keagamaan, kebudayaan demi mewujudkan masyarakat yang religius, bermartabat dan berbudaya.

- 6) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan demi terwujudnya masyarakat yang cerdas, sehat dan damai.
- 7) Mendorong peran serta setiap kelompok masyarakat demi terciptanya kegotong royongan dalam mewujudkan Desa membangun.

5. Lembaga Swadaya Masyarakat KPSDA – ACI

KPSDA-ACI merupakan perpanjangan kata dari Kelompok Pelestarian Sumber Daya Alam Aku Cinta Indonesia. KPSDA-ACI dibentuk pada Tahun 1985 dan kemudian disahkan pada tahun 1987. KPSDA-ACI merupakan kelompok swadaya masyarakat yang didirikan oleh warga setempat dalam rangka untuk menangani penanaman dan pelestarian hutan bakau di sepanjang pesisir Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur. Adapun anggota dari KPSDA-ACI tidak lain adalah warga yang melakukan penanaman mangrove yang berjumlah 117 orang.

a. Tugas dan fungsi KPSDA-ACI

- 1) Aktif dalam memberikan arahan bimbingan kepada masyarakat
- 2) Memberikan motivasi kepada warga terkait pentingnya melestarikan hutan mangrove.
- 3) Melakukan penanaman dan pemeliharaan mangrove

Adapun peran KPSDA-ACI dalam pelestarian Mangrove dapat dibuktikan dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

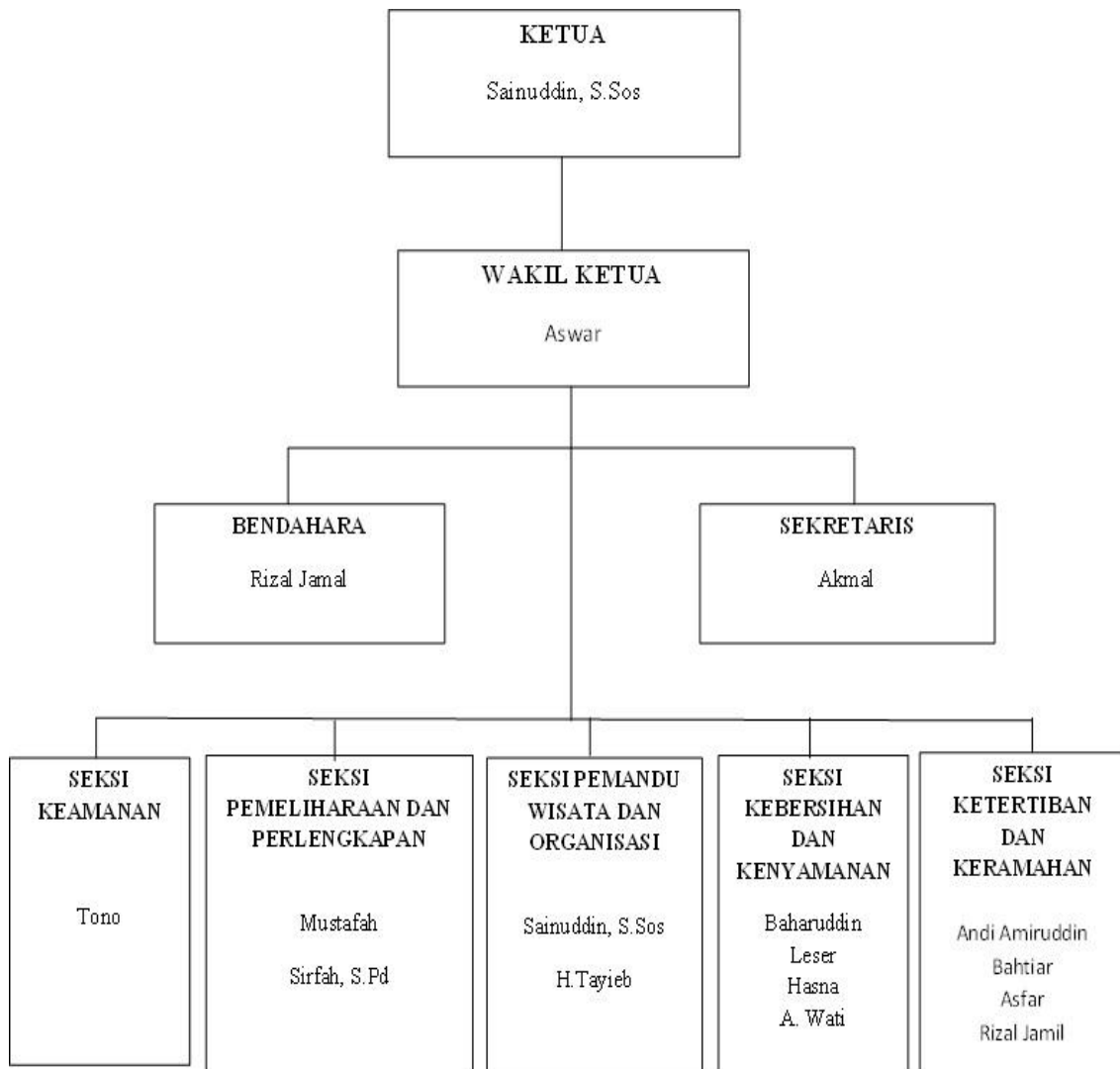
Tabel 3. Kegiatan KPSDA-ACI

No	Waktu	Jenis Kegiatan
1	10 Mei 1998	Rapat penetapan aturan terkait menanam mangrove bersama anggota KPSDA-ACI seperti: b. Penjarangan 1 x 1 meter c. Melakukan penjarangan yaitu 50 meter dari bibir pantai
2	4 Januari 2000	Rapat anggota KPSDA-ACI yaitu membuat kesepakatan untuk: b. Menjaga tanaman mangrove c. Tidak mengganggu mangrove yang sudah ditanam oleh orang lain d. Tidak diperbolehkan menanam mangrove di jalur perahu
3	1 November 2000	Sosialisasi dengan masyarakat terkait perda No 15 Thn 1998 tentang pengujian kapal perikanan
4	14 Juni 2002	Melakukan penangkapan kelelawar dengan tujuan Mengurangi polusi kelelawar
5	5 Mei 2003	Membentuk sebuah koperasi yaitu koperasi tani nelayan (Koptanel)
6	4 Januari 2005	Melakukan penanaman Mangrove
7	5 Februari 2009	Melakukan kembali Penanaman Mangrove
8	2009 - sekarang	Melakukan pemeliharaan terhadap mangrove

Tabel di atas merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan KPSDA-ACI sejak tahun 1998-sekarang, selain itu kegiatan yang dilakukan KPSDA-ACI mengadakan sosialisasi dengan masyarakat dan

juga mengajak langsung masyarakat Tongke-Tongke untuk ikut serta dalam melakukan penanaman dan perawatan mangrove.

b. Struktur Organisasi LSM KPSDA ACI



Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi LSM KPSDA-ACI

Tabel. 4 Peran aktor dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai

Aktor		Peran
Pemerintah	Dinas Perikanan	Penggerak pemberdayaan masyarakat, fasilitator, dan pelaksana kebijakan
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penggerak pemberdayaan masyarakat, fasilitator, dan pelaksana kebijakan
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penggerak pemberdayaan masyarakat, fasilitator, dan pelaksana kebijakan
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penggerak pemberdayaan masyarakat, fasilitator, dan pelaksana kebijakan
	Pemerintah Desa	Penggerak pemberdayaan masyarakat, fasilitator, dan pelaksana kebijakan
Swasta	LSM KPSDA-ACI	Pengelola atau penggerak
Masyarakat		Masyarakat yang terdampak dalam pembangunan (partisipatoris)

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai 2018, diolah

Tabel 4. di atas menunjukkan bahwa aktor yang terlibat dalam kolaborasi hutan Mangrove Tongke-Tongke memiliki peran dengan karakteristik yang sesuai dengan tingkat kapasitas dan kemampuan para aktor dalam melakukan proses kolaborasi. Untuk mengetahui proses kolaborasi aktor dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke

-Tongke, peneliti menggunakan konsep kolaborasi yaitu terdapat beberapa komponen dari proses kolaborasi yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007) sebagai penunjang keberhasilan kolaborasi aktor dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke demi tercapainya *good collaboration governance*.

Adapun indikator-indikatornya yaitu: *face to face dialogue* dialog tatap muka), *trust building* (membangun kepercayaan), *commitmn to the process* (komitmen pada proses kolaborasi), *shared understanding* (pemahaman bersama), dan *Intermediate outcomes* (dampak sementara), dari indikator tersebut, kolaborasi aktor dalam pembangunan hutan Mangrove Tongke-Tongke mampu berjalan sesuai dengan semestinya.

B. Hasil Penelitian Kolaborasi Aktor Dalam Pembangunan Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai

Kolaborasi diletakkan sebagai aspek fundamental dalam hal pembangunan karena pembangunan tidak dapat berjalan sukses tanpa adanya campur tangan oleh aktor lain seperti aktor pemerintah, non pemerintah atau swasta. Kolaborasi dapat diartikan sebagai suatu usaha penuh dengan kepercayaan yang didasarkan atas tidak adanya kecurigaan dan kedewasaan pengertian atas peranan-peranan dan penugasan-penugasan.

Kolaborasi terus berkembang dalam pemerintahan karena adanya kompleksitas dan saling ketergantungan antar aktor, seperti dalam pembangunan sangat sulit untuk dilakukan oleh satu aktor saja melainkan memerlukan kolaborasi dari aktor lain agar permasalahan dengan segala

kompleksitasnya dapat teratasi dengan baik. Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa, LSM KPSDA-ACI, dan masyarakat setempat yang terlibat dalam kolaborasi harus menyadari peran masing-masing demi tercapainya tujuan kolaborasi, Kolaborasi tersebut diinisiasi atas keterbatasan kapasitas, sumber daya, maupun jaringan yang dimiliki masing-masing aktor sehingga dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang berhasil pencapaian tujuan bersama.

Pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh banyak aktor prangkat daerah atau OPD (orgaisasi perangkat daerah) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk itu diperlukan kolaborasi antar aktor dalam pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.

Adapun hasil penelitian mengenai proses kolaborasi aktor dalam pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai yang dideskripsikan sebagai berikut:

1. *Face to face to dialogue* (dialog tatap muka)

Kolaborasi didasarkan pada dialog tatap muka sebagai bentuk komunikasi menjadi hal yang penting dalam kolaborasi atau sebagai jantung kolaborasi. Komunikasi langsung (*face to face*) merupakan upaya untuk mengurangi stereotipe (yaitu persepsi aktor yang memandang adanya sisi buruk aktor lain) dan mampu meningkatkan rasa hormat antar aktor. Salah satu aspek penting dari kesuksesan sebuah proses kolaborasi dalam pelayanan publik adalah adanya terciptanya interaksi melalui komunikasi

dan menjalin hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat kolaborasi (Ansell dan Gash, 2007).

Komunikasi dan pertukaran informasi sangat diperlukan. Kelancaran petukaran informasi merupakan bagian dari proses kolaborasi sehingga dapat mendukung keberhasilan kolaborasi. Maka dari itu komunikasi yang baik antar aktor sangatlah penting karena apabila komunikasi sudah berjalan dengan baik maka seluruh informasi yang disampaikan cepat sampai kepada semua aktor yang terlibat.

Dalam hal ini tolak ukur *face to face to dialogue* (dialog tatap muka) kolaborasi aktor dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke, dibutuhkan indikator yaitu sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi yang digunakan oleh aktor yang terlibat lebih bersifat formal seperti pertemuan atau rapat-rapat yang diadakan oleh aktor yang berkolaborasi. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan yang berinisial SR selaku kepala dinas perikanan yang dijumpai peneliti diruangannya yang sedang sibuk menandatangani dokumen-dokumen penting untuk keperluan kegiatan kantor diluar dan mengatakan bahwa :

“Kami dari dinas perikanan bergerak sebagai fasilitator dalam pembangunan mangrove itu sering mengadakan beberapa pertemuan dengan kelompok ACI, dinas kehutanan pada waktu itu, dinas pariwisata dan kebudayaan dan juga mengikutsertakan masyarakat sekitar, yang tak lain untuk membahas bagaimana wisata mangrove ini bisa terwujud seperti apa yang kita inginkan. Rapat yang dilakukan pertama kali yaitu rapat dengan Kementerian Perikanan dan Pulau-Pulau Kecil tentang rancangan pembangunan

kawasan hutan mangrove, kemudian diadakan sosialisasi kepada setiap masyarakat kita juga ada mekanisme yang namanya monev yaitu monitoring dan evaluasi, jadi pertama-tama kita itu diundang untuk datang ke dinas, kemarin itu diadakan setiap 6 bulan sekali, namun kelemahannya dalam pertemuan biasanya tidak semua aktor yang terlibat datang karena kami yakin keperluan dan kebutuhan orang berbeda-beda, makanya pasti kami akan carikan jalan keluarnya” (*Hasil wawancara oleh SR pada hari senin tanggal 6 agustus 2018 jam 11.35 wita*)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kepala dinas perikanan Kab. Sinjai dijelaskan bahwa kolaborasi aktor dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke secara *face to face to dialogue* (dialog tatap muka) dalam hal kolaborasi bersifat aktif menyampaikan informasi dan transparan terhadap apa yang telah dilakukan dan menimbulkan komunikasi dua arah (timbang balik) antara aktor dan Dinas perikanan dengan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait yang dilaksanakan dalam bentuk forum formal. Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai yang berkedudukan sebagai fasilitator setiap forum terkait masalah pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke maka Dinas Perikanan akan mengundang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk menangani masalah pengembangan destinasi, sumber Daya, dan pengembangan pemasaran (promosi) pariwisata sehingga pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke terus eksis, Dinas Perikanan juga mengundang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait tata kelola penempatan pohon bakau, forum tersebut juga turut hadir LSM KPSDA-ACI guna untuk menangani pengelolaan lingkungan hutan mangrove Tongke-Tongke.

Hal senada juga diungkapkan oleh SN selaku ketua KPSDA-ACI yang berhasil ditemui peneliti sedang asyik menikmati secangkir kopi hangat dan mengatakan bahwa saya :

“Saya sebagai ketua Kelompok ACI tentunya sangat berhubungan baik antar semua instansi yang terlibat dalam pembangunan hutan bakau atau mangrove, tak terkecuali dengan masyarakat sekitar kawasan destinasi, karena mengapa, pembangunan itu kalau hanya dibebankan oleh satu kelompok saja tidak akan maju, tentunya kami sering mengadakan rapat dan itu biasanya diadakan di rumah, rapat ini dihadiri oleh dinas perikanan, dinas pariwisata dan kebudayaan, dinas perkebunan dan kehutanan, dan masyarakat”
(hasil wawancara oleh SN pada hari selasa tanggal 7 agustus 2018 pukul 10.50 wita)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan ketua LSM KPSDA-ACI menjelaskan bahwa kolaborasi yang dilakukan dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke dari segi dialog Tatap muka sangat dominan dan telah terealisasi dengan efektif meskipun tidak adanya MoU atau perjanjian yang mengatur sebelumnya. Hal ini relevan dengan pernyataan Ansel dan Gash (2007) bahwa kolaborasi didasarkan pada dialog antar muka oleh para aktor atau pemangku kepentingan sebagai proses yang berorientasi consensus oleh para aktor untuk mengidentifikasi peluang untuk keuntungan bersama. Dalam melakukan Komunikasi antara aktor dari Dinas Perikanan dengan aktor yang lain dilakukan secara dua arah atau komunikasi secara timbal balik antar OPD (orgaisasi perangkat daerah) tersebut.

Komunikasi sangat penting bagi setiap instansi atau organisasi, sebab tanpa komunikasi maka saluran informasi yang dibutuhkan bagi

suatu instansi atau organisasi tidak dapat tersampaikan atau masuk dengan baik bagi instansi atau organisasi (Tambunan dalam Handayani (2016), Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Industri Pariwisata yang berinisial MR yaitu:

“jelas, kita komunikasi secara tatap muka antar pemangku kepentingan yang lain demi tercapainya sebuah pembangunan contohnya kita adakan rapat atau musyawarah, olehnya itu kami dari dinas pariwisata dan kebudayaan sendiri sangat menjaga sinergitas dalam menjalin komunikasi terhadap pemangku kepentingan seperti dinas perikanan, Dinas perkebunan dan kehutanan, KPSDA-ACI, masyarakat setempat dan juga dengan pemerintah Desa karena secara administratif hutan bakau atau hutan mangrove berada dalam wilayah Desa Tongke -Tongke. *(Hasil wawancara oleh MR pada hari kamis tanggal 16 agustus 2018 pukul 09.42 wita)*

Penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa semua aktor telah menjalin komunikasi secara aktif terhadap semua aktor dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke baik secara formal maupun secara non formal. Hal ini menunjukkan komunikasi timbal balik antara Dinas Kebudayaan dan pariwisata, dinas perikanan, dinas kehutanan dan lingkungan hidup, LSM KPSDA-ACI, Pemerintah Desa, serta masyarakat setempat terkait masalah pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke.

Selanjutnya, pendapat yang sama ditambahkan oleh informan yang berinisial AP selaku Kepala seksi pengembangan sumber daya dan ekonomi kreatif yaitu:

“Setiap diadakan pertemuan atau musyawarah kami dari dinas pariwisata dan kebudayaan selalu ikut berpartisipasi yang penting ada pemberitahuan sebelumnya, atau misalnya ada disposisi dari pimpinan kami, dan dirapatlah kami selalu melakukan pertukaran

informasi dan membahas segala permasalahan terkait pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke” (*Hasil wawancara oleh AP pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 jam 09.20 wita*).

Pendapat informan yang berinisial AP menjelaskan bahwa partisipasinya dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove tergolong aktif dan transparan tentang informasi yang disampaikan, serta setiap permasalahan disampaikan tanpa ada tumpang tindih atau bertentangan dengan dengan tugas oleh aktor yang lain yang terlibat dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyakini bahwa tidak ada pertemuan yang tidak penting maka setiap pertemuan terkait masalah pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke selalu hadir dalam pertemuan tersebut. Pendapat informan memperkuat pernyataan setiap informan terkait komunikasi dialog anta-muka (*face to face to dialogue*) antar aktor yang terlibat dalam pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke yang berinisial SY yang mengungkapkan bahwa:

“di warung/cafe saya ini pernah dikunjungi oleh puang sanu Kelompok ACI, waktu itu ada 5 orang yang sedang bersama puang sanu, mereka datang dengan baju seragam dinas mereka itu orang yang bekerja di dinas pariwisata saya lihat logo bajunya, dan mereka berbincang di dalam café saya sambil meminum kopi, mereka juga sesekali menghimbau kepada kami semua yang berjualan di area pohon mangrove ini untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan” (*Hasil wawancara oleh SY pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 jam 10.30 wita*).

Informan di atas menjelaskan bahwa kelompok ACI dengan para aktor yang lain menjalin komunikasi dengan baik tidak hanya sewaktu rapat saja, atau bertemu secara formal saja tetapi juga bertemu secara

informal, dan tugasnya tetap mereka laksanakan dengan baik selaku aktor dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke yaitu mereka tetap menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan di kawasan destinasi hutan mangrove Tongke-Tongke. Para aktor yang terlibat kolaborasi tidak hanya menjalin komunikasi secara timbal balik tetapi menjalin hubungan yang baik terhadap sesama aktor seperti yang diungkapkan oleh informan di atas.

Selain itu, argumentasi yang berbeda telah diungkapkan informan yang berinisial SR selaku Kepala Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai terkait dengan komunikasi *Face to Face to Dialogue* (dialog tatap muka) yaitu:

“Keterlibatan kami dari pemerintah Desa bermula sejak penanaman mangrove, Kepala desa yang menjabat sebelum saya itu, menghimbau semua elemen masyarakat untuk ikut dalam penanaman mangrove tanpa adanya pengecualian, dan saya juga sebagai warga masyarakat biasa bersama keluarga pada waktu itu sekitar tahun 1990’an, kami semua mempunyai lahan yang kami tanami pohon bakau, akan tetapi setelah saya menjabat sebagai kepala desa Tongke-Tongke sampai sekarang dan mangrove saat ini sudah terkenal dan berkembang, saya selaku pemerintah desa disini merasa kecewa ndik’ terhadap Dinas Pariwisata karena diberlakukan retribusi tanpa adanya pembagian untuk pemerintah setempat, seharusnya tidak kembali ke pemerintah daerah semua, Karena kita juga terlibat dalam pembangunan mangrove ini. Bermula dari situmi ndik, saya sebagai kepala desa merasa tidak harmonis lagi menjalin komunikasi dengan beberap dinas yang terlibat dalam pembangunan pariwisata mangrove, biasa saya dihubungi untuk pertemuan tapi saya tidak hadir ” (*Hasil wawancara oleh SR pada hari kamis tanggal 06 Agustus 2018 jam 10.39 wita*).

Informan di atas selaku aktor dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke berpendapat bahwa *face to face to dialogue* (dialog

tatap muka) dalam hal ini terkait komunikasi yang dilakukan dengan berbagai aktor yang terlibat berujung kekecewaan dari satu pihak disisi lain pihak ini merasa dirugikan dan tidak lagi ingin bertanggung jawab dalam hal pembangunan Hutan Mangrove Tongke-Tongke, pemerintah Desa menyerahkan sepenuhnya kepada dinas-dinas terkait tentang pembangunan dan pengelolaan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke, pemerintah desa tidak lagi ingin ada campur tangan terhadap hutan mangrove Tongke-Tongke. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi timbal balik (dialog) antara Pemerintah Desa dengan OPD (orgaisasi perangkat daerah) lainnya.

b. Musyawarah

Musyawarah dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongkemaka yang menjadi titik fokus penelitiannya adalah membangun hubungan yang intensif antar para aktor yang berkolaborasi seperti membuka diskusi informal, dan melakukan rapat secara formal serta terstruktur untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan pariwisata dengan melibatkan para aktor secara penuh tanpa adanya diskriminasi dan mengedepankan sikap ego secara individu sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dalam melakukan kolaborasi.

Ansel dan Gash dalam Bagas (2016) Tahap awal dalam kolaborasi didasarkan bahwa semua aktor yang terlibat mampu membangun konsensus katau melakukan kegiatan yang didasarkan pada

kesepakatan atau kemufakatan secara bersama untuk mencegah kecurigaan dan mencegah eksplorasi keuntungan bersama oleh aktor yang berkolaborasi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh salah satu informan yang berinisial SN selaku ketua LSM KPSDA-ACI mengatakan bahwa :

“Setiap ada masalah-masalah yang terjadi mengenai hutan mangrove Tongke-Tongke kami sebagai penggerak dalam hal ini langsung mengadakan musyawarah dengan aktor lain seperti dinas pariwisata dan kebudayaan, dinas perikanan, dinas kehutanan dan lingkungan hidup, perangkat desa, pihak kepolisian atau keamanan serta tokoh masyarakat, kemudian kita membahas apa masalahnya dan meminta pendapat dari masing-masing pihak untuk memberikan solusinya” (*Hasil wawancara oleh SN pada hari selasa tanggal 7 agustus 2018 pukul 10.50 wita*)

Informan di atas mengemukakan bahwa dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke dilakukan musyawarah oleh semua aktor yang terlibat dan tentunya untuk memecahkan berbagai permasalahan yang menghasilkan sebuah solusi yang dapat diterima dan diimplementasikan oleh berbagai kalangan. Dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke seluruh anggarannya diberikan oleh Pemerintah Pusat yaitu Kementrian Kelautan dan Perikanan sehingga pada situasi ini Dinas Perikanan sebagai fasilitator dalam tahap pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke kabupaten sinjai terlebih dahulu membuat agenda atau rancangan pembangunan dengan perincian anggaran yang dibutuhkan untuk diserahkan langsung ke pihak KKP, seperti halnya yang dikemukakan

oleh informan yang berinisial SR selaku Kepala Dinas Perikanan yang mengatakan bahwa:

“Kami dari Dinas perikanan sinjai hanya sebagai fasilitator dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke, tugas kami pertama kali adalah mencarikan wilayah atau tempat yang cocok untuk dilakukan pembangunan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pengunjung, sehingga dari inisiatif kami, disana itu terdapat perahu yang bisa disewa wisatawan untuk berkeliling didaeraah hutan mangrove dan melihat berbagai biota-biota laut yang ada, tetapi sebelum itu kami melakukan musyawarah dengan pihak KKP yang memberikan anggaran untuk diperadakannya perahu itu tentunya ada proposal anggaran yang kami buat dan langsung disetujui, setelah itu barulah kami melakukan musyawarah kembali bersama dengan tokoh masyarakat untuk membahas mengenai tujuan dan manfaat diperadakannya perahu. (Hasil wawancara oleh SR pada hari Senin 06 Agustus 2018 Pukul 10.45)

Informan di atas mengemukakan bahwa dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke bahwa musyawarah dilakukan setiap kali akan melakukan pembangunan dan setiap akan memperadakan fasilitas atau sarana prasarana. Dinas Perikanan setelah proposal anggaran tentang perencanaan pembangunan diajukan dan disetujui kemudian dipanggil pihak LSM KPSDA-ACI, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemerintah Desa dan Masyarakat setempat untuk menghadiri rapat yang diusung oleh dinas Perikanan dalam hal membahas keberlanjutan pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke, dalam hal inilah kekutan dan partisipasi semua aktor untuk membangun sinergitas sangat penting karena ditangannyalah para aktor atau instansi yang terlibat menjadikan pembangunan sukses atau tidak.

Hal yang senada pun telah diungkapkan oleh informan yang berinisial IM selaku Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata yang mengatakan:

“Setiap instansi itu dek mempunyai ranah masing – masing dalam hal pembangunan dan pengembangan hutan mangrove Tongke-Tongke, terkhusus untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya menangani pada bagian promosi atau pemasaran dan penarikan retribusi saja, meskipun kami secara bersama dengan instansi lain mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk melihat pariwisata Tongke-Tongke lebih baik lagi makanya kami dari masing-masing instansi terlibat dalam hal ini meskipun berbeda tugas dan tanggungjawab kami, tetapi ada beberapa hal yang membuat kita untuk harus melakukan musyawarah dengan semua instansi yang terlibat, seperti musyawarah yang dilakukan dalam hal pemungutan retribusi yang dihadiri oleh beberapa instansi yang terlibat dan juga para tokoh masyarakat, karena pemungutan retribusi tersebut tidak dapat diambil keputusan secara sepihak saja.” (Hasil wawancara oleh IM pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Pukul 10.40 Wita)

Selanjutnya, pernyataan yang sama juga dikatakan oleh salah satu informan yang berinisial TY selaku masyarakat Desa Tongke-Tongke dan juga selaku mantan ketua LSM KPSDA-ACI yang mengemukakan bahwa “Dari awal sebelum dilakukan penanaman bakau hal pertama yang saya lakukan yaitu melakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat yaitu saya panggil itu masyarakat supaya dia mau menanam bakau, (Hasil wawancara oleh TY pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 Pukul 09.27 wita)

Pernyataan lain yang disampaikan oleh Staf dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai bahwa:

“Musyawarah yang dilakukan berjalan kurang maksimal dengan Kepala Desa Tongke-Tongke disebabkan karena ketidaksetujuan

tentang pemberlakuan retribusi yang dananya tidak dimasukkan ke Anggaran Dana Desa tetapi masuk ke kas kabupaten.”(Hasil wawancara oleh AR pada hari senin, tanggal 06 Agustus 2018 pukul 10.50 wita)

Hasil wawancara dari informan di atas menunjukkan bahwa aktor yang melakukan kolaborasi dalam pembangunan pariwisata Hutan mangrove Tongke-Tongke terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk menemukan area kesepakatan meskipun dalam melakukan musyawarah masih terdapat kejanggalan seperti halnya musyawarah tidak dilakukan secara konsisten dan sistematis serta kurangnya sinergitas Kepala Desa selaku pihak yang lebih mengetahui secara mendalam terkait situasi pembangunan dan arah kedepannya.

c. Keterbukaan

Keterbukaan membutuhkan rasa saling memahami dan mampu mengidentifikasi setiap permasalahan yang terjadi dengan menyampaikan secara transparan dan terbuka kepada semua aktor tanpa pandang bulu. Sikap saling menghormati dan menghargai tidak menghalangi masing-masing untuk menyampaikan informasi dan mengemukakan pendapatnya secara terbuka. Fakta ini sesuai dengan pandangan Denhardt and Denhardt dalam Sabaruddin (2015) menjelaskan bahwa melalui partisipasi publik yang luas dalam pembuatan kebijakan maka memacu warga negara dapat membantu meningkatkan jaminan atau kepastian bahwa suara dan kepentingan individu ataupun kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat

didengarkan dan kemudian direspon pemerintah secara adil. Pada esensinya menjalin kolaborasi harus selalu terbuka, memastikan bahwa apa yang disuarakan dan didengarkan mampu dipahami dan diterima tanpa ada diskriminasi sehingga dengan itu semua aktor mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut SR selaku Kepala Dinas Perikanan berpendapat bahwa keterbukaan informasi yang terjadi dalam kolaborasi ini adalah:

“Kolaborasi antara kami dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dalam hal ini Dinas Perikanan serta Instansi yang lain terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal ini Kelompok ACI, kami selalu terbuka dalam menyampaikan informasi begitupun sebaliknya, puang Sanu selaku ketua ACI selalu menyampaikan kepada kami apa yang permasalahan yang terjadi dilapangan, serta menyampaikan segala keluhan dari masyarakat, seperti masalah mengenai sarana dan prasarana yang kurang memadai dala ini adalah air bbersih di daerah wisata dan keluhan seperti sempitnya lahan parkir diarea destinasi dari hal yag demikian kemudian kami memberi saran atau solusi terhadap masalah yang dikeluhkan” (Hasil wawancara oleh SR pada hari senin, tanggal 06 Agustus 2018 pukul 10.50 wita)

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai menjelaskan bahwa pertukaran informasi dengan semua aktor dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke dilakukan secara terbuka dan menyeluruh. Keterbukaan secara timbal balik juga dilakukan oleh Dinas Perikanan dan LSM KPSDA-ACI terkait masalah pembangunan pariwisata Hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. Bukan hanya Keterbukaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan yang berperan sebagai fasilitator dalam pembangunan Tongke-Tongke terhadap LSM KPSDA-ACI.

Hal senada yang diungkapkan SN selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ACI berpendapat bahwa:

“Sampai sekarang kami selaku Pengelola dan juga sebagai aktor dalam pembangunan Tongke-Tongke, berhubungan baik dengan pemerintah daerah dalam hal ini semua instansi yang terlibat dalam pembangunan Tongke-Tongke, ada Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan dan Kehutan yang sekarang menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Pemerintah Desa, semua keluhan dari masyarakat itu kami tampung dan kami sampaikan semua kepada instansi untuk meminta sarannya kemudian menyampaikan kembali kepada masyarakat, bukan hanya itu setiap pertemuan juga kami memanggil masyarakat untuk menyampaikan setiap permasalahan yang dialami, kami juga menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat segala aturan yang menyangkut masalah hutan mangrove Tongke-Tongke seperti melarang masyarakat mengotori kawasan hutan mangrove Tongke-Tongke, melarang menebang pohon, dan larangan meminta bayaran kepada wisatawan yang datang ke hutan mangrove Tongke-Tongke. (Hasil wawancara oleh SN pada hari Selasa Tanggal 07 Agustus 2018 Pukul 10.55)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan SN menjelaskan bahwa bukan hanya keterbukaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan terhadap LSM KPSDA-ACI ataupun sebaliknya tetapi keterbukaan segala informasi mengenai pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke kabupaten sinjai diterapkan oleh semua aktor yang terlibat, para aktor sangat paham bahwa pertukaran informasi yang pada esensinya harus benar –benar disuarakan dan mendengarkan apa yang disuarakan oleh aktor lain tanpa ada yang dituipi untuk memenangkan sebuah perdebatan.

Selanjutnya, penyampaian atau pertukaran informasi umpan balik yang diterima oleh masyarakat dalam hal ini salah satu diantara pemilik

café yang ada dikawasan hutan mangrove yang berinisial SY mengatakan bahwa:

“Saya pernah menerima himbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan daerah sekitar hutan bakau, ini disampaikan oleh pengelola hutan bakau yaitu ACI dan juga sering kali di beritahukan oleh puang Sirajuddin setiap berkunjung ke hutan bakau” (Hasil wawancara oleh SY pada hari Ahad tanggal 02 September 2018 Pukul 14.15 wita)

Pernyataan di atas telah menunjukkan bahwa dari hasil wawancara informan dikemukakan bahwa Aktor yang terlibat dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke telah menjain komunikasi secara terbuka terhadap masyarakat ataupun dengan semua aktor atau instansi yang terlibat dalam pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke kabupaten Sinjai.

2. Trust Building (Membangun Kepercayaan)

Membangun kepercayaan merupakan syarat yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang solid. Membangun kepercayaan memerlukan waktu yang tidak singkat, hal ini karena dalam kolaborasi diperlukan komunikasi yang intensif (terus-menerus) dan penyesuaian terhadap kondisi saat ini dari munculnya kembali konflik masa lalu (*prehistory antagonism*). Cummings & Bromiley dalam Sabaruddin (2015) melihat bahwa kepercayaan sangat penting dalam membangun hubungan dan mempertahankan kolaborasi yang dapat dikembangkan antara aktor yang berkolaborasi melalui komunikasi, timbal balik, keselarasan tujuan, transparansi berbagai informasi dan pengetahuan yang jelas dan dengan menunjukkan kompetensi, niat baik dan tindak lanjut.

Saling percaya terhadap Aktor dan percaya akan sumber daya yang dimiliki mampu menciptakan keberhasilan dalam berkolaborasi. Kepercayaan harus ada sejak awal sampai berakhirnya kegiatan. Dengan adanya sikap saling membangun kepercayaan (*trust building*) sehingga akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara semua aktor. Dalam membangun kepercayaan terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur proses kolaborasi yaitu diantaranya sebagai berikut:

a. Empati

Kemampuan seorang aktor untuk mengidentifikasi dan memahami secara realitas perilaku aktor lain (pemerintah, swasta, dan masyarakat) seperti kepekaan antar aktor, tidak mengedepankan emosi, serta melakukan evaluasi diri untuk mencapai suksesnya pembangunan. Sehingga mampu menyelesaikan suatu permasalahan secara objektivitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu informan yang bergerak sebagai aktor dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke yang berinisial SR selaku Kepala Dinas Perikanan mengatakan bahwa :

“...dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke kami selalu saling membantu satu sama lain meskipun pada dasarnya kami tidak ada program kerja secara terikat yang disepakati seperti kelompok ACI membantu memberi penyuluhan-penyuluhan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove tujuannya agar masyarakat tidak hanya mengetahui pohon bakau itu sebagai objek wisata yang menari, yang indah tetapi dalam satu pohon bakau itulah menyimpan banyak manfaat hal ini juga bias menyadarkan kepada masyarakat untuk tidak

merusak pohon bakau yang sudah tumbuh” (Hasil wawancara oleh SR pada hari Senin Tanggal 06 Agustus 2018, Pukul 11.03 wita)

Berdasarkan dari pernyataan di atas diungkapkan bahwa sikap kepekaan antar aktor dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke nertal dilakukan oleh Dinas perikanan terhadap LSM KPSDA-ACI dalam memberi penyuluhan kepada masyarakat mengenai hutan Mangrove Tongke-Tongke.

Begitu pula dengan hasil wawancara dari informan yang lain yang berinisial SN selaku ketua ACI atau pengelola Hutan Mangrove Tongke-Tongke mengungkapkan bahwa setiap kali ada permasalahan tentang hutan bakau selalunya ada yang membantu kami baik itu dari Dinas Kabupaten Sinjai ataupun dari Kepala desa itu sendiri, apabila kami membutuhkan bantuan mereka langsung membantu begitupun sebaliknya ada umpan balik yang kami terima. (Hasil wawancara oleh SN pada hari selasa, tanggal 07 Agustus 2018 Pukul 11.01)

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas bahwa terdapat gambaran saling percaya terdapat hubungan timbal balik yang dilakukan oleh semua aktor yang berkolaborasi dalam pembangunan Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai untuk selalu membangun hubungan yang sinergitas Hal ini senada yang di ungkapkan oleh salah satu informan yang berinisial TY selaku ketua pertama kelompok ACI yang mengatakan “Biasa kami melakukan gotong royong diarea hutan bakau tanpa ada himbauan dari warga mereka berbondong-bondong membawa sapu,sabit, dan cangkul untuk ikut membantu kami gotong royong, mereka sangat peduli dengan

kebersihan hutan bakau.” (Hasil wawancara oleh TY pada hari Minggu, tanggal 02 September 2018. Pukul 09.30 wita)

Hal tersebut mengungkapkan bahwa LSM KPSD-ACI dan masyarakat sangat sinergitas dan antusias dalam berkolaborasi menciptakan lingkungan bersih pada area hutan mangrove saling bahu membahu dalam membangun hutan mangrove Tongke-Tongke dimulai dengan membersihkan kawasan Tongke-Tongke sampai dengan membangun hubungan kemausiaan antar aktor yang lainnya

b. Loyalitas

Loyalitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberikan atau menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan konsekuensi yang telah di sepakati oleh para aktor untuk melakukan kolaborasi dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.

Menurut informan yang berinisial SN selaku ketua LSM ACI Tongke-Tongke mengatakan bahwa :

“Kalau berbicara tentang aturan dan sanksi yang ditetapkan mengenai hutan mangrove Tongke-Tongke itu semua aktor dan elemen masyarakat mematuhi aturannya dan Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ada oknum-oknum yang berani melanggar aturan itu mulai dari proses penanaman mangrovenya sampai sekarang ini karena saya mengakui bahwa masyarakat disini sangat mematuhi aturan malah masyarakat disini membantu mensosialisasikan aturan ini kepada para wisatawan yang berkunjung ke hutan mangrove Tongke-Tongke ini. (Hasil wawancara oleh SN pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018. Pukul 11.05 wita)

Berdasarkan dengan apa yang dipaparkan oleh informan di atas bahwa ada aturan dan sanksi yang ditetapkan mengenai hutan mangrove

seperti kerusakan pohon bakau, membuat kekeributan di kawasan hutan mangrove, tidak hanya itu KPSDA-ACI sangat mensyukuri mengenai partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam gotong royong yang dilakukan tanpa ada pemberitahuan atau himbauan sebelumnya hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dan LSM KPSDA-ACI loyal dalam melakukan kolaborasi dan sangat patuh terhadap aturan yang ditetapkan.

Menurut informan yang berinisial RW selaku Seksi Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap mengatakan bahwa :

“Aturan itu dibuat untuk semua kalangan meskipun kita sebagai pelaksana dan pembuat atau perumus aturan itu kami juga mematuhi, karena kalau bukan kami yang menjadi contoh untuk mematuhi aturan itu siapa lagi, kita harus memberi contoh kepada masyarakat, karena aturan dibuat itu tidak untuk dilanggar melainkan peringatan untuk semua dan apabila ada yang mencoba untuk melanggarnya kami berlakukan saksi untuk mereka tanpa pandang bulu. (Hasil wawancara oleh RW pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018, Pukul 09.35 wita)

Informan di atas mengungkapkan bahwa aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama dengan OPD (orgaisasi perangkat daerah) bersama dengan masyarakat Tongke-Tongke mampu diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh semua kalangan terlebih dari semua aktor yang ikut andil dalam perumusan aturan tersebut, dalam isi aturan tersebut yang diberlakukan terdapat beberapa sanksi bagi siapapun yang berani melanggar aturan tersebut tanpa pandang bulu.

Sedangkan hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu informan yang berinisial IM selaku Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata mengungkapkan bahwa :

“Ada aturan yang diberlakukan dalam pengelolaan mangrove, aturan itu berlaku untuk semua orang yakni aturan tentang penebangan pohon bakau dan pencemaran lingkungan di kawasan hutan mangrove Tongke-Tongke dan barang siapa yang melanggarnya akan diberikan sanksi, misalnya bagi yang menebang pohon bakau maka sanksinya adalah mengganti pohon yang ditebang tersebut dengan berlipat-lipat. (Hasil wawancara oleh IM pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018. Pukul 10.35 wita)

Berdasarkan dari apa yang diungkapkan maka dapat disimpulkan bahwa aturan yang diberlakukan mempunyai sanksi, siapa pun yang berani untuk melanggar aturan tersebut, aturan yang telah ditetapkan meski dipatuhi oleh semua kalangan meskipun seberapa tinggi hirarki yang dimiliki dalam suatu lembaga.

c. Kedekatan Sosial

Kedekatan sosial yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini adalah terdapat hubungan emosional terhadap para aktor yang melakukan kolaborasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan orientasi para aktor yang terlibat kolaborasi dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.

Berikut ini pendapat informan yang berinisial SR selaku Kepala Dinas perikanan mengemukakan komentarnya bahwa :

“Yah itu saja, kita harus percaya bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang kita pegang masing-masing dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke dan begitupun dengan aktor yang lain, sepertihalnya kita di dinas perikanan Kabupaten Sinjai ini, kita diberi tanggung jawab oleh pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) untuk saling berkoordinasi dengan aktor yang lain untuk bersama-sama membangun hutan mangrove Tongke-Tongke” (Hasil wawancara oleh SR pada hari Ahad tanggal 02 September 2018 jam 10.39 wita).

Berdasarkan dengan apa yang di ungkapkan dengan informan di atas maka dalam hal ini peran dinas perikanan dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai sangat percaya terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya dan percaya bahwa aktor yang lain juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikannya. Hal serupa diungkapkan oleh AP selaku Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif mengemukakan pendapat:

“Kepercayaan setiap aktor yang terlibat dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke harus ada, meskipun tidak ada perjanjian yang tertulis secara nyata (MoU) sebelumnya, kita percaya saja bahwa ada tugas tersendiri yang harus diselesaikan tetapi meskipun demikian kita harus selalu melakukan koordinasi terhadap aktor yang lain supaya tidak terjadi percekocokan nantinya, dan setiap OPD (orgaisasi perangkat daerah) yang terlibat tetap mengacu pada Peraturan Daerah No 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan pengelolaan wilayah hutan bakau di Kabupaten Sinjai pada intinya masyarakat juga terlibat karena dari awal itu merupakan hasil dari swadaya masyarakat sehingga ada hutan mangrove dan yang namanya undang-undang punya kekuatan hukum jadi kita hanya mengikuti saja” (*Hasil wawancara oleh AP pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 jam 10.16 wita*).

Pendapat informan di atas menjelaskan bahwa dalam pembangunan hutan mangrove didasari dengan adanya saling percaya antar semua aktor. Setiap aktor percaya bahwa masing – masing yang terlibat dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Hal senada juga disampaikan oleh informan yang berinisial MR dengan nada dan intonasi yang tinggi serta tegas mengatakan bahwa :

“Kami selalu membangun kepercayaan dan memperbaiki hubungan emosional terhadap semua aktor yang terlibat karena kami mengurus tugas kami masing-masing, kalau kami tidak percaya terhadap semua

elemen yang bekerja keras dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke tidak mungkin hutan mangrove bisa menjadi tempat destinasi yang selalu dikunjungi oleh berbagai kalangan masyarakat lokal sampai mancanegara” (*Hasil wawancara oleh MR pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 jam 09.45 wita*). Hasil wawancara dengan informan di atas mengatakan bahwa

pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke selalu mengedepankan sikap saling percaya terhadap semua aktor yang terlibat tidak terkecuali oleh masyarakat sekitar daerah destinasi mangrove, adapun terkait dengan pembangunan hutan mangrove akan dibahas secara bersama-sama dalam bentuk pertemuan.

Begitu juga pendapat dari informan yang berinisial RW selaku Kepala Seksi Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kepercayaan itu pasti ada, tetapi pada dasarnya kami tidak ada kesepakatan khusus dengan OPD (organisasi perangkat daerah), LSM ACI, ataupun masyarakat, tapi kita ada semacam draf pembangunannya kearah mana, setahu saya kolaborasi ini cenderung informal pokoknya kami hanya sebagai fasilitator, itu saja”. (*Hasil wawancara oleh RW pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2018 jam 09.20 wita*).

Hal senada yang di sampaikan oleh informan yang berinisial SN selaku Ketua Umum LSM KPSDA-ACI yang mengemukakan agrumennya bahwa:

“Kami dari LSM ACI sendiri sangat berpegang teguh dengan yang namanya kepercayaan tentunya dalam hal pembangunan hutan bakau, ada tiga hal yang kami yakini terkait adanya kepercayaan yaitu harus transparan, tidak banyak neko-neko, dan pastinya harus jujur. Contohnya saja kami dari LSM ACI yang tugasnya mengelola hutan bakau, kalau kami ke OPD (organisasi perangkat daerah) mengutarakan semua hal yang mengganjil terkait pengelolaan hutan mangrove biasanya satu kali’ji bicara’ta, sering jaki na lihat dan apa yang dilakukan benar adanya, apalagi jika itu adalah kepentingan

umum pasti segera terealisasi ” (*Hasil wawancara oleh SN pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 jam 10.43 wita*).

Informan SN di atas selaku ketua LSM-ACI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan mangrove Tongke-Tongke berpendapat bahwa kepercayaan harus dimiliki dan ditanamkan pada setiap aktor yang terlibat dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke dan tentunya harus transparan, tidak mengedepankan banyak teori daripada kerja nyata, serta jujur dengan apa yang mereka lakukan dan setiap apa yang mereka sampaikan.

Pendapat informan yang berinisial AS selaku masyarakat Desa Tongke-Tongke mengatakan bahwa :

“sejauh ini pihak yang terlibat dalam pembangunan hutan bakau Tongke-Tongke telah banyak membantu pemerintah desa menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di desa kami seperti dibuatkan beberapa jembatan-jembatan untuk bisa berkeliling melihat-lihat mangrove, dan juga kami sebagai masyarakat desa disini sangat mematuhi aturan yang berlaku mulai dari sejak kami melakukan penanaman bakau sampai saat ini. (*Hasil wawancara oleh AS pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2018 jam 13.29 wita*)”.

Pernyataan di atas dijelaskan bahwa informan yang berinisial AS selaku masyarakat setempat percaya akan semua aktor yang terlibat dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai hal ini dibuktikan bahwa masyarakat sangat mematuhi berbagai aturan yang berlaku selama dalam penanaman mangrove sampai mangrove yang telah ditanam dapat dinikmati oleh semua kalangan.

Selanjutnya, pendapat berbeda yang ungkapkan oleh informan yang berinisial SR selaku kepala desa yang terlibat dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke yang mengatakan bahwa :

“Yah, dari dulu kami telah membangun kepercayaan terhadap semua masyarakat terlebih lagi kepada semua OPD (orgaisasi perangkat daerah) yang terlibat tanpa adanya mereka, Desa Tongke-Tongke sebagai tempat destinasi mangrove tidak mampu di kenal banyak orang yang dulunya hanya desa yang kumuh yang sering terjadi abrasi sekarang tidak lagi demikian jadi saya sangat bersyukur ” (*Hasil wawancara oleh SR pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 jam 10.42 wita*).

Informan di atas mengungkapkan bahwa kepercayaan terhadap semua aktor telah terjalin dengan baik mulai dari sejak penanaman mangrove sampai sekarang yang notabannya telah menjadi tempat destinasi wisata yang menjadi tempat kunjungan oleh setiap orang.

3. *Commitmn to Process* (Komitmen pada Kolaborasi)

Komitmen merupakan komponen yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi asli para aktor dalam kolaborasi. Masing-masing aktor harus memiliki komitmen dan keinginan yang kuat menyelesaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan kesepakatan yang telah diputuskan secara bersama. Tingkatan komitmen terhadap kolaborasi adalah adanya ketergantungan kolaborator yang dapat dilihat dari saling berkolaborasi baik dalam kesamaan kepentingan maupun perbedaan kepentingan. Dalam kolaborasi, adanya saling ketergantungan merupakan kunci yang penting agar hubungan antar aktor terus terjalin dengan baik, Thomson dan Perry dalam tulisannya Fairuza (2017). Dalam mengukur komitmen pada kolaborasi (*Commitmn to*

Process) ada tiga indikator utama yang diperlukan yaitu pengakuan bersama, apresiasi, dan monitoring hal ini merupakan titik fokus peneliti untuk mengetahui komitmen pada kolaborasi (*commitmn to process*) dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke, adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Pengakuan bersama

Pengakuan bersama yang dimaksudkan dalam fokus penelitian ini adalah terjadinya kesepakatan antar para aktor yang berkolaborasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya dokumen kesepakatan antar pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat terkait peran dan tanggung jawab yang dilakukan dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke –Tongke Kabupaten Sinjai

Informan yang berinisial SR selaku Kepala Dinas Perikanan yang terlibat dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai mengatakan:

“Komitmen kami tidak disadari dengan adanya perjanjian-perjanjian sebelumnya tetapi kami berkomitmen selaku Dinas Perikanan bahwa ada tugas dan tanggungjawab yang akan kami tuntaskan terkait pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke seperti melakukan koordinasi terhadap semua OPD (orgaisasi perangkat daerah) yang terlibat dan juga menangani masalah penataan perairan dan melindungi biota-biota laut” (*Hasil wawancara oleh SR pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 jam 11.45 wita*).

Pendapat informan di atas mengatakan bahwa pengakuan bersama OPD (orgaisasi perangkat daerah) dengan aktor yang lain yang terlibat dalam kolaborasi membuat pengakuan bahwa tidak ada kesepakatan

dalam konten tertulis atau *job description* yang disepakati bersama namun dalam hal pelaksanaan pembangunannya para aktor tersebut komitmen karena masing-masing OPD (orgaisasi perangkat daerah), LSM KPSDA-ACI, dan masyarakat mempunyai tugas dan tanggungjawab yang harus diselesaikan terkait dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai .

Informan yang lain yang berinisial RW selaku Kepala Seksi Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap juga menambahkan bahwa kami :

“berkomitmen tidak dinyatakan dalam bentuk tertulis tetapi komitmen itu harus didasari oleh sikap yang selalu terbuka, dan jujur terhadap semua aktor supaya selalu berkesinambungan serta ada motivasi yang harus diyakini setiap aktor yang terlibat, keterpanggilan hati nurani untuk melihat masyarakat pesisir sehingga bisa menciptakan edukasi dan membuka pekerjaan baru. (Hasil wawancara oleh RW pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 jam 09.32 wita).

Informan diatas menjelaskan bahwa komitmen didalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke sangat dominan, meskipun tidak ada aturan atau perjanjian yang disepakati sebelumnya, tetapi keyakinan hatilah yang membuat mampu komitmen terhadap apa yang dilakukan, meskipun adanya pengakuan bersama dari aktor bahwa kolaborasi tidak didasari dengan kesepakatan tertulis tetapi semua aktor atau OPD (orgaisasi perangkat daerah) mengakui bahwa ada peraturan daerah yang mengikat untuk komitmen yaitu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai.

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh informan yang berinisial AP selaku kepala seksi pengembangan sumber daya dan ekonomi kreatif mengatakan :

“kami tetap menjaga sinergitas dengan aktor lain dengan tidak merusak lingkungan, tidak ada perjanjian tertulis mengenai komitmen terhadap aktor lain tetapi kami percaya bahwa ada peraturan daerah yang mengikat yaitu terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sehingga kami harus komitmen, dan pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke telah dimasukkan menjadi rencana pembangunann jangka panjang (RPJP) mulai dari tingkat nasional sampai tingkat Kabupaten/kota. (*Hasil wawancara oleh AP pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 jam 11.55 wita*)”

Informan di atas selaku kepala seksi pengembangan sumber daya dan ekonomi kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengemukakan pendapatnya bahwa komitmen harus tetap terjaga dalam kolaborasi meskipun tidak didasari dengan perjanjian tetapi komitmen itu terjadi karena pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke telah menjadi program pembangunan jangka panjang oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai

b. Apresiasi

Apresiasi adalah pemberian penghargaan terhadap suatu karya nyata yang mengakibatkan seseorang menjadi termotivasi dan komitmen dalam bekerja. Selain indikator pengakuan bersama yang menjadi tolak ukur dari komitmen pada kolaborasi (*commitmn to pocess*) terdapat

indikator apresiasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Einsenberg & Rhodes dalam Suhartini, 2018) menyatakan bahwa apresiasi adalah komitmen yang pada akhirnya akan mendorong seseorang untuk berusaha menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan meningkatkan harapan bahwa performa akan diperhatikan dan dihargai.

Dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke telah banyak mendapat penghargaan hal ini diungkapkan oleh informan yang berinisial SN selaku ketua LSM ACI:

“Alhamdulillah kami beberapa kali kami mendapat apresiasi atau penghargaan, salah satunya pada pertengahan tahun 2018 ini kami kembali mendapat penghargaan wisata kategori berkembang juara 1 tingkat nasional, yang langsung diberikan oleh menteri pariwisata, inilah merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada kami, tidak hanya itu saya pribadi sering diundang untuk menjadi pembicara di berbagai acara seminar yang membahas tentang pembangunan dan perkembangan hutan mangrove Tongke-Tongke hingga saat ini., tidak hanya itu apresiasi yang kita dapat merupakan motivasi bagi kami selaku aktor untuk lebih meningkatkan kerja nyata kita untuk mengembangkan hutan mangrove Tongke-Tongke ini dan kebanggaan untuk Kabupaten Sinjai. *(Hasil wawancara oleh SN pada hari Ahad tanggal 02 September 2018 jam 11.45 wita)*”.

Informan di atas mengatakan bahwa selama pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke sering mendapat berbagai apresiasi dan penghargaan dari tingkat lokal sampai ke tingkat nasional. Hal ini mampu memacu kemampuan dan kinerja LSM KPSDA-ACI dalam terlibat dalam kolaborasi untuk mengembangkan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke. Penghargaan yang diterima merupakan inventaris untuk Kabupaten Sinjai dan juga sebagai motivasi untuk

komitmen dalam membangun hutan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. Seperti halnya yang diutarakan oleh staf dinas Pariwisata dan kebudayaan sebagai seksi Pengembangan Pasar Pariwisata bahwa :

“Alhamdulillah kalau penghargaan yang kami terima selama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ikut terlibat dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke itu ada kami simpan dikantor ini sebagai inventaris dan sebagai kunci motivasi bagi kami dan semoga kedepannya bertambah lagi penghargaan yang kami peroleh bukan hanya dalam lingkup lokal atau nasional tapi juga internasional, amin. (Hasil wawancara oleh IM pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, Pukul 10.40 wita)

Selanjutnya argumen yang sama juga ditambahkan oleh seorang tokoh masyarakat yang pernah menjabat sebagai ketua LSM KPSDA-ACI menyatakan bahwa :

“dulu setelah kedatangan presiden republik Indonesia, ibu Megawati beserta rombongannya memberikan piagam penghargaan sebagai salah satu tokoh penggagas hutan bakau berbasis masyarakat, saya senang sekali karena dengan keberanian saya waktu itu untuk mengajak para masyarakat untuk menanam bakau menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi dan hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai” (*wawancara oleh TY pada hari minggu tanggal 02 september 2018 pukul 09.55 wita*)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemberian suatu penghargaan merupakan apresiasi tak terhingga untuk selalu berprogres, membangun komitmen untuk tetap menjaga kolaborasi yang terjalin menuju *good collaborative governance* dalam membangun pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke, sehingga suatu apresiasi yang diberikan terhadap suatu aktor atau seseorang mampu membangkitkan

jiwa seseorang untuk terus berkarya dan loyal atau berkomitmen terhadap suatu pekerjaan atau usaha yang dilakukan.

c. Monitoring

Monitoring yang dimaksudkan adalah mengevaluasi sejauh mana perkembangan pembangunan hal ini dapat ditentukan dari pencapaian hasil sesuai dengan standar yang telah disepakati dan konsistensi yang dilakukan selama proses pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.

Menurut SR selaku Kepala Dinas Perikanan mengatakan bahwa :

“Pembangunan tracking yang sebagai pelengkap keindahan pariwisata Hutan mangrove Tongke-Tongke itu merupakan sumbangsi dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai sarana yang digunakan untuk berkeliling melihat keindahan pohon mangrove, pembangunan tracking dibiayai sepenuhnya oleh KKP dan orang KKP yang mengevaluasi tentang tracking itu, kami hanya membuat laporan kemudian diajukan ke KKP” (*Hasil wawancara oleh SR pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 jam 11.45 wita*).

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh informan di atas menyatakan bahwa Dinas Perikanan hanyalah sebagai fasilitator atau kepanjangan tangan dari KKP dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke. Anggaran sepenuhnya juga diberikan oleh pusat Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan para aktor atau OPD (orgaisasi perangkat daerah) terlibat hanya membantu membuka jalannya pembangunan Hutan Mangrove Tongke-Tongke. Hal ini juga diutarakan

oleh informan yang berinisial RW selaku seksi Pengelolaan Pesisir dan Perikanan Tangkap mengatakan:

“Sebetulnya anggaran yang digunakan itu berasal dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kemudian dari anggaran itu dibuatkan tracking disekeliling Hutan Bakau dan Dibangun Restorasi Pembelajaran Mangrove sebagai sarana pelengkap dari Pariwisata Mangrove, dalam mengevaluasi pembangunan diserahkan langsung oleh dinas perikanan, kemudian dinas perikanan yang memantau pelaksanaan sampai selesai, kemudian membuat laporan akhir yang berisi bahwa tanda pembangunan selesai dan dikirim dan diserahkan ke KKP” (*Hasil wawancara oleh RW pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 jam 09.33 wita*).

Berdasarkan dengan apa yang diungkapkan oleh informan di atas menyatakan bahwa Dinas Perikanan hanyalah sebagai fasilitator atau kepanjangan tangan dari KKP dalam pembangunan hutan Mangrove Tongke-Tongke sehingga monitoring yang dilakukan hanya antara KKP dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai karena aktor yang lain seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengembangkan hutan Mangrove Tongke-Tongke karena latar belakang dari dinas yang terkait. Berbeda dengan penanaman mangrove yang dilakukan oleh LSM KPSDA-ACI yang dipelopori oleh seorang tokoh masyarakat sehingga evaluasi dan pemeliharaan tetap dilakukan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh TY, mengatakan bahwa:

“Hutan Bakau itu saya tanam bersama dengan masyarakat yang terdiri dari 117 KK, kami menanam bakau itu tidak mudah, kami membutuhkan waktu yang lama dan panjang karena setiap sebayak-bayaknya pohon bakau yang kami tanam itu tidak semua tumbuh sehingga saya sendiri yang melakukan pemantauan untuk melihat seberapa banyak pohon bakau yang rusak dan itu langsung berikan pengganti pohon bakau yang baru, pemeriksaan

mangrove saya lakukan sebanyak 13 kali dalam 6 bulan disamping itu dilakukan pemeliharaan pada tanaman Bakau. *(Hasil wawancara oleh TY pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 jam 09.50 wita).*

Berdasarkan dengan apa yang diutarakan oleh informan yang berinisial TY di atas dikatakan bahwa penanaman mangrove dilakukan pemeriksaan secara intensif yaitu sebanyak 3 kali dalam 6 bulan, disamping itu dilakukan pemeliharaan terhadap pohon mangrove, evaluasi dan pemeliharaan tanaman mangrove sudah intens dilakukan yaitu 3 kali dalam 6 bulan.

Sedangkan menurut SN selaku Ketua LSM ACI mengatakan bahwa:

“Hutan Mangrove Tongke-Tongke telah menjadi hutan terbaik di Sulawesi Selatan akibat dari hutan mangrove telah menyelamatkan Desa Tongke-Tongke dari banjir dan meningkatkan hasil dari mata pencaharian warga untuk mencapai titik itu para aktor yang terlibat telah melewati beberapa situasi yang sulit seperti masyarakat sebagian besar susah sekali diberi pemahaman” *(Hasil wawancara oleh SN pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Pukul 11.05 wita).*

Berdasarkan dengan apa yang disampaikan oleh informan di atas yang berinisial SN mengatakan bahwa hutan mangrove menjadi hutan terbaik itu karena perjuangan semua aktor yang terlibat dalam pembangunan hutan mangrove sehingga mampu mendapat apresiasi itu, sehingga harus diperlukan komitmen yang kuat bagi semua aktor yang terlibat hal ini yang melatarbelakangi adanya komitmen pada masing-masing aktor yang terlibat dalam kolaborasi dalam pembangunan hutan Mangrove Tongke-Tongke karena tugas dan

tanggung jawab terhadap Dinas yang menaungi mereka serta pemberian suatu apresiasi mampu meningkatkan komitmen para aktor.

4. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)

Pemahaman bersama merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Pemahaman bersama dapat diartikan sebagai *common mission* (misi umum), *common purpose* (tujuan umum), *common objectives* (obyektivitas umum), dan *shared vision* (visi bersama). Pemahaman bersama juga biasa dimanifestasikan pada kesepakatan yang relevan untuk mengatasi masalah (Ansel dan Gash dalam Handayani, 2016). Ada tiga indikator dalam hal mencapai pemahaman bersama (*Shared Understanding*) yaitu sebagai berikut :

a. Kesamaan Visi dan Misi

Kesamaan visi dan misi adalah pendukung suksesnya pembangunan. Dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan oleh para aktor harus didasari dengan kesamaan visi dan misi agar pembangunan dapat dicapai sesuai dengan kesepakatan bersama para aktor. Hal ini dapat diukur sebelum dan setelah pembangunan selesai.

Menurut informan yang berinisial SR selaku Kepala Dinas Perikanan yang mengatakan bahwa :

“Kami paham akan tugas kami, tetapi kalau untuk tugas aktor yang lain, kami tidak paham, karena dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke, kami menjalankan tugas sesuai tujuan, visi, dan misi kami begitupun dengan aktor yang lain dan kami selalu berfikir bahwa apa saja yang dapat kami lakukan agar hutan mangrove ini dapat berbuah hasil yang bagus bagi masyarakat terkhusus masyarakat desa Tongke-Tongke. Adapun tujuannya adalah untuk memberi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat

Tongke-Tongke. Sedangkan posisi dinas perikanan dalam pembangunan hutan mangrove ini yaitu sebagai fasilitator jadi dalam membangun kawasan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke itu membutuhkan waktu yang cukup karena ada SOP yang harus dipenuhi yaitu terdapat pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 16 Desember 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai tentang penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kabupaten Sinjai sehingga tidak terjadi masalah dalam proyek pembangunan. *(Hasil wawancara oleh SR pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 jam 12.01 wita).*

Informan di atas mengemukakan bahwa tidak ada kesamaan visi dan misi dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke tetapi hanya ada visi misi tentang setiap dinas yang harus dicapai oleh setiap OPD (orgaisasi perangkat daerah). Dinas perikanan sebagai fasilitator dari pembangunan hutan mangrove paham dengan tugas mereka dan mengerti apa yang harus dilakukan hanya saja membutuhkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan pembangunan itu karena ada banyak proses yang harus dilalui diantaranya dalam pembangunan pariwisata harus berpedoman pada SOP Perizinan Kementrian Pariwisata adapun dasar hukumnya yaitu Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 dan diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai tentang penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kabupaten Sinjai sehingga tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan atau masalah besar yang terjadi dikemudian hari.

Selanjutnya, informan yang lain juga mengemukakan hal yang sama terkait dengan pemahaman bersama dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke, informan yang berinisial SN selaku ketua LSM KPSDA-ACI msengatakan bahwa: “visi dan misi secara umum

terkait dengan pembangunan mangrove Tongke-Tongke tidak ada ndik, hanya saja ada visi misi masing-masing OPD (orgaisasi perangkat daerah) yang terlibat dan mereka ada laporan pertanggung jawaban masing-masing secara internal dan eksternal. *(Hasil wawancara oleh SN pada hari Senin tanggal 02 September 2018 jam 11.10 wita).*

Sedangkan menurut informan yang berisial AP kepala seksi pengembangan sumber daya dan ekonomi kreatif mengatakan bahwa

“kami tidak memiliki kesamaan visi dan misi dek secara tertulis dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke, hanya saja yang menjadi acuan kami itu dari visi misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan saja. Meskipun kita sama-sama melakukan pembangunan itu tetapi kami disini sudah punya tugas atau program yang kami dan tidak bisa juga dipungkiri bahwa pembangunan bias berjalan sukses jika hanya satu atau dua orang yang terlibat. akan dilaksanakan dengan waktu yang sudah ditetapkan terkait begitu pun dengan Dinas Perikanan, dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan” *(Hasil wawancara oleh AP pada hari Senin tanggal 02 September 2018 jam 09.43 wita).*

Selanjutnya ditambahkan oleh informan yang berinisial RW selaku seksi pengelolaan pesisir dan perikanan tangkap terkait pemahaman bersama dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke, yang mengatakan bahwa

“Yahh...kalau visi misi kami secara umum itu tidak ada karena tidak ada kerjasama secara resmi yang dianut oleh semua aktor yang terlibat, tidak penandatanganan kerja sama yang kami sepakti sehingga tidak ada perumusan visi misi umum atau bersama yang seperti itu, tapi kalau adek mau visi misi Dinas Perikanan itu ada. *(Hasil wawancara oleh RW pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Pukul 09.45 wita).*

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam tidak ada visi misi secara umum Dinas Perikanan, OPD (organisasi perangkat daerah)

terkait dengan LSM KPSDA-ACI serta para masyarakat setempat, hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada kesesuaian visi misi diantara para aktor dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.

b. Kesamaan tujuan

Kesamaan tujuan dalam kolaborasi yang dilakukan oleh para aktor yakni dari masyarakat, pemerintah, dan swasta harus sejalan yang hendak dicapai, tentunya kolaborasi dalam hal pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai mempunyai tujuan yang sama yakni menjadi kawasan pariwisata yang mampu meningkatkan sumber daya yang dimiliki yakni sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya finansialnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan yang berinisial AP selaku kepala seksi bidang pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif yaitu:

“tujuan kami sama, yaitu meningkatkan SDA, SDF, membangun SDM-nya untuk menjaga ekosistem mangrove untuk tetap eksis dan menciptakan masyarakat yang harmonis serta sejahtera, visi misi kami tetap mengacu pada visi misi dinas pariwisata dan kebudayaan, tidak ada visi misi secara umum begitupun tujuan secara umum, karena visi misi umum seperti itu ada jika lembaga khusus terkait dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke. *(Hasil wawancara oleh AP pada hari Senin tanggal 02 September 2018 jam 09.40 wita).*

Informan di atas menjelaskan hal yang sama dengan informan yang lain bahwa tidak ada pemahaman bersama yang dibentuk atau disepakati sebelumnya bersama dengan semua aktor yang terlibat hanya saja mengacu pada visi misi dan rencana pembangunan masing-masing

OPD (organisasi perangkat daerah) yang terlibat dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.

Informan RW selaku seksi Pengelolaan Perairan dan Perikanan tangkap mengatakan bahwa “Tujuan dari pembangunan ini tetenunya untuk menjadi pariwisata yang diminati banyak orang dan mendapat manfaat bagi semua orang serta meningkatkan perekonomian masyarakat, akan tetapi untuk tujuan yang disepakati secara umum untuk semua aktor yang terlibat itu tidak ada” (*Hasil wawancara oleh RW pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 jam 10.02 wita*).

Berdasarkan dengan apa yang diungkapkan oleh informan tersebut bahwa tidak ada tujuan yang disepakati akan tetapi tujuan secara eksternal yaitu mejadikan mangrove lebih baik kedepannya. Sedangkan informan SN yang juga mengatakan hal yang sama dengan informan di atas yang menyatakan “Seperti halnya dengan visi dan visi ndik, kami tidak mempunyai tujuan yang disepakati secara bersama oleh aktor, tetapi kami hanya berpacu pada tujuan ACI yang ingin menjadikan hutan mangrove dapat bermanfaat bagi semua kalangan serta mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat sehingga dengan adanya hutann mangrove ini mampu meningkatkan perekonomian dan mesejahterakan masyarakat” (*Hasil wawancara oleh SN pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 jam 11.12 wita*).

Sedangkan informan SJ selaku kepala Desa yang mengatakan bahwa “saya selaku Kepala di Desa ini tentunya sangat mengharapkan

hutan mangrove ini menjadi lebih bermanfaat bagi sesama dan untuk semua OPD (orgaisasi perangkat daerah) yang terlibat mampu bersinergi untuk membangun dan mengelolah hutan mangrove dengan baik dan saya sangat berterima kasih karena dengan partisipasi OPD (orgaisasi perangkat daerah) yang ikut andil dalam pembangunan dan pengelolaan mangrove ini, tentunya Desa ini tidak dapat dikenal sebagai desa yang memiliki hutan mangrove terbaik di Sulawesi” (*Hasil wawancara oleh Sj pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 jam 10.50 wita*).

c. *Common Objectives* (obyektivitas umum)

Kolaborasi yang dilakukan harus bersifat objektif tanpa adanya pandang bulu terhadap sesama aktor dalam melakukan berkolaborasi. Hal ini dapat diukur dari penyelesaian tugas dan tanggungjawab yang dilimpahkan kepada masyarakat karena masyarakat yang lebih dalam terkait pengelolaan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.

Selanjutnya, informan yang lain juga mengemukakan hal yang sama terkait dengan pemahaman bersama dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke, informan yang berinisial SN selaku ketua LSM KPSDA-ACI msengatakan bahwa:

“Tugas kami sebagai kelompok ACI, yaitu mengelolah dan menjaga kelestarian hutan mangrove Tongke-Tongke, dan kami memahami itu, kami setiap kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga kepada pengunjung untuk menjaga kebersihan diarea destiasi hutan mangrove Tongke-Tongke, hal ini sesuai dengan tujuannya yaitu menciptakan lingkungan tetap lestari dan masyarakat yang sejahtera dan damai. Visi kami selaku kelompok ACI yaitu mewujudkan Tongke-Tongke sejahtera yang kemudian

mendorong masyarakat Tongke-Tongke bisa bersatu dan berdaulat tentang pengelolaan mangrove (*Hasil wawancara oleh SN pada hari Senin tanggal 02 September 2018 jam 11.10 wita*).

Oleh karena itu terkait dengan apa yang dikemukakan dengan informan yang berinisial SN di atas bahwa kelompok ACI memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan dan pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke, meskipun tidak ada visi misi umum yang telah di sepakati secara bersama-sama.

Selanjutnya ditambahkan oleh informan yang berinisial RW selaku seksi pengelolaan pesisir dan perikanan tangkap terkait pemahaman bersama dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke, yang mengatakan bahwa:

“Fokus kami hanya pada perikanannya saja, yaitu menjaga ekosistem laut sehingga tidak terjadi kerusakan pada habitat-habitat laut, serta tidak terjadinya penangkapan ikan secara liar oleh masyarakat baik dilakukan secara sengaja ataupun secara tidak sengaja, sehingga dengan demikian masyarakat dapat menikmati keindahan laut yang ada dan hinjanya mangrove. (*Hasil wawancara oleh RW pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 jam 10.55 wita*).

Informan RW di atas mengemukakan bahwa dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke tidak ada visi misi yang mendukung secara umum oleh masing-masing aktor hanya saja bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap OPD (organisasi perangkat daerah) yang terlibat dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai tanpa terkecuali LSM yang punya andil dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai dapat dikategorikan bahwa dalam

mendeskripsikan proses kolaborasi jika dilihat dari *shared understanding* (pemahaman bersama) yaitu para aktor kurang memahami arti sebuah kolaborasi sehingga dalam hal ini *shared understanding* (pemahaman bersama) tidak menjadi dominan dalam menyelenggarakan pemerintahan (pembangunan) tetapi bagaimana para aktor mampu membangun interaksi dan hubungan yang sinergitas kepada para aktor kolaborasi untuk lebih memanfaatkan potensi-potensi yang mereka miliki. Atas dasar tersebut kolaborasi dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke tidak didukung oleh sebuah perjanjian formal yang mengikat atau aturan umum yang tertulis yang kemudian diterjemahkan dalam sebuah kontrak kerjasama.

5. *Intermediate Outcomes* (Dampak Sementara)

Dampak sementara terjadi selama proses kolaborasi, oleh karena itu ada kata “sementara” di dalamnya. Dampak sementara menghasilkan *feedbacks*. Umpan balik yang diharapkan adalah umpan balik yang positif, yang disebut “*small-wins*” (kemenangan kecil). Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh informan yang berinisial SR yang mengatakan bahwa :

“Hasil yang dirasakan dari pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke ini adalah masyarakat bisa menikmati keindahan mangrove, masyarakat juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri seperti menjual pernak-pernik wisata, menyediakan lahan parkir, dan masih banyak lagi, sedangkan hasil untuk daerah yaitu ada kontribusi tersendiri dari wisata mangrove. (*Hasil wawancara oleh SR pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 jam 11.45 wita*).

Dari pernyataan informan SR di atas di kemukakan bahwa dengan adanya pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke lebih banyak

menimbulkan hal positif daripada hal negatifnya, hal ini dapat dilihat dari apa yang diungkapkan oleh informan di atas. Hal yang sama diungkapkan oleh informan yang berinisial SN selaku ketua LSM ACI mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah, sampai saat ini masyarakat sudah sadar dengan adanya objek wisata mangrove, secara perlahan-lahan mereka mematuhi aturan yang ada dan juga mampu menjaga kebersihan lingkungan wisata mangrove meskipun masih ada dua atau tiga orang masyarakat yang tidak peduli, Harapan kami sebagai pengelola menjaga kelestarian mangrove itu sendiri, tetap juga kita melakukan kegiatan penanaman mangrove. Bagaimana mendorong ekonomi alternative dalam hutan mangrove itu sendiri seperti *home industry* dari buahnya dikelola menjadi kue, buahnya itu yang kami coba dorong. Harapan saya bagaimana pemerintah ini melihat karena saya juga menyadari bahwa kalau hanya satu yang mau bekerja saya kira itu mustahil dengan adanya ini saya akan membuka hati pemerintah bagaimana melihat peluang ini untuk bisa mendorong nilai ekonomi masyarakat lokal dengan adanya objek wisata itu yang pertama, yang kedua, yang paling penting bagaimana menjaga ikon kita ini sebagai pelestari lingkungan karena Tongke-Tongke ini harapan kami sejak tahun 1984-2019 kami dorong menjadi tempat pembelajaran bersama. Jadi kami dorong ini menjadi edukasi untuk kita semua terkait pembelajaran mangrove (*Hasil wawancara oleh SN pada hari Senin tanggal 02 September 2018 jam 11.21wita*).

Dari pernyataan informan di atas menyatakan bahwa dengan adanya pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke, masyarakat menyadari bahwa pentingnya menjaga lingkungan wisata, karena lingkungan yang bersih akan mengundang banyak wisatawan yang berkunjung atau berwisata. Pendapat yang senada juga telah ditambahkan oleh informan yang berinisial IM selaku kepala seksi Industri Pariwisata yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya tempat destinasi mangrove ini, kami dari dinas pariwisata dan kebudayaan telah mendapat penghargaan, sedangkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu masyarakat

dapat mendirikan lahan usaha di sekitar pusat wisata seperti mendirikan café-café sederhana di sekitar mangrove, menjual berbagai makanan dan cenderamata, serta membuat sebuah lahan parkir sendiri” (*Hasil wawancara oleh IM pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 jam 10.35 wita*).

Informan di atas mengemukakan bahwa dampak sementara yang dirasakan dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke yaitu lebih banyak berdampak positif daripada negatifnya, masyarakat sangat antusias menciptakan usaha sendiri di sekitar destinasi mangrove.

Pendapat lain yang disampaikan oleh informan yang berinisial SY selaku masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan dengan keberadaan hutan mangrove bahwasanya masyarakat sadar akan pentingnya hutan mangrove sebagaimana yang disampaikan oleh masyarakat pemilik *cafe* terapung dalam wawancara bahwa:

“Kami sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan berupa beberapa pohon mangrove yang tidak di tebang sembarangan. Pernah juga himbauan oleh Dinas Kehutanan yang melarang keras penebangan di lakukan dalam jumlah besar. Sehingga kami merasa ada pengawasan dari beberapa Dinas Pemerintahan yang bergabung menangani hal tersebut. Hutan mangrove bagi kami awalnya hanyalah sebagai proses antisipasi bencana banjir dan tanpa sadar dengan melihat potensi yang ada pemerintah mulai memberikan bantuan berupa konsep pengembangan pola wisata, pengadaan jembatan, beberapa pondok kecil untuk berteduh. Adanya dukungan pemerintah membuat kami merasa lebih memiliki tanggung jawab yang lebih. (*Hasil wawancara oleh SY pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 jam 13.30 wita*)”.

Informan yang berinisial AS selaku Masyarakat juga menyampaikan terkait penghasilan yang diperoleh dengan adanya hutan mangrove sebagai salah satu destinasi wisata sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancara bahwa:

“Ketertarikan wisatawan yang mulai banyak membuat kami masyarakat pedesaan dapat memanfaatkan berbagai hal seperti menjual beberapa makanan ringan baik dalam hutan maupun luar

hutan, kami berinisiatif untuk mengolah lahan parkir dan cafe terapung. Kami mulai berkembang dengan sendirinya mengolah makanan laut, menyediakan berbagai makanan, minuman dan mulai membuat beberapa oleh-oleh khas dari Tongke-Tongke meski belum terbilang banyak baik dari segi hiasan maupun makanan. (*Hasil wawancara oleh AS pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 jam 13.44 wita*)”.

Nilai ekonomi masyarakat Desa Tongke-Tongke setelah adanya objek wisata hutan mangrove sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang masyarakat yang berinisial TY dalam wawancara bahwa:

“Kami baru mulai memiliki penghasilan tambahan setelah adanya hutan mangrove Tongke-Tongke seperti buahnya bisa dijual, ketika ada provinsi lain yang butuh untuk mananam tanaman bakau disinilah mereka mengambil buahnya. Sehingga yang tidak memiliki pekerjaan bisa mengambil buanya yang kemudian dijual. Buah tersebut kami kirim ke provinsi lain siapa yang membutuhkan. Sepanjang Sulawesi selatan ini keliling bibitnya semua diambil dari sini mulai dari Wajo, Bone, Bulukumba pokoknya sesulawesi selatan semua bibitnya diambil disini. Sebagai destinasi wisata disitu dapat lagi keuntungan kami sebagai masyarakat karena bisa menjual makanan minuman sudah dapat hasil dari usaha. (*Hasil wawancara oleh TY pada hari Senin tanggal 02 September 2018 jam 09.36 wita*)”.

Dari pendapat di atas dikemukakan bahwa masyarakat sangat antusias mendirikan usaha untuk mendapatkan penghasilan, tentunya bernilai ekonomi bagi masyarakat setempat sebagai pemenuhan kebutuhan keluarganya tentunya dalam hal ini sangat didukung oleh OPD (orgaisasi perangkat daerah) atau pemerintah daerah Kabupaten Sinjai.

Pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke melibatkan beberapa aktor pemerintah dan non pemerintah (swasta) diantaranya Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LSM KPSDA-ACI, Pemerintah Desa, dan Masyarakat. Setiap aktor yang terlibat dalam kolaborasi tanpa terkecuali harus menyadari peran,

tugas dan tanggungjawab masing-masing demi terciptanya tujuan kolaborasi. Pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh banyak organisasi perangkat daerah atau OPD (orgaisasi perangkat daerah) atau aktor terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing, hal ini sesuai dengan pendapat Winarso dalam Rahmawati (2018) yang menyatakan bahwa pembangunan harus dilakukan secara bersama-sama untuk menumbuhkan sinergi (*synchronized ergies*) sehingga mampu meminimalisir sengketa ataupun konflik yang timbul akibat kesalahpahaman yang memungkinkan terjadi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Kawasan hutan Mangrove di Kabupaten Sinjai telah mengalami penataan dan pengelolaan secara optimal, peran berbagai lembaga pemerintah, masyarakat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadikan vegetasi hutan mangrove mampu terjaga dan berkembang. Upaya meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam rehabilitasi mangrove dan pengelolaan mangrove berkelanjutan sehingga terbentuk Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM) yang berfungsi sebagai pusat restorasi mangrove juga dapat menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat dalam mengenal fungsi dan manfaat mangrove serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga dan mengelola ekosistem tersebut secara berkelanjutan, selain itu berfungsi sebagai laboratorium alam (mangrove) dan destinasi wisata masyarakat ataun wisata ilmiah, serta menjadi destinasi ekowisata bagi masyarakat.

C. Pembahasan Proses Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan Pariwisata Hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.

1. *Face to face to dialogue* (dialog tatap muka)

Keterlibatan aktor dalam kolaborasi harus menyadari peran masing-masing untuk mengurangi stereotip yang akan berdampak pada tercapainya tujuan pembangunan secara kolaborasi. Pada tahap ini hasil wawancara penelitian akan dianalisis atau dilakukan interpretasi data untuk menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan yang telah dipaparkan pada bagian awal bahwa kolaborasi dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke akan dianalisis menggunakan teori *face to face to dialogue* (dialog tatap muka) yang dikemukakan oleh Ansell Gash, (2007) terkait dengan penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan para aktor secara kolaborasi sudah dapat maksimal atau sebaliknya. Hal ini dapat dibuktikan melalui seinsentif dan sesinergitas apa para aktor melakukan *face to face to dialongue* selama penyelenggaraan pembangunan. Dalam hal ini dapat dilihat melalui komunikasi yang efektif dan efisien, melakukan musyawarah secara formal, dan bersifat transparan dalam penyelenggaraan pembangunan secara kolaborasi. Sehingga diperlukan titik focus atau alat ukur untuk melihat sejauh mana proses kolaborasi yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

a. Komunikasi

Kurangnya kapasitas dan kemampuan pengelola dalam penyelenggaraan kolaborasi dalam pembangunan pariwisata hutan

mangrove Tongke-Tongke menjadi keharusan untuk melakukan komunikasi yaitu secara komunikasi dua arah (timbang balik) yang bersifat formal dan informal, untuk memudahkan dalam penyelesaian kolaborasi. Namun yang terjadi dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke komunikasi tidak dilakukan secara intensif, dikarenakan tidak ada penetapan jadwal tertentu yang dipatenkan sehingga tidak dapat disebutkan beberapa kali mengadakan komunikasi secara formal dan timbal balik hanya saja yang mampu terekam secara jelas terhadap apa yang disampaikan oleh responden bahwa komunikasi yang dilakukan pengelola terhadap OPD (orgaisasi perangkat daerah) terkait, hanya sampai dimulut atau diutarakan kepada peneliti saja tetapi tidak ada *action* untuk komunikasi, secara jelasnya baru melakukan komunikasi terhadap OPD (orgaisasi perangkat daerah) terkait jika terjadi permasalahan dilapangan itupun dilakukan secara informal yaitu melakukan komunikasi melalui via telepon, yang tidak diagendakan secara rutin sehingga mengakibatkan keterhambatan dalam penyelesaian pembangunan. Jika dikaitkan dengan teori Ansell dan Gash (2007) yang mengemukakan bahwa kesuksesan sebuah proses kolaborasi terlihat dan terciptanya interaksi melalui komunikasi dan menjalin hubungan yang baik antar aktor, sehingga dalam hal ini berbanding terbalik dengan hasil temuan penelitian ini bahwa para aktor kurang intensif dalam melakukan komunikasi karena lebih banyak dilakukan secara informal dan tidak optimal daripada secara formal.

Hal ini dikarenakan tidak adanya kesepakatan yang telah ditetapkan selama terlibat dalam kolaborasi dan kurangnya waktu luang para aktor untuk melakukan komunikasi secara formal karena faktor kesibukan para aktor dan tuntutan kerja, sehingga hal ini juga bertentangan dengan teori Waney dan Faules dalam Mulawarnan (2016: 40) yang menyatakan dalam penyelenggaraan pemerintah atau kolaborasi perlunya mengoptimalkan komunikasi informal sebagai penyeimbang komunikasi formal untuk melakukan obrolan-obrolan yang lebih luwes dan santai di luar tuntutan kerja. Oleh karena itu komunikasi menjadi sangat penting dalam membangun proses kolaborasi demi terwujudnya *good collaborative governance*. Sisi lain keterhambatan komunikasi dalam temuan peneliti di lapangan bahwa kurang bersinerginya pemerintah Desa terhadap kolaborasi yang dilakukan karena adanya rasa kekecewaan pemerintah Desa yang tidak lagi mencampuri urusan hutan mangrove yang dilatar belakangi oleh pemberlakuan retribusi yang tidak berpihak kepada pemerintah Desa sehingga pengelolaan dan pengembangan hutan mangrove Tongke-Tongke tidak lagi dicampuri oleh pemerintah Desa.

b. Musyawarah

Membangun hubungan yang intensif antar para aktor yang berkolaborasi seperti membuka diskusi informal, dan melakukan rapat atau pertemuan secara formal serta terstruktur untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan pariwisata dengan melibatkan para

aktor secara penuh tanpa adanya diskriminasi dan mengedepankan sikap ego secara individu sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dalam melakukan kolaborasi. Tahap awal dalam kolaborasi yang dikemukakan oleh Ansel dan Gash dalam Bagas (2016) didasarkan bahwa semua aktor yang terlibat mampu membangun konsensus atau melakukan kegiatan yang didasarkan pada kesepakatan atau kemufakatan secara bersama untuk mencegah kecurigaan dan mencegah eksplorasi keuntungan bersama oleh aktor yang berkolaborasi.

Dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan peran yang para aktor dalam pembangunan pariwisata Tongke-Tongke seperti LSM KPSDA-ACI melaksanakan perannya sebagai pengelola begitupun dengan OPD (orgaisasi perangkat daerah) melaksanakan perannya sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai bagian dari pengelola dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke. Pelaksanaan peran, fungsi serta tanggung jawab sudah dilakukan dan berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa hal yang mesti diperbaiki yaitu mengenai pertemuan yang kurang intensif seperti ketidakhadiran beberapa aktor dalam pertemuan atau rapat yang diadakan, pertemuan tidak disusun secara sistematis atau terjadwal secara paten hanya saja musyawarah baru dilakukan apabila ada permasalahan terkait pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke dan juga tidak adanya fokus-fokus masalah yang dipatenkan untuk dibahas. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan teori di atas yang digunakan dalam

menganalisis karena dalam pembangunan ini dikatakan bahwa melakukan musyawarah secara konsensus tetapi bukti nyata dan dokumentasi yang didapatkan dilapangan hanya dilakukan musyawarah apabila ada hal mendesak yang memungkinkan untuk diputuskan secara bersama seperti pemberlakuan retribusi selebihnya para aktor terkesan berkerja sendiri-sendiri.

Hal ini tentunya sangat tidak relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Sink dalam Dwiyanto (2015) yang menjelaskan bahwa dalam membangun kolaborasi sangat ditentukan dengan musyawarah secara konsensus demi pencapaian solusi dan tujuan sehingga dalam kolaborasi tidak bisa dicapai jika dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri. Hasil penelitian Nasrul Haq (2018: 3) juga menunjukkan bahwa konsensus menjadi penting karena menggambarkan interaksi minimal dua pihak. Konsensus menjadi hal yang harus dikedepankan dan bukan dilakukan secara independent atau secara individu. Hal ini terjadi karena tidak adanya perjanjian secara formal yang disepakati, dan tuntutan para aktor yang dengan kesibukan masing-masing sehingga sulit untuk saling berinteraksi dalam forum formal.

c. Keterbukaan

Pada esensinya menjalin kolaborasi harus selalu terbuka, memastikan bahwa apa yang disuarakan dan didengarkan mampu dipahami dan diterima tanpa ada diskriminasi sehingga dengan itu

semua aktor mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Sikap saling menghormati dan menghargai tidak menghalangi masing-masing untuk menyampaikan informasi dan mengemukakan pendapatnya secara terbuka. Keterbukaan segala informasi para aktor dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke ditandai dengan penyedia layanan infrastruktur dan sarana dan prasarana mendorong para aktor baik dari aktor LSM KPSDA-ACI ataupun masyarakat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pembangunan seperti yang dikeluhkan masyarakat dan pengunjung yaitu lahan parkir terlalu sempit dan tidak sebanding dengan banyaknya pengunjung sehingga kepekaan pengelola dan masyarakat yang berkolaborasi segera membukakan lahan parkir baru untuk mengatasi lahan parkir yang ada terlalu sempit dan hal ini tidak ada larangan dari pihak pemerintah yang notabeneanya ikut terlibat dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke.

Oleh karena itu keterbukaan para aktor dalam kolaborasi pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke sudah berhasil dilakukan secara menyeluruh tanpa menimbulkan deskriminasi terhadap aktor yang lain hal ini disebabkan karena sikap aktor yang selalu saling menghargai dan mementingkan kebutuhan publik diatas kepentingan pribadi. Fakta ini sesuai dengan pandangan Denhardt and Denhardt dalam Sabaruddin (2015) menjelaskan bahwa melalui partisipasi publik yang luas dalam pembuatan kebijakan maka memacu warga negara dapat membantu meningkatkan jaminan atau kepastian

bahwa suara dan kepentingan individu ataupun kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat didengarkan dan kemudian direspon pemerintah secara adil. Hal di atas juga relevan dengan temuan hasil penelitian oleh Harmawan (2016) yang mengatakan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses yang dilakukan harus ditekankan pada keterbukaan semua aktor untuk saling menghargai aktor lain terlebih kepada kepekaan aktor terhadap lingkungan kolaborasi. Oleh karena itu peneliti mempunyai asumsi bahwa keberhasilan sebuah kolaborasi dapat dilihat dan didukung dari sikap keterbukaan para aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satunya yang telah dilakukan dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.

2. *Trust Building* (membangun kepercayaan)

Saling percaya terhadap Aktor dan percaya akan sumber daya yang dimiliki mampu menciptakan keberhasilan dalam berkolaborasi. Kepercayaan harus ada sejak awal sampai berakhirnya kegiatan. Dengan adanya sikap saling membangun kepercayaan (*trust building*) sehingga akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara semua aktor. Cummings & Bromiley dalam Sabaruddin (2015) melihat bahwa kepercayaan sangat penting dalam membangun hubungan dan mempertahankan kolaborasi yang dapat dikembangkan antara aktor yang berkolaborasi melalui komunikasi, timbal balik, keselarasan tujuan, transparansi berbagai informasi dan pengetahuan yang jelas dan dengan

menunjukkan kompetensi, niat baik dan tindak lanjut. Selain teori Ansel dan Gash (2017), teori ini yang digunakan untuk menganalisis *trust building* (membangun kepercayaan) dengan menjadikan empati, loyalitas, dan kedekatan sosial sebagai tolak ukur para aktor untuk melakukan kolaborasi dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.

a. Empati

Berdasarkan hasil temuan dari lokasi penelitian terkait sikap empati para aktor dalam melakukan kolaborasi dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke, ditunjukkan secara inklusif oleh pihak pemerintah dalam bentuk membantu dalam pemberian penyuluhan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan mangrove kepada masyarakat dan terjadi umpan balik dalam pemberian bantuan dalam menjaga kelestarian mangrove seperti pemberian bibit mangrove, dan sarana dan prasana pariwisata sebagai pelengkap yang mencirikan hutan mangrove Tongke-Tongke sebagai tempat destinasi wisata.

Olehnya itu sikap empati para aktor dalam melakukan kolaborasi merupakan tindakan sukarela tidak ada tututan atau paksaan dari pihak mana pun sehingga mampu mencapai keberhasilan dalam proses kolaborasi meskipun para aktor yang melakukan kolaborasi memiliki latar belakang yang berbeda tetapi dalam hal kolaborasi masing-masing aktor mempunyai kedudukan yang sama hal ini sangat relevan dengan apa yang dikemukakan Gray & Wood yang dikutip Dwiyanto (2010: 60-61)

yaitu karakteristik kolaborasi bersifat sukarela masing-masing pihak bekerjasama untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan kapasitas sistematis dengan menggabungkan sumber daya yang mereka kuasai. Hal ini tentunya bertentangan dengan teori Aan Marie Thomson dalam bukunya Pramusinto dan Purwanto (2009: 115), yang menjelaskan bahwa proses kolaborasi dalam pembentukan sebuah kesatuan harus didasari oleh hubungan saling menguntungkan (*mutualisme*) dan adanya kesamaan tujuan dari organisasi-organisasi atau individu-individu yang memiliki sifat otonom, saling berinteraksi melalui negoisasi. Olehnya itu sikap menguntungkan tidak menghalangi para aktor untuk menunjukkan sikap empati yang dilakukan karena kolaborasi yang dilakukan telah sukses sesuai dengan kapasitas aktor yang dimiliki.

b. Loyalitas

Loyalitas merupakan kepatuhan terhadap aturan dan konsekuensi yang telah disepakati oleh aktor dalam melakukan kolaborasi. Loyalitas ditunjukkan dengan adanya aturan yang berlaku dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang wajib di patuhi oleh semua aktor yang terlibat. Berdasarkan dari hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kepada para aktor dan juga masyarakat serta hasil observasi menunjukkan bahwa aturan telah dipatuhi dan tidak ada yang aktor yang pernah melanggar meskipun para aktor yang memiliki jenjang hirarki yang lebih tinggi dalam lembaga pemerintahan. Hal ini dapat terjadi karena masing-masing aktor berada pada posisi yang sama tidak ada yang

yang memiliki fungsi sebagai komando tetapi lebih kepada fungsi koordinasi yang melakukan tugas dan tanggung jawab secara berkala. (Nasrul Haq, 2018).

c. Kedekatan Sosial

Kedekatan sosial yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan emosional terhadap para aktor yang melakukan kolaborasi. Kolaborasi dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke tidak didasarkan dengan kedekatan sosial sehingga melibatkan diri dalam kolaborasi tetapi tuntutan masyarakat terhadap pemberian penyelenggaraan publik. Hal ini dibuktikan bahwa dalam melakukan kolaborasi tidak ada perjanjian formal atau tanda tangan MoU dilakukan oleh para aktor tidak ada keuntungan yang diperoleh hanya saja sebagai sebatas abdi negara karena kapasitas yang dimiliki untuk membangun kolaborasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pemabangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai tercapai yaitu terdapat tugas, peran dan tanggung jawab yang jelas oleh masing-masing aktor.

3. *Commitmn to process* (komitmen pada proses)

Komitmen berkaitan erat dengan motivasi asli para aktor dalam kolaborasi. Masing-masing aktor harus memiliki komitmen dan keinginan yang kuat menyelesaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan kesepakatan yang telah diputuskan secara bersama. Jika dikaitkan dengan teori Harmawan (2016) mengemukakan

bahwa tingkatan komitmen terhadap kolaborasi adalah variabel utama dalam menjelaskan sukses atau tidaknya sebuah kolaborasi, selain itu komitmen bergantung pada pengakuan bersama serta pencapaian yang diperoleh selama melakukan kolaborasi. yang merupakan cara terbaik untuk menghormati dan perspektif dan kepentingan aktor lain mampu memperkuat keterlibatan antar aktor. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa meskipun tidak ada pengakuan bersama secara inklusif yang disepakati bersama pembangunan pariwisata tetap berjalan sukses hal ini dapat dilihat dari apresiasi dan hasil evaluasi (monitoring) yang dilakukan.

a. Pengakuan bersama

Pengakuan bersama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah terjadinya kesepakatan antar para aktor yang berkolaborasi serta peran dan tanggung jawab yang dilakukan dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke–Tongke Kabupaten Sinjai. Dalam hal ini pengakuan para aktor menyatakan bahwa tidak ada dokumen kesepakatan yang tertulis atau *job description* yang disepakati dan mengikat tetapi diikat oleh adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 5 Penyelenggaraan usaha kepariwisataan kabupaten Sinjai, dan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai. sedangkan dari pihak OPD (organisasi perangkat daerah) diinternalisasi oleh adanya rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang

mengharuskan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk ikut andil dalam penyelenggaraan pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kolaborasi tidak mesti didasarkan oleh perjanjian bersama tetapi yang terpenting adalah keinginan dan kemampuan dalam melakukan kolaborasi dan juga para aktor yang melakukan kolaborasi diarahkan untuk membangun interaksi dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan Sabaruddin (2015: 103) yang mengatakan bahwa kolaborasi yang dilakukan yang melibatkan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat meski tidak secara formal namun kolaborator memiliki tanggung jawab untuk berbagai sumberdaya.

Hal ini juga sangat relevan dengan pandangan Keban dalam bukunya Sabaruddin (2016: 79-80) yang menjelaskan bahwa untuk membangun kemampuan dan komitmen birokrasi diperlukan empat *leverage point*, salah satunya adalah proses internalisasi atau institusional rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) sehingga para elit birokrasi memiliki *unity of purpose*, niat dan komitmen bersama NKRI.

b. Apresiasi

Apresiasi adalah pemberian penghargaan terhadap suatu karya nyata yang mengakibatkan seseorang menjadi termotivasi dan komitmen dalam bekerja. selama pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke sering mendapat berbagai apresiasi dan penghargaan dari tingkat lokal sampai ke tingkat nasional seperti penerimaan kalpataru dalam kategori

hutan terbaik di Sulawesi Selatan dan masuk sebagai 25 besar pada ajang nominasi sebagai hutan mangrove terbaik berbasis masyarakat dari 150 Kabupaten/Kota. Hal ini mampu memacu kemampuan dan kinerja LSM KPSDA-ACI dalam terlibat dalam kolaborasi untuk mengembangkan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke. Penghargaan yang diterima merupakan inventaris untuk Kabupaten Sinjai dan juga sebagai motivasi untuk komitmen dalam membangun pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. sebagaimana yang dijelaskan oleh Einsenberg & Rhodes dalam Suhartini (2018) menyatakan bahwa apresiasi adalah komitmen yang pada akhirnya akan mendorong seseorang untuk berusaha menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan meningkatkan harapan bahwa performa akan diperhatikan dan dihargai.

c. Monitoring

Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa monitoring yang dilakukan dengan adanya dokumen rencana pembangunan dan proposal anggaran pembangunan yang diarsipkan oleh aktor dari pihak pemerintah, dan proses monitoringnya dilakukan secara berkala dan insentif selama proses pembangunan yaitu 3 kali dalam 6 bulan, dan pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari unit kerja paling bawah sampai pucuk pimpinan organisasi; dari penanggungjawab kegiatan kepada penanggungjawab program, namun yang menjadi kegagalan dalam proses kolaborasi ini tidak ada supervisor lapangan

yang mengawasi jalanya kolaborasi sehingga rendahnya kualitas diseminasi dokumentasi pelaporan sehingga mengalami keterlambatan dalam melakukan monitoring.

4. *Shared understanding* (pemahaman bersama)

Pemahaman bersama merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Pemahaman bersama juga biasa dimanifestasikan pada kesepakatan yang relevan untuk mengatasi masalah (Ansel dan Gash dalam Handayani, 2016). Dalam penelitian ini terdapat tiga indikator dalam hal mencapai pemahaman bersama (*Shared Understanding*) yaitu sebagai berikut :

a. Kesamaan visi dan misi

Hasil temuan peneliti di lapangan dengan beberapa narasumber dan hasil observasi peneliti, dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke tidak terdapat kesamaan visi dan misi tetapi hanya ada visi misi tentang setiap OPD (orgaisasi perangkat daerah) yang harus dicapai. Meskipun demikian hal ini tidak mengurangi kemampuan para aktor untuk melakukan kolaborasi terbukti dengan progress yang dilakukan para aktor sampai saat ini. Adapun hambatan sehingga tidak ada visi misi yang sama diakibatkan karena tidak adanya perjanjian formal yang mengikat sehingga perumusan visi dan misi sulit untuk dilakukan. Oleh karena melalui penelitian ini melahirkan sebuah konsep baru dalam kolaborasi bahwa keterlibatan pemerintah, swasta, masyarakat dalam kaitanya dengan kolaborasi tidak selalu didasarkan

pada legitimasi yuridis sebagai basis formal dalam kolaborasi. Fenomena berbanding terbalik ini dengan pandangan yang diperoleh dalam penelitian-penelitian sebelumnya bahwa kolaborasi itu harus didasarkan pada kontrak kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian secara formal. Seperti yang dikemukakan dalam hasil penelitian Maharani (2016 : 1) bahwa kolaborasi sebagai suatu proses dilakukan dengan dengan dasar bentuk kerjasama dengan adanya perjanjian tertulis yang resmi yang digunakan untuk jangka waktu tertentu, memenuhi syarat-syarat kolaborasi yang meliputi visi misi yang sama, tentang pengetahuan secara relevan yang diperlukan untuk mengatasi masalah.

b. Kesamaan tujuan

Dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke terdapat kesamaan tujuan dalam kolaborasi yang dilakukan oleh para aktor yakni dari masyarakat, pemerintah, dan swasta harus sejalan yang hendak dicapai, tentunya kolaborasi dalam hal pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai mempunyai tujuan yang sama yakni menjadi menjadikan hutan mangrove Tongke-Tongke sebagai kawasan pariwisata yang mampu meningkatkan sumber daya yang dimiliki yakni sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya finansialnya. Hasil temuan penelitian berkaitan erat dengan teori Aan Marie Thomson dalam bukunya Pramusinto dan Purwanto (2009: 115) yang menyatakan bahwa sebuah proses kolaborasi yang dilakukan merupakan

pembentukan sebuah kesatuan yang didasari oleh adanya kesamaan tujuan, hubungan saling menguntungkan (*mutualisme*) dari pihak-pihak aktor, organisasi-organisasi atau individu-individu yang memiliki sifat otonom, dan saling berinteraksi melalui negoisasi.

c. *Common Objectives* (obyektivitas umum)

Kolaborasi yang dilakukan bersifat objektif tanpa adanya pandang bulu terhadap sesama aktor dalam melakukan berkolaborasi. OPD (organisasi perangkat daerah) melaksanakan tugas, dan perannya sebagai fasilitator sedangkan untuk pengelolaan dilimpahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan aktor LSM KPSDA-ACI karena mereka yang lebih paham dalam terkait pengelolaan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabuapten Sinjai.

5. *Intermediate outcomes* (dampak sementara)

Berdasarkan hasil temuan dari lokasi penelitian dan observasi di lapangan dapat diperoleh bahwa kolaborasi aktor dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke menimbulkan dampak positif dampak negatifnya. Adapun dampak positifnya adanya kolaborasi aktor dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

- a. Mangrove yang tumbuh subur di Daerah Tongke-Tongke telah meningkatkan popularitas daerah sehingga banyak pengunjung baik pejabat pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten), mahasiswa, peneliti

dari lembaga penelitian maupun Perguruan Tinggi dari dalam maupun luar negeri datang ke Kabupaten Sinjai.

- b. Mangrove kemudian telah menjadi ikon wilayah dan menjadi komoditi pemersatu masyarakat serta mampu menciptakan ladang usaha baru bagi masyarakat sehingga berdampak pada meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan di daerah destinasi wisata. Hal ini merupakan *outcome* hasil sementara yang dicapai untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi,

Sedangkan dampak negatif dari adanya kolaborasi aktor dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai karena tidak adanya perjanjian formal dan *job description* secara bersama yang dirumuskan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai penelitian yang dilakukan penulis dengan judul kolaborasi aktor dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan:

1. Proses *face to face to dialogue* (dialog tatap muka) dalam pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke, sudah dilakukan namun belum berjalan secara maksimal dikarenakan tidak ada jadwal pertemuan yang ditetapkan secara terstruktur.
2. Proses *trust building* (membangun kepercayaan), dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke, semua aktor yang terlibat mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, telah berhasil menunjukkan keterbukaannya dalam hal menyampaikan informasi, saling bersinergi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dengan potensi yang dimiliki, serta mematuhi segala aturan yang ada ataupun aturan yang telah disepakati bersama, sehingga berbagai apresiasi pun yang terus diraih oleh aktor selama dalam proses kolaborasi.
3. Komitmen pada proses (*commitmn to the process*), aktor yang terlibat dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke - Tongke mampu konsisten dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya baik setelah dilakukan pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke meskipun dalam pembangunan dan

perkembangan hutan Mangrove Tongke - Tongke tidak mempunyai aturan baku yang disepakati oleh semua aktor sebelumnya.

4. Pemahaman bersama (*shared understanding*), para aktor dalam pembangunan hutan Mangrove Tongke-Tongke mampu memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing meskipun visi misi tidak sama akan tetapi tujuan dari pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tngke-Tongke Kabupaten Sinjai yaitu menjadikan hutan Mangrove sebagai destinasi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat khususnya yang bertempat di desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.
5. Dampak sementara (*intermediate outcomes*), yaitu mangrove yang tumbuh subur di daerah Tongke - Tongke telah mampu meningkatkan popularitas daerah sehingga banyak pengunjung baik pejabat pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten), mahasiswa, peneliti dari lembaga penelitian maupun Perguruan Tinggi dari dalam maupun luar negeri datang ke Kabupaten Sinjai. Mangrove kemudian telah menjadi ikon wilayah dan menjadi komoditi pemersatu masyarakat serta mampu menciptakan ladang usaha baru bagi masyarakat sehingga berdampak pada meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, dengan melihat prospek kedepan maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pembagunan hutan mangrove Tongke-Tongke diperkuat dengan adanya kesepakatan yang baku sebagai bentuk kolaborasi, yang mengandung isi mengenai tugas dalam pembangunan Hutan Mangrove Tongke-Tongke. Sehingga diharapkan mampu menjadikan pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke lebih komunikatif lagi dalam menyampaikan aspirasinya, sehingga aspirasi dari semua aktor tanpa terkecuali dari masyarakat hutan mangrove Tongke-Tongke dapat terserap dengan baik, serta agar lebih terstruktur tugas dan tanggung jawab masing-masing aktor yang terlibat.
2. Sebaiknya terkait teknis dan periode pelaksanaan dan pembagian tugas diperjelas serta penyelenggaraan pertemuan secara formal dilakukan secara maksimal, hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan pertemuan rutin yaitu satu bulan sekali sekaligus melakukan pembagian tugas.
3. Perlunya kontrol secara intens terhadap pembangunan hutan Mangrove Tongke-Tongke seperti penilaian hasil kerja masing-masing aktor oleh pemerintah pusat, hendaknya melakukan kontrol terhadap hasil pertemuan yang dilakukan.
4. Sebaiknya jalur koordinasi tetap ada agar membangun tetap membangun kolaborasi harus tetap saling bersinergi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansel, Chris, dan Gash, Alison, 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.18, hal. 543-571. Diakses pada tanggal 27 Maret 2018, dari Oxford Journals (JPART)
- Antariska, Basuki, 2016. *Kebijakan Pembangunan Kepariwisata*. Malang: Intrans Publishing
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Manajemen Pelayanan Public, Inklusif, Dan Kolaborasi*. Yogyakarta: Gajamada Unversitas Press
- Emerson, dkk. 2011. *An Integrative Framework for Collaborative Governance*. Journal of Public Administration Research and Theory Volume 22 Issue 1 1 January 2012 Pages 1 sd 29
- Fachry, E. Mardiana, dkk., 2010. *Peranan Aku Cinta Indonesia Terhadap Konservasi Hutan Mangrove Tongke - Tongke Kabupaten Sinjai*. Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, ISSN : 1829-8397 Volume 5 No. 2.
- Fairuza, Mia. 2017. *Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi)*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 5, Nomor 3, September – Desember 2017, ISSN 2303-341X
- Handayani, N. Dwi, 2016. *Kolaborasi Antarorganisasi dalam Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas di Kota Makassar*. Tesis, Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Haq, Nasrul, 2018. *Nilai Dasar Collaborative Governance dalam Studi Kebijakan Publik*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Harmawan, N. Bagus, 2016. *Collaborative Governance dalam program Pengembangan Ilmu Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival*. Skripsi Pogram Studi Ilmu Administrasi Negara Fakults Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
- Kodri K. Ghufuran, 2012. *Ekosistem Mangrove Potensi, Fungsi, dan Pengelolaan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Kurniawan, Fandy, dkk. 2015. *Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta Wisata Kabupaten Jombang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.1 Hal. 47-54
- Maharani, K Endang. 2016. *Kolaborasi Antar-Pelaksana pada Penataan dan Pembinaan Toko Modern di Kota Surakarta*. (Tesis) Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Mahrik, Ardillah. 2016. *Strategi Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisatawan dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Kabupaten Sinjai*. Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Majid, Ilham. 2016. *Konservasi Hutan Mangrove di Pesisir Pantai Kota Ternate Terintegrasi dengan Kurikulum Sekolah*. Jurnal Bioedukasi Vol 4 No 2 Maret 2016.
- Mulawarman, Krisna, dkk. 2016. *Komunikasi Organisasi pada Dinas Perijinan Kota Yogyakarta untuk Meningkatkan Pelayanan*. Jurnal Makna Vol. 5 No. 1 2016
- Nirwandar, Sapta, 2012. *Pembangunan Sektor Pariwisata di Era Otonomi Daerah*. www.kemenpar.go.id. Diakses pada tanggal 28 Maret 2018, Pukul 07 : 53 WITA.
- Nugroho, Iwan. 2015. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pramusinto, Agus, dkk, 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Rahmawati, Aulia, dkk, 2016. *Kolaborasi Antar Daerah dalam Penyelesaian Konflik antar Nelayan di Perairan Pacitan, Wonogiri dan Gunungkidul*. Tesis Magister Administrasi Publik Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Raman, dkk., 2015. *Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol V, No. 2, Hal. 189-201)
- Sabaruddin, Abdul, 2015. *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik, Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Santoso, Pandji, 2009. *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- _____, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Udiani, Nuni, 2016. *Kolaborasi Perencanaan (Studi Kasus Pengembangan UMKM Di Kabupaten Maros)*. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
- Wahyudiantik, Yuyun. 2013. *Collaborative Governance Pengolahan Limbah Sapi*. Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
- Wijaya D.C., 2015. *Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Pelaksanaan Program Kartu Intensif Anak di Kota Surakarta*. Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Soaial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
- Wijaya S.F., 2015. *Kolaborasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dalam Pengembangan Kampung Batik Laweyan*. Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Soaial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan Kabupaten Sinjai
- Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai
- Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No 19 tahun 2004 Tentang Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 - 2025
- Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, 2018. *Kunjungan Pariwisata Kabupaten Sinjai*. Kabupaten Sinjai

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1.

TRANSKIP WAWANCARA

Indikator	Pertanyaan
Dialog Antar Muka (<i>face to face dialogue</i>)	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang keberadaan pariwisata Hutan Mangrove Tongke – tongke Kabupaten Sinjai?
	Apakah Bapak/Ibu terlibat langsung dalam pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke – tongke Kabupaten Sinjai?
	Siapa saja aktor yang terlibat dalam pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke – Tongke Kabupaten Sinjai?
	Bagaimana cara Bapak/Ibu menjalin hubungan komunikasi yang efektif antar aktor yang terlibat dalam pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke – Tongke?
	Apa saja kontribusi Bapak/Ibu berikan dalam pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke – tongke?
	Apa saja tugas dan tanggung jawab Bapak/Ibu dalam pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke – Tongke Kabupaten Sinjai?
	Bagaimana awal mulanya Bapak/Ibu membangun kesepakatan dengan para aktor terkait pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke-tongke ?
Membangun Kepercayaan (<i>Trust Building</i>)	Bagaimana cara Bapak/Ibu Membangun Kepercayaan terhadap aktor yang terlibat dalam Pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke-tongke?
	Siapakah aktor yang terlibat secara penuh dalam pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke – Tongke Kabupaten Sinjai?
	Seberapa besar Bapak/Ibu memahami tugas dan tanggung jawab Bapak/Ibu dalam Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-tongke?
	Seperti apa isi kebijakan tentang keterlibatan Bapak/Ibu dalam pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-tongke Kabupaten Sinjai?
	Apa saja isi kebijakan tentang pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke-tongke Kabupaten Sinjai?
	Siapakah yang mempunyai wewenang secara penuh dalam pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke – tongke Kabupaten Sinjai?
	Apa saja Permasalahan yang dihadapi Bapak/Ibu dalam pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke-tongke?

	Bagaimana jalur koordinasi dalam pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke-tongke ?
	Bagaimana sikap Bapak/Ibu dalam memberi pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya pembangunan pariwisata di suatu daerah?
Komitmen pada Proses (<i>Commitmn to the process</i>)	Bagaimana Bapak/Ibu menjaga konsistensi atau berkomitmen dalam pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke-tongke Kabupaten Sinjai?
	Apa motivasi Bapak/Ibu sehingga terlibat dalam pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke-tongke Kabupaten Sinjai?
	Bagaimana sikap pertanggung jawaban Bapak/Ibu terhadap peran yang ambil dalam Pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke-tongke?
Pemahaman Bersama (<i>Shared Understanding</i>)	Apakah visi misi Bapak/Ibu terlibat dalam pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke-tongke Kabuapten Sinjai?
	Apakah tujuan Bapak/Ibu terlibat dalam pembangunan pariwisata Hutan Mangrove tongke-tongke Kabuapten Sinjai?
	Apakah visi dan misi umum terkait pembangunan pariwisata hutan mangrove tongke-tongke kabupaten Sinjai?
Dampak Sementara (<i>Intermediate Outcomes</i>)	Apa saja dampak yang ditimbulkan dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-tongke Kabupaten Sinjai?
	Apa saja hasil yang dicapai dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove tongke-tongke Kabupaten Sinjai?
	Apakah feedback yang Bapak/Ibu dapatkan dalam pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-tongke Kabuapten Sinjai?
	Bagaimana cara Bapak/Ibu untuk tetap mempertahankan atau meningkatkan eksistensi pariwisata hutan Mangrove tongke-tongke Kabupaten Sinjai?

IDENTITAS INFORMAN :

1. Nama :
2. Umur :
3. Kualifikasi Akademik :
4. Jenis Kelamin :
5. Waktu Wawancara :

Lampiran 2.

Dokumentasi Penelitian



Informan Dinas Perikanan



Informan DISPARBUD



Informan LSM KPSDA - ACI



Informan DISPARBUD



Informan Masyarakat



Informan Kepala Desa



Informan DISKAN



Pertemuan Aktor



Pnanaman Mangrove



Karcis Pengunjjung



Tampak depan Hutan Mangrof
Tongke – Tongke



Café terapung



Gazebo



Sovenir Wisata



Speat boat KKP



Deain Pembangunan bertahap



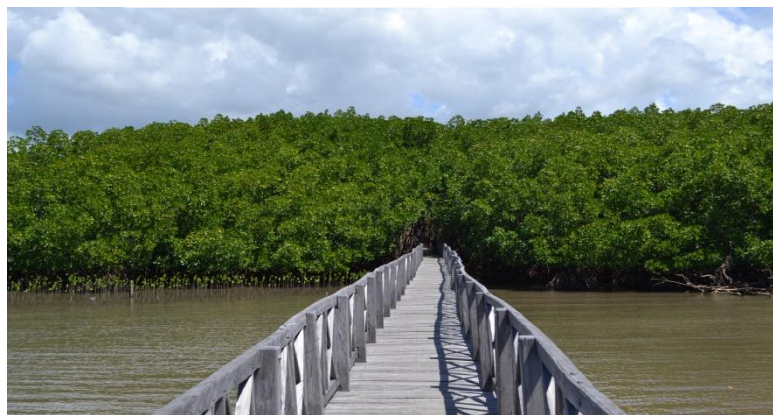
Himbauan



Kunjungan wisatawan



Keindahan Hutan Mangrove Tongke
- Tongke



Keindahan Hutan Mangrove Tongke
- Tongke



Keindahan Hutan Mangrove Tongke
- Tongke



Fasilitas Hutan Mangrove Tongke – Tongke



Café terapung



Masyarakat dan aktivitasnya di kawasan hutan Mangrove Tongke – Tongke

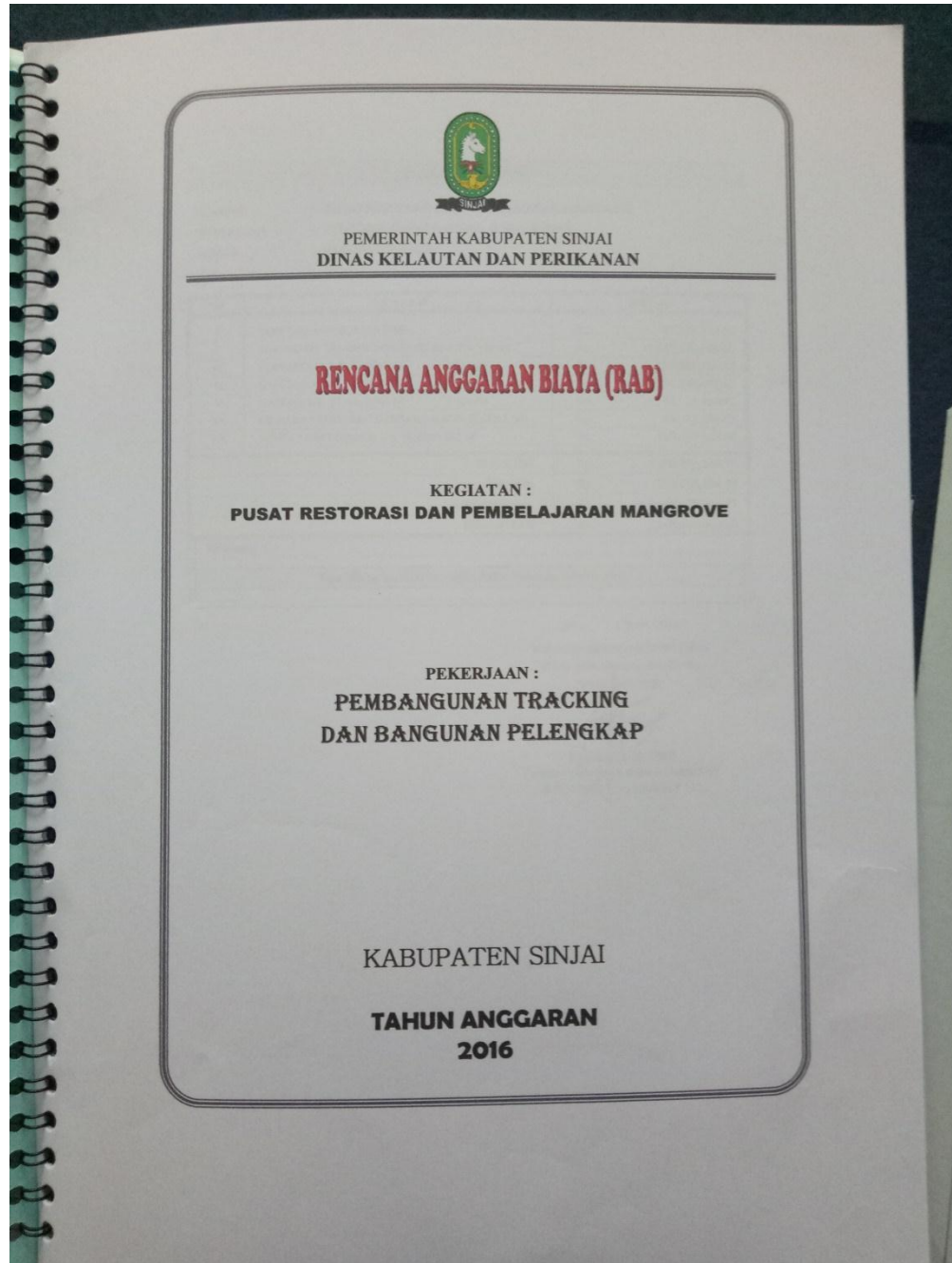


Are Parkir Kawasan Hutan mangrove Tongke



Tahap pembibitan tanaman Mangrove

Lampiran 3. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan

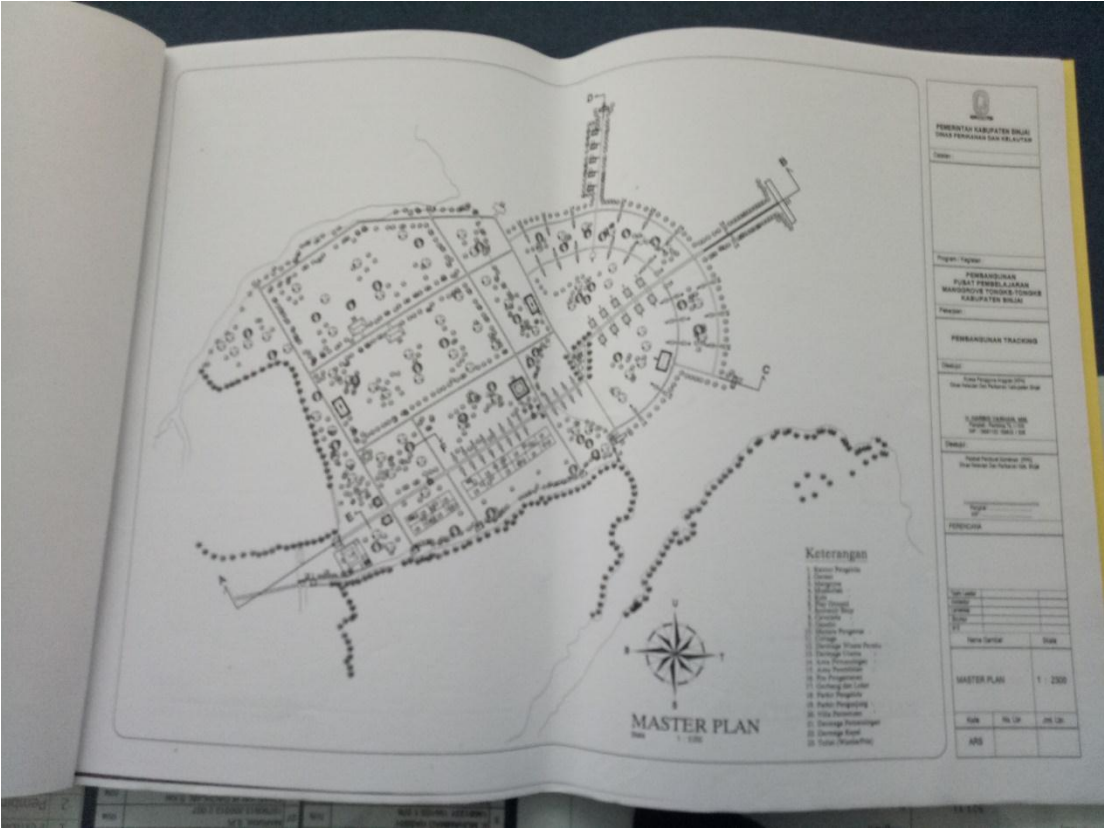


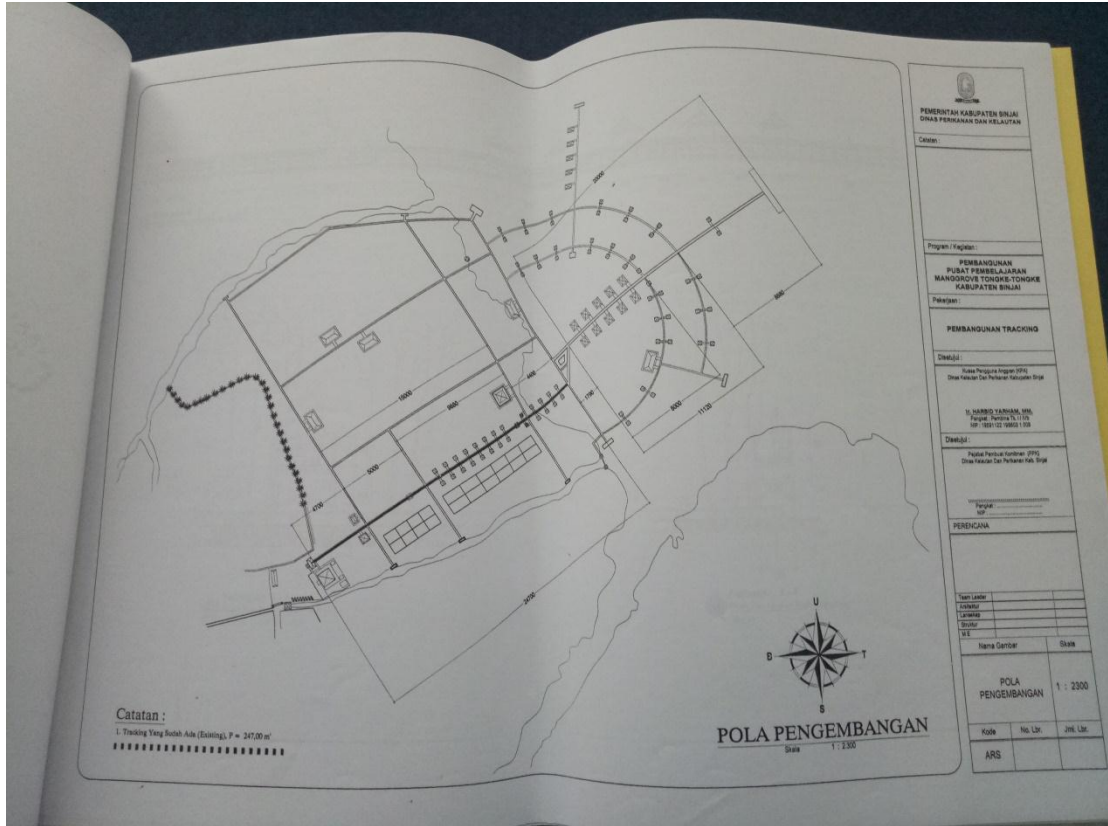
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PROYEK : PUSAT RESTORASI DAN PEMBELAJARAN MANGROVE
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TRACKING & BANGUNAN PELENGKAP
 LOKASI : KABUPATEN SINJAI
 T.A : 2016

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	KODE ANALISA	SAT	HRG SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA
						(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
I. PEKERJAAN PENDAHULUAN		1.00	Unit			Rp. 98,278,337.50
1	Pek. Pengukuran dan Pas. Bouwplank	450.00	A. 2.2.1.4	m'	86,077.50	Rp. 38,734,875.00
2	Pembersihan Lokasi Kerja +	450.00	A. 2.2.1.9	m'	23,143.75	Rp. 10,414,687.50
3	Air Kerja	1.00	-	LS	500,000.00	Rp. 500,000.00
4	Pembuatan Papan Proyek	1.00	-	LS	500,000.00	Rp. 500,000.00
5	Pembuatan As Build Drawing	1.00	-	LS	3,000,000.00	Rp. 3,000,000.00
6	Mobilisasi dan demobilisasi	1.00	-	Ls	15,801,575.00	Rp. 15,801,575.00
7	Administrasi dan Dokumentasi Proyek	1.00	-	LS	2,500,000.00	Rp. 2,500,000.00
8	Pembangunan Direksi Keet	12.00	A.2.2.1.5	M2	2,235,600.00	Rp. 26,827,200.00
					Jumlah	Rp. 98,278,337.50
II. PEKERJAAN TRACKING KAYU KELAS I		450.00	m'			Rp. 1,687,175,349.35
1	Galian Tanah Lumpur	605.50	A. 2.3.1.6	M3	103,068.75	Rp. 62,408,128.13
2	Pek. Tiang Tracking Buis Beton dia 30cm	2,422.00	-	M'	517,586.25	Rp. 1,253,593,897.50
3	Spesi/Cor isi Tiang Buis Beton	85.56	A. 4.1.1.7	M3	1,216,855.25	Rp. 104,110,667.15
Pek. Tracking L=1,20 m Kayu Kls I, Panjang =2.174 m'						
	- Tiang Tracking 10x10 cm	43.52	-	M3	22,451,450.00	Rp. 977,087,104.00
	- Balok Skor 5x10 cm	27.18	-	M3	22,451,450.00	Rp. 610,118,153.75
	- Balok Lantai 6x12 cm	36.58	-	M3	22,451,450.00	Rp. 821,168,968.21
	- Lantai Papan 3x20 cm	78.26	-	M3	22,451,450.00	Rp. 1,757,140,282.80
	- Reiling Kayu 5x5 cm / 5x10 cm	57.61	-	M3	22,451,450.00	Rp. 1,293,450,485.95
	- Angker Mur/Baut 20 mm	492.00	-	Bh	49,809.38	Rp. 24,506,212.50
	- Mur/Baut 10 mm	492.00	-	Bh	44,059.38	Rp. 21,677,212.50
					Jumlah	Rp. 8,150,931,576.63
PEKERJAAN TRACKING, L = 1,20 M'		2,174.00	M'			Rp. 3,749,278.55
VIII. PLAYGROUP, UK. (4,00x6,00)		1.00	UNIT			Rp. 156,846,254.47
1	Galian Tanah Lumpur	2.50	-	m3	103,068.75	257,671.88
2	Pek. Tiang Tracking Buis Beton dia 30cm	10.00	-	m'	517,586.25	5,175,862.50
3	Spesi/Cor isi Tiang Buis Beton	0.71	-	m3	1,216,855.25	859,708.23
4	Pek. Tracking L=2,00 m Kayu Kls I, Panjang =246 m'					
	- Tiang Tracking 10x10 cm	0.64	-	m3	22,451,450.00	14,368,928.00
	- Balok Skor 5x10 cm	0.30	-	m3	22,451,450.00	6,735,435.00
	- Balok Lantai 6x12 cm	0.29	-	m3	22,451,450.00	6,466,017.60
	- Lantai Papan 3x20 cm	0.86	-	m3	22,451,450.00	19,195,989.75
	- Reiling Kayu 5x5 cm / 5x10 cm	0.66	-	m3	22,451,450.00	14,916,743.38
	- Angker Mur/Baut 20 mm	20.00	-	bh	49,809.38	996,187.50
	- Mur/Baut 10 mm	20.00	-	bh	44,059.38	881,187.50
5	Pekerjaan Atap					
	- Kuda-Kuda Kayu Kls. I, Uk. 6x12 cm	0.34	-	m3	19,864,525.00	6,693,550.34
	- Balok Gording Kls. I, Uk. 5x10 cm	0.43	-	m3	16,111,782.50	6,903,898.80
	- Rangka Atap (reng + kaso) Kls. I	63.96	-	m2	905,136.25	57,892,514.55
	- Penutup Atap Onduline	63.96	-	m2	124,292.61	7,949,755.03
	- Pemasangan Listplank 2x2/30, Kls. I	27.20	-	m'	176,553.75	4,802,262.00
	- Nok Atap	16.40	-	m'	167,716.00	2,750,542.40
					Jumlah	Rp. 156,846,254.47
X. CAFETERIA, UK. (8,00x14,00)		1.00	UNIT			Rp. 504,387,432.63
1	Galian Tanah Lumpur	10.00	-	m3	103,068.75	1,030,687.50
2	Pek. Tiang Tracking Buis Beton dia 30cm	40.00	-	m'	517,586.25	20,703,450.00
3	Spesi/Cor isi Tiang Buis Beton	2.83	-	m3	1,216,855.25	3,438,832.94

Lampiran 4. Gambar Recana Pembangunan





PEMERINTAH KABUPATEN BINJAI
DINAS PERKAWAN DAN KELAUTAN

Catatan:

Program / Kegiatan:

**PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBELAJARAN
MANGROVE TONGKONGKE
KABUPATEN BINJAI**

Pelaksanaan:

PEMBANGUNAN TRACKING

Direksi:

Kantor Pengantar Program (KPP)
Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Binjai

11. HANIBO YAHYAN, IRI
Pangkat: Pembina, N. 1.136
NIP. 1959123 198501 1 008

Direksi:

Pejabat Pembuat Komando (PPK)
Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Binjai

Pangkat: IRI

PERENCANA

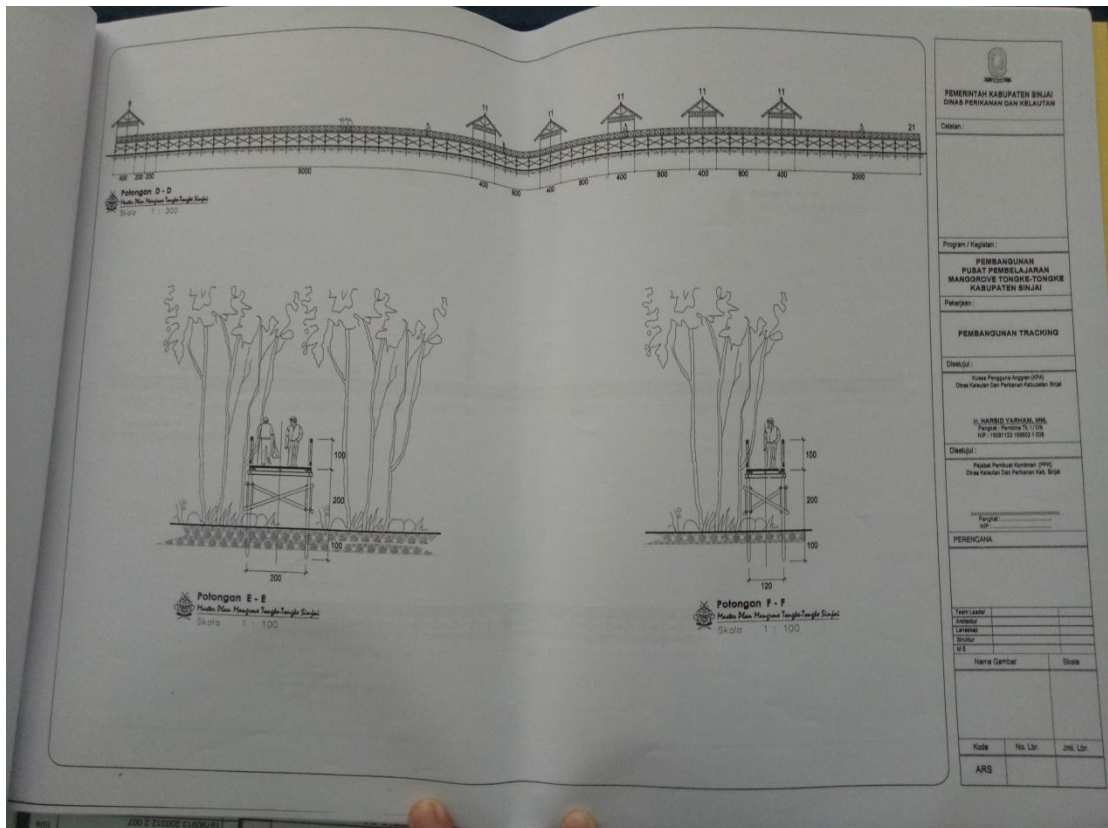
Tahun Kerja: _____
Lokasi: _____
Lampiran: _____
Struktur: _____
U.T: _____

Nama Gambar: _____ Skala: _____

**POLA
PENGEMBANGAN** 1 : 2300

Kode: _____ No. Ltr: _____ Jml. Ltr: _____

ARS



PEMERINTAH KABUPATEN BINJAI
DINAS PERKAWAN DAN KELAUTAN

Catatan:

Program / Kegiatan:

**PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBELAJARAN
MANGROVE TONGKONGKE
KABUPATEN BINJAI**

Pelaksanaan:

PEMBANGUNAN TRACKING

Direksi:

Kantor Pengantar Program (KPP)
Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Binjai

11. HANIBO YAHYAN, IRI
Pangkat: Pembina, N. 1.136
NIP. 1959123 198501 1 008

Direksi:

Pejabat Pembuat Komando (PPK)
Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Binjai

Pangkat: IRI

PERENCANA

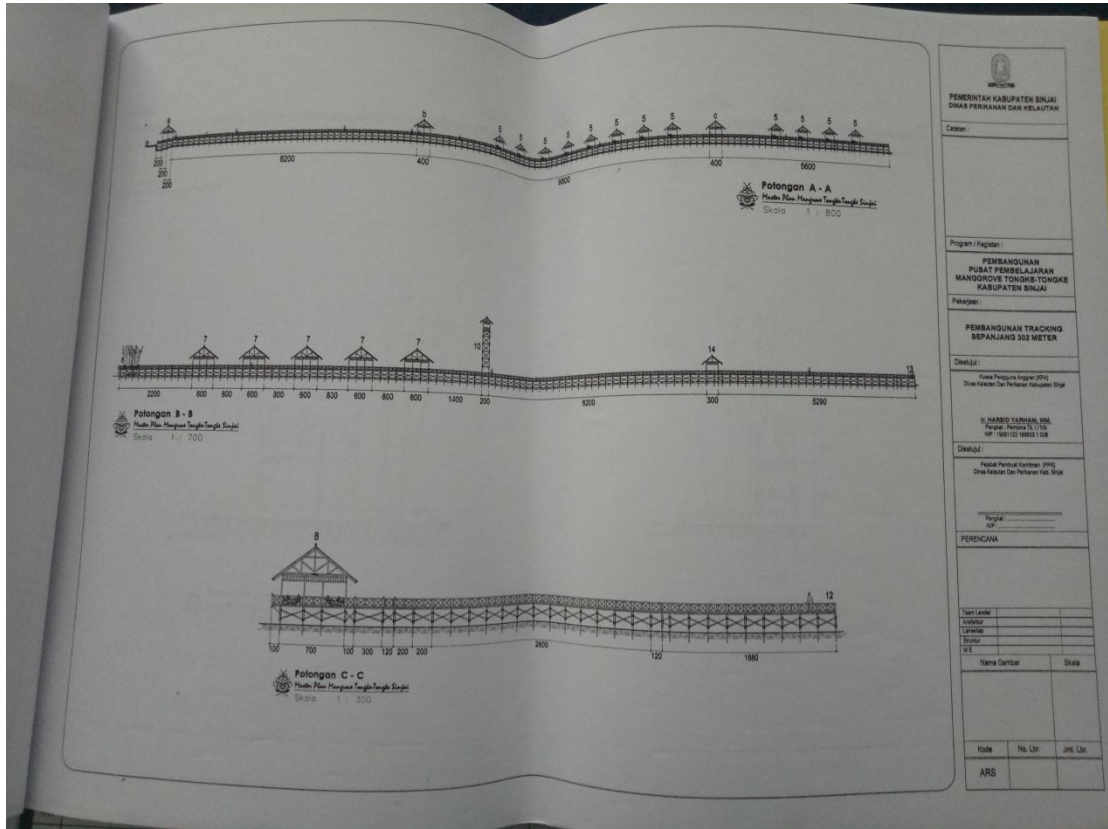
Tahun Kerja: _____
Lokasi: _____
Lampiran: _____
Struktur: _____
U.T: _____


Nama Gambar: _____ Skala: _____

**POLA
PENGEMBANGAN** 1 : 2300

Kode: _____ No. Ltr: _____ Jml. Ltr: _____

ARS




PEMERINTAH KABUPATEN SIJAU
DINAS PERKANTORAN DAN KELAUTAN

Catatan

Program / Kegiatan

PEMBANGUNAN
PULAU PEMBELAJARAN
MANGROVE TONGKE-TONGKE
KABUPATEN SIJAU

Pelaksanaan

PEMBANGUNAN TRACKING
SEPAJANG 333 METER

Dibuat di

Kuala Pangkajene Arung (KPA)
Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sijau

Dibuat oleh

Ir. HANIS YUSRIANA, S.T.
Pangkat: Perwira T.K. 1.125
NIP. 198112100831108

Dibuat oleh

Praktik Perencanaan (PPN)
Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sijau

Perencana

Tipe Lembar

Uraian

Uraian

Uraian

M.E.

Nama Gambar

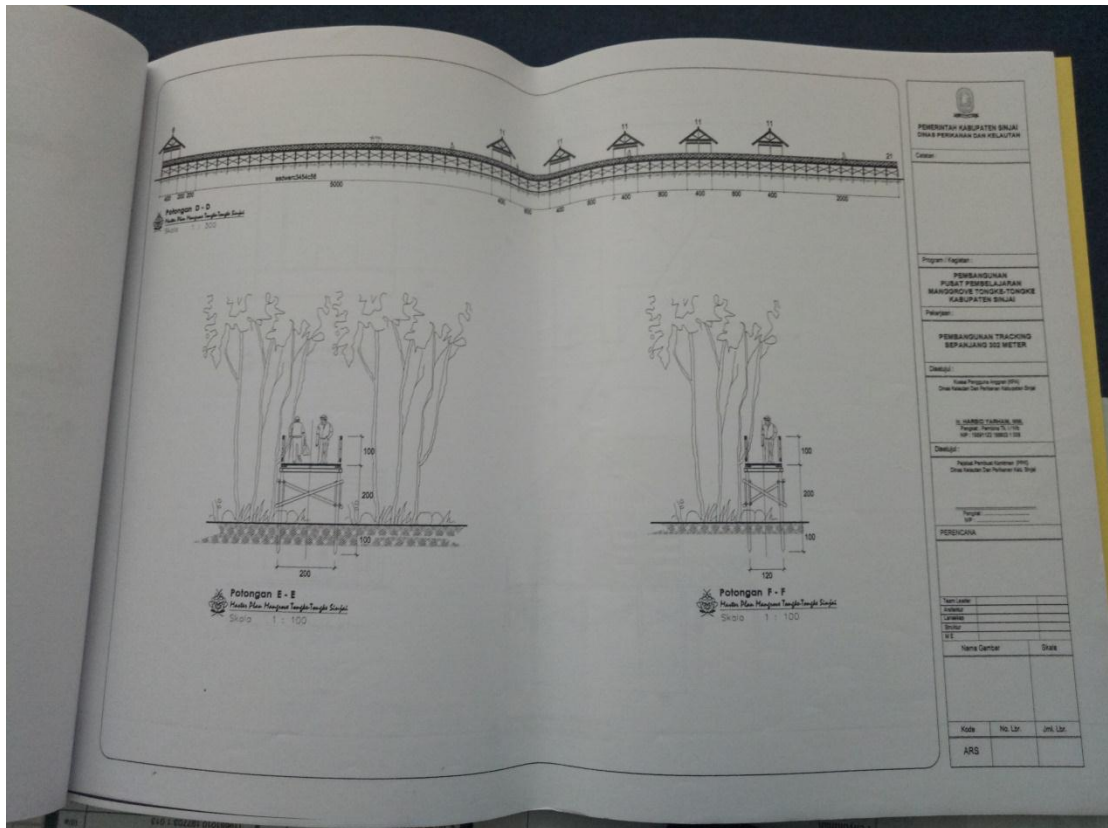
Skala


Kode

No. Ltr.

Jml. Ltr.

ARS




PEMERINTAH KABUPATEN SIJAU
DINAS PERKANTORAN DAN KELAUTAN

Catatan

Program / Kegiatan

PEMBANGUNAN
PULAU PEMBELAJARAN
MANGROVE TONGKE-TONGKE
KABUPATEN SIJAU

Pelaksanaan

PEMBANGUNAN TRACKING
SEPAJANG 333 METER

Dibuat di

Kuala Pangkajene Arung (KPA)
Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sijau

Dibuat oleh

Ir. HANIS YUSRIANA, S.T.
Pangkat: Perwira T.K. 1.125
NIP. 198112100831108

Dibuat oleh

Praktik Perencanaan (PPN)
Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sijau

Perencana

Tipe Lembar

Uraian

Uraian

Uraian

M.E.

Nama Gambar

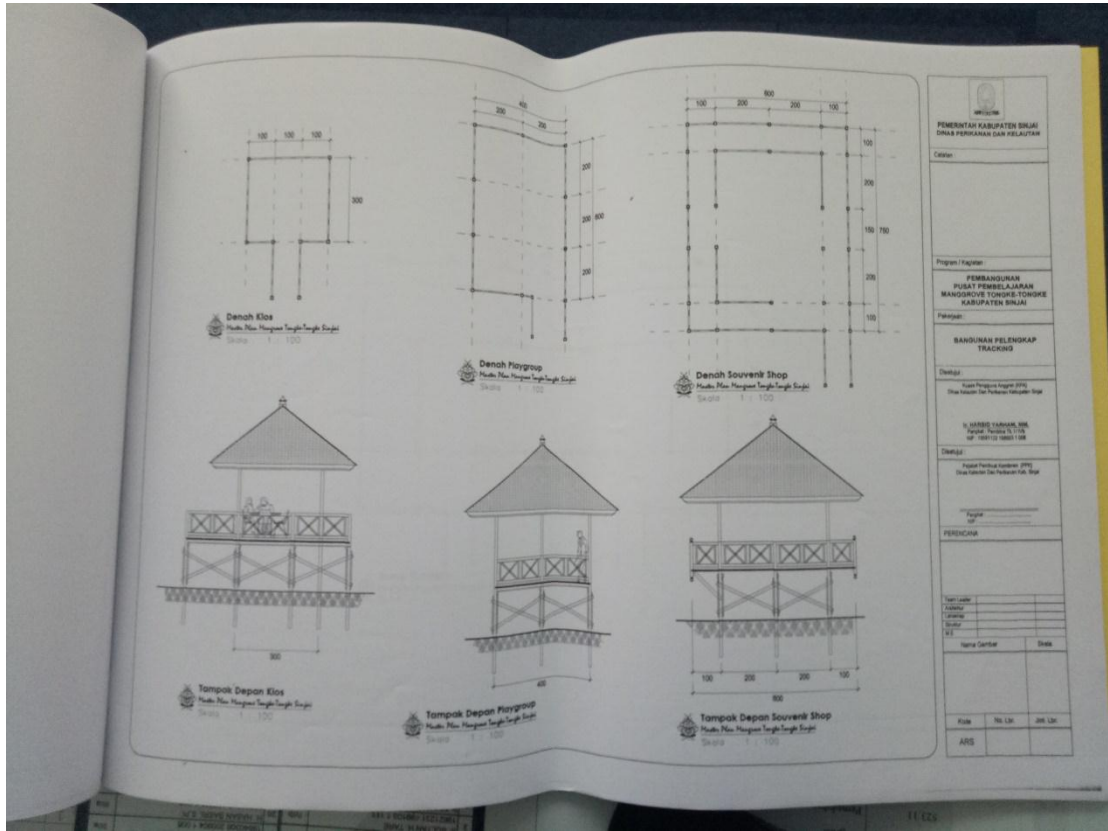
Skala

Kode

No. Ltr.

Jml. Ltr.

ARS



Logo of Kabupaten Simala
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALA
 DINAS PERKAWASAN DAN PELALUTAN

Catatan

Program / Kegiatan
PERENCANAAN
PUSAT PERBELAJARAN
MANGROVE TONGKOL TONGKOL
KABUPATEN SIMALA

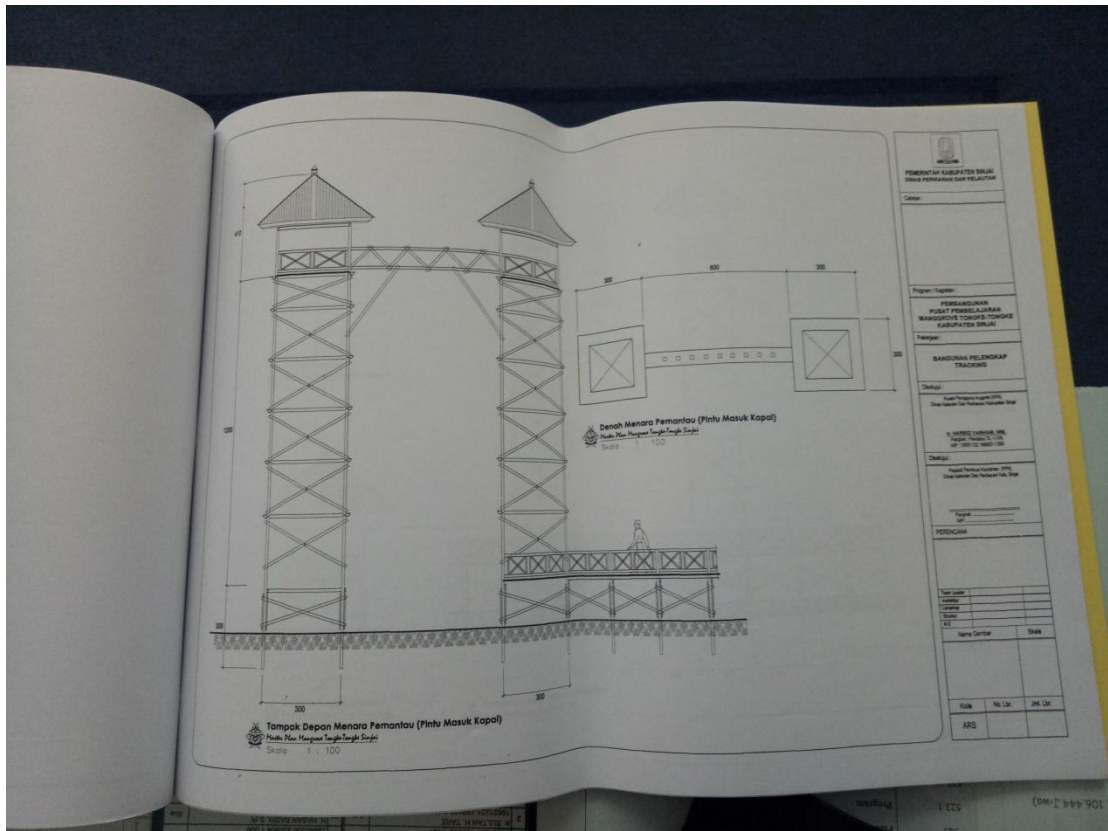
Tempatan
BANDUNGA PELENGKAP
TRACONG

Desain
 Nama Perancang: [Blank]
 Nama Konsultan: [Blank]

Desain
 Nama Perancang: [Blank]
 Nama Konsultan: [Blank]

Perencana
 Nama: [Blank]
 No. LK: [Blank]
 JHS LK: [Blank]

ARS



Logo of Kabupaten Simala
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALA
 DINAS PERKAWASAN DAN PELALUTAN

Catatan

Program / Kegiatan
PERENCANAAN
PUSAT PERBELAJARAN
MANGROVE TONGKOL TONGKOL
KABUPATEN SIMALA

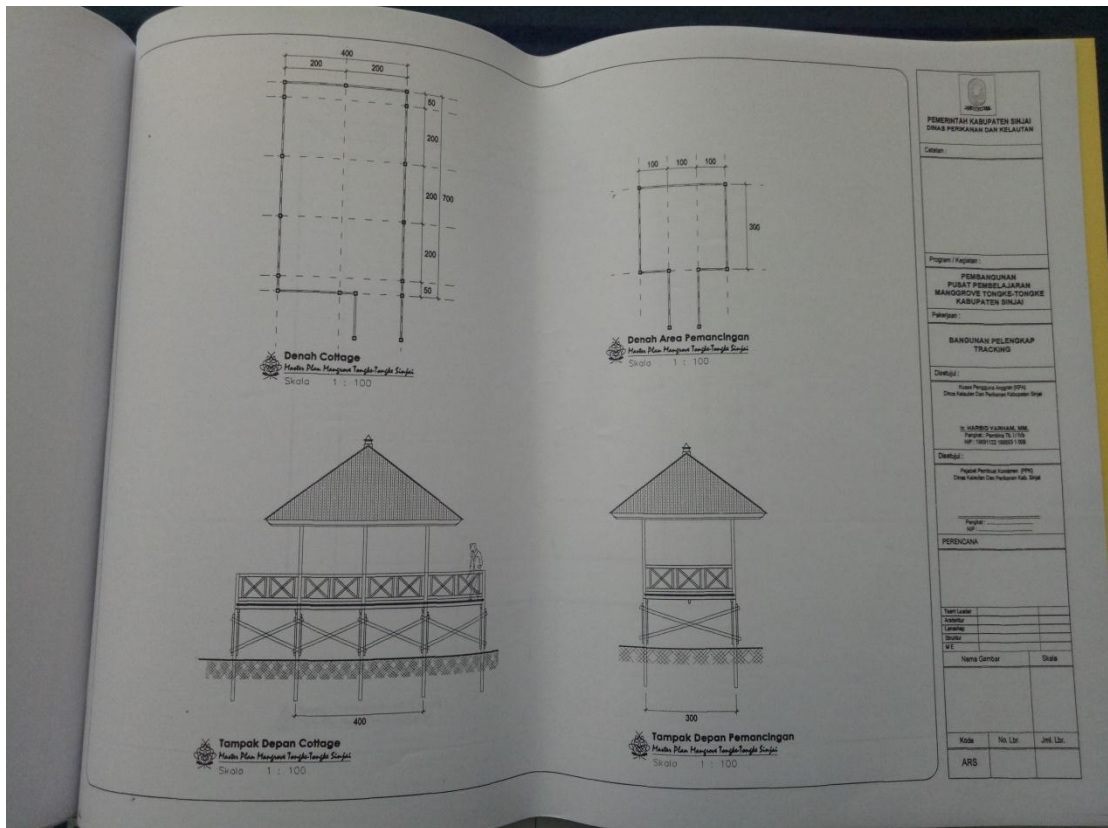
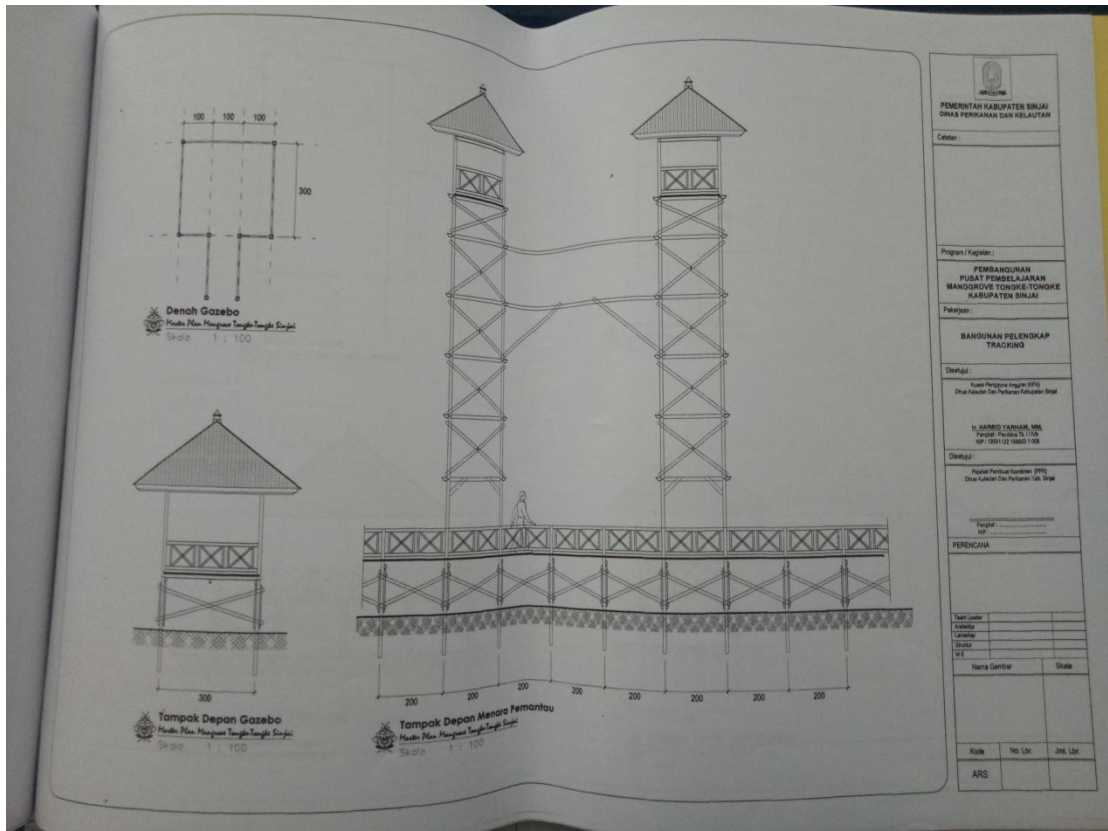
Tempatan
BANDUNGA PELENGKAP
TRACONG

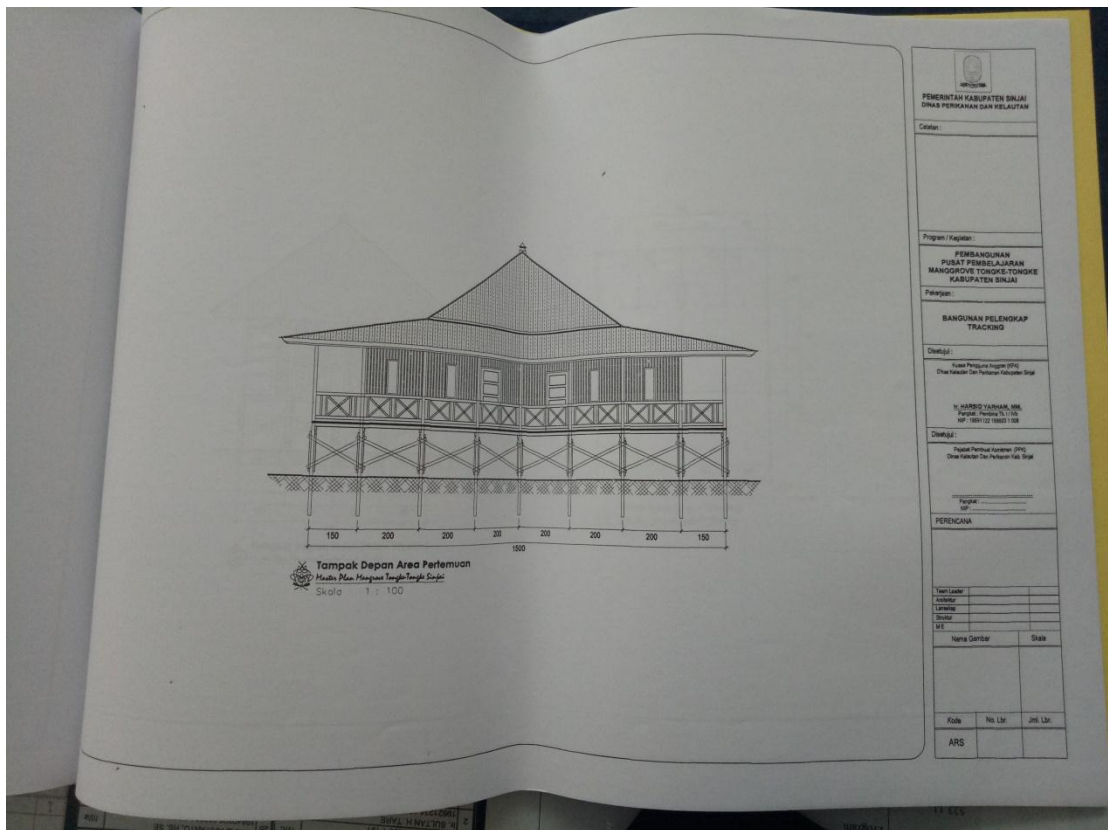
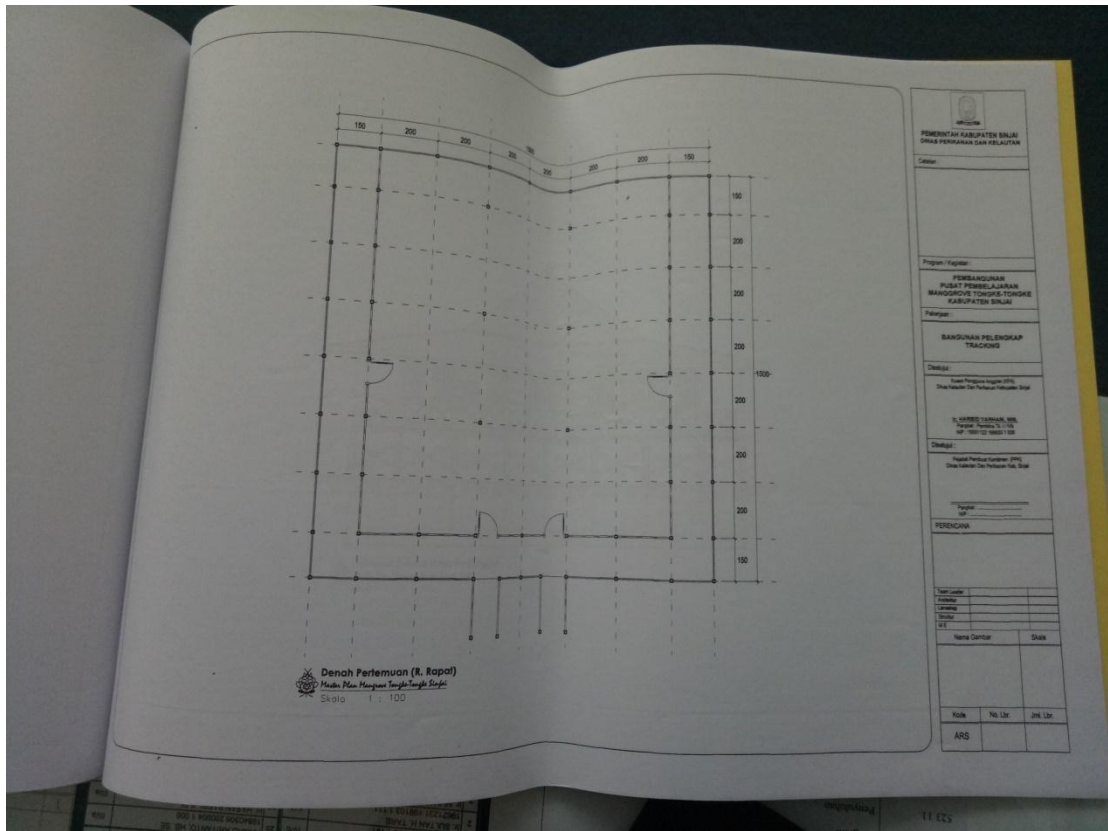
Desain
 Nama Perancang: [Blank]
 Nama Konsultan: [Blank]

Desain
 Nama Perancang: [Blank]
 Nama Konsultan: [Blank]

Perencana
 Nama: [Blank]
 No. LK: [Blank]
 JHS LK: [Blank]

ARS





RIWAYAT HIDUP



Astuti Umar lahir di Ballakale Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai pada tanggal 24 April 1996. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, buah kasih sayang dari pasangan Umar dan Husni.

Penulis memulai pendidikan di bangku Sekolah Dasar di SDN 52 PUDE Desa Aska pada tahun 2001. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Sinjai Selatan pada tahun 2008 dan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Sinjai Selatan pada Tahun 2011. Selanjutnya, pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan strata satu di Universitas Muhammadiyah Makassar dan lulus pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara tetapnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Berkat rahmat Allah Swt. serta iringan doa dari orang tua, saudara dan sahabat, perjuangan panjang penulis dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi ini dapat berhasil dengan tersusunnya skripsi yang berjudul “Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan Hutan Mangrove Tongke – Tongke Kabupaten Sinjai”.